

| PROF. MUDRAJAD KUNCORO, PH.D. | DRS. JOKO SANGAJI, M.SI. |

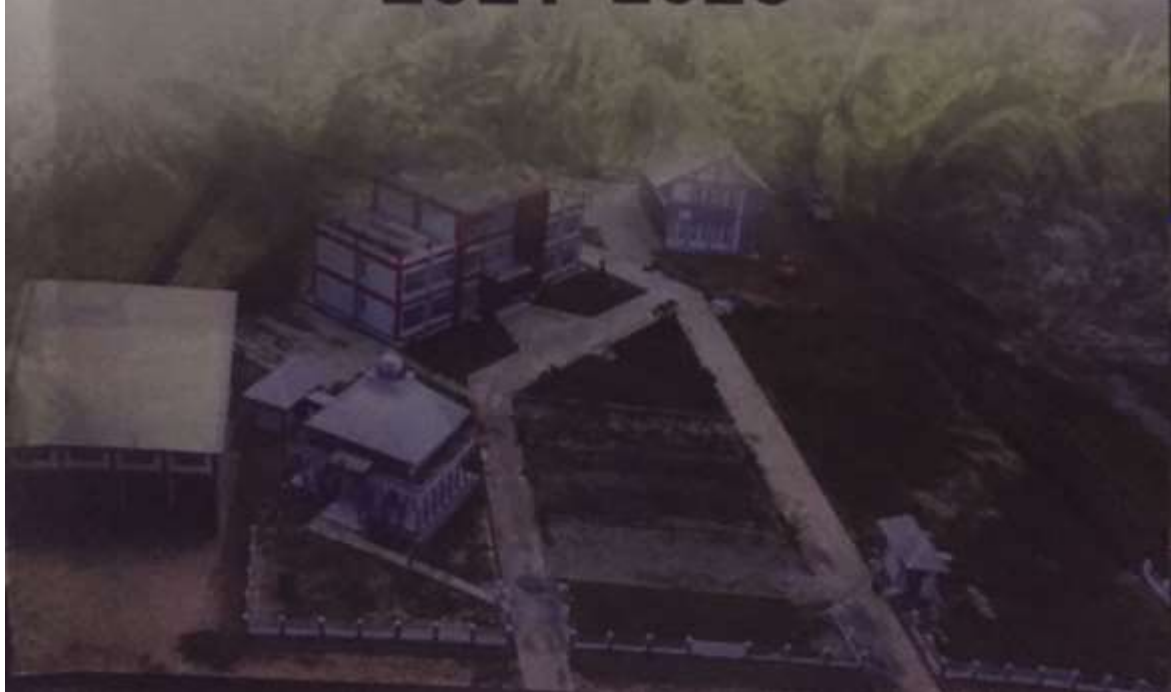
| LESTARI AGUSALIM, S.E., M.SI. | RUSMAN, S.E., M.EC.DEV. |

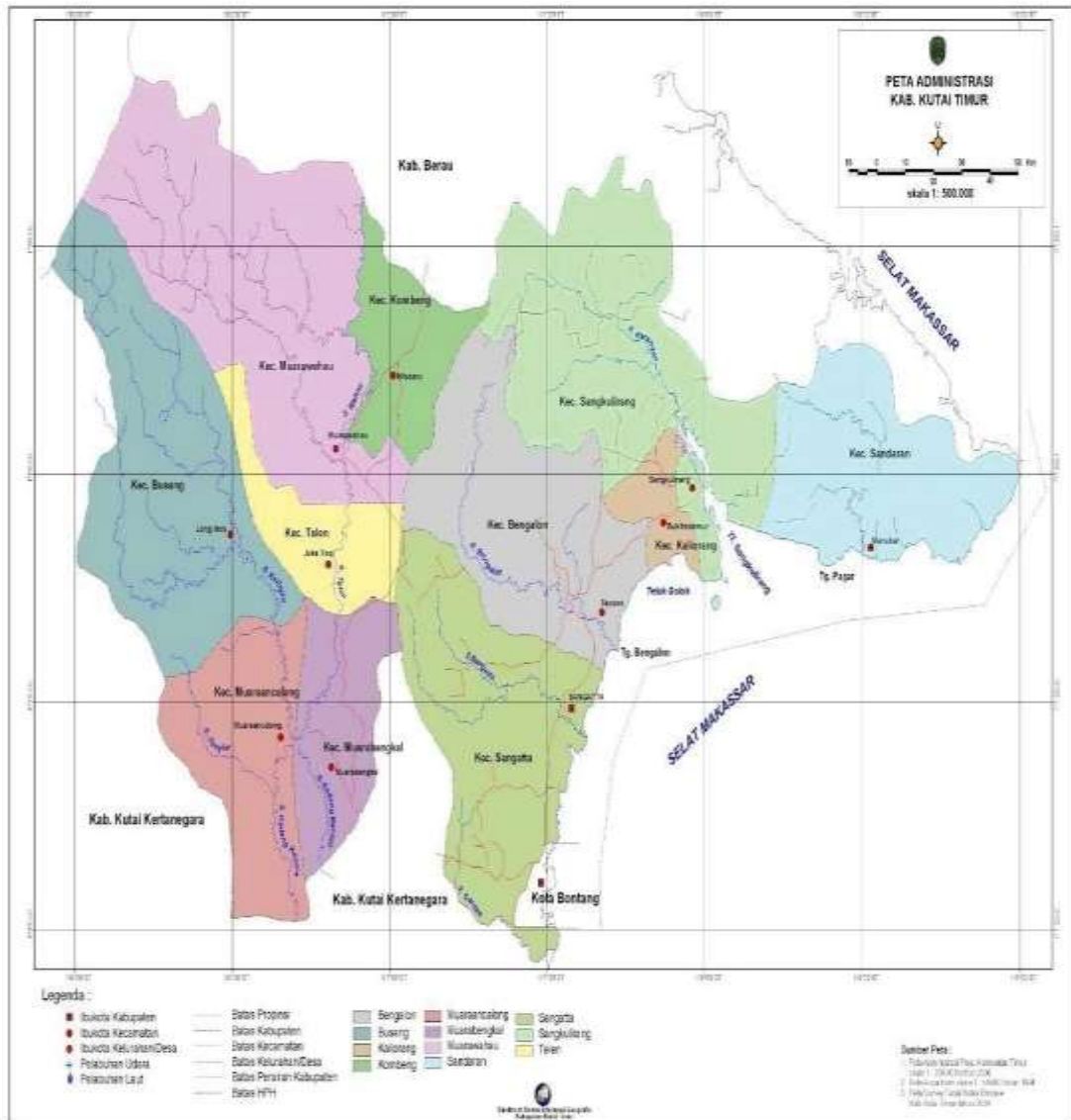
# NASKAH AKADEMIK

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG JILID II

# GERDABANGAGRI

2021-2026





# **NASKAH AKADEMIK**

## **Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021**

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jilid Ke. II

---

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-7787-21-1  
xiv; 122 hlm.; 23,5 cm.  
Bibliografi: hlm. 118  
Cetakan ke 1, November 2020

### **Penulis**

Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.  
Drs. Joko Sangaji, M.Si.  
Lestari Agusalim, S.E., M.Si.  
Rusman, S.E., M. Ec. Dev.

### **Desain Sampul**

Tim Kreatif Rajawali Buana Pusaka

### **Penerbit**

PT Rajawali Buana Pusaka  
Depok  
Telp: (021) 868-65632  
e-mail: [rajawalibuanapusaka@gmail.com](mailto:rajawalibuanapusaka@gmail.com)

### **Anggota IKAPI**

**No.374/JBA/2020**

Hak cipta di lindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk  
apapun tanpa seizin dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya buku mengenai “Naskah Akademik” dapat hadir di hadapan anda. Buku ini diharapkan dapat memberi penjelasan dan pencerahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kutim, mengenai latar belakang, visi, misi, strategi dan program aksi.

Kutim merupakan kabupaten dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar terutama minyak, batubara, dan perkebunan. Ironisnya, dengan potensi dan kekayaan alam yang dimiliki, kabupaten ini masih terbenam dalam beragam masalah struktural, terutama meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sebaran penduduk, meningkatnya pengangguran, meningkatnya ketimpangan pendapatan, rendahnya kualitas pembangunan manusia, maraknya korupsi dan nepotisme, minimnya program bagi milenial, buruknya infrastruktur jalan, memburuknya ekonomi selama pandemi Covid-19, belum tuntasnya pembangunan KEK MBTK, masih tingginya jumlah desa tertinggal, dan rendahnya kemandirian fiskal daerah.

Mencermati permasalahan dan potensi Kutim, pemimpin Kutim ke depan perlu melakukan perubahan bagi kabupaten terkaya di Kaltim ini dengan motto, “Kutim harus bangkit”. Momentum 2026 harus dijadikan momentum 118 tahun bangkitnya Kutim”. Penyusunan visi, misi, strategi dan program aksi yang terintegrasi adalah sangat penting untuk menuju Kutim Bangkit 2026. Modal dasar untuk mencapai visi Kutim Bangkit 2026 adalah sinergi antara modal manusia, modal alam dan fisik, serta modal sosial. Tiga modal dasar tersebut bertujuan untuk mencapai misi Kutim Bangkit 2026 yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Kutim yang berkualitas dan bebas dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, korupsi, memanfaatkan kekayaan alam Kutim secara berkelanjutan, serta mewujudkan sinergi kelompok birokrasi, wirausaha, dan pekerja di Kutim menuju daya saing global. Misi tersebut dalam aplikasinya akan diterapkan melalui tiga pendekatan strategi, yaitu pendekatan sektoral, spasial dan manusia.

Visi, misi, dan strategi dari Kutim Bangkit 2026 bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Pemimpin ke depan harus membawa angin segar bagi pembangunan Kutim di segala bidang. Dengan visi, misi, strategi, serta program aksi yang realistis, semoga menjadi pembuka jalan *Kutim* untuk bangkit dan mampu mewujudkan masyarakat Kutim yang “Kutai Timur Bangkit, Berdaya Saing, dan Berbasis Agribisnis (Gerdabangagri Jilid II).”

Sebagai tim penyusun, kami mengucapkan terimakasih kepada para sahabat dan narasumber yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan kontribusi dalam bentuk ide dan gagasan yang memperkaya penulisan buku ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Prof. Dr. Awang Farouk Ishak dan Awang Ferdian Hidayat yang telah mempercayai kami merangkai gagasannya bagaimana membangun Kutim 2021-2026 dan menorehkannya dalam bentuk buku. Sungguh suatu kesempatan dan kehormatan besar bagi tim mengenal wawasan, pribadi, *political and economic platform* para tokoh Kutim dan Kaltim ini.

Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan adalah tanggung jawab tim penyusun. Namun, apabila terdapat kebenaran dalam buku ini semata hanya karena ridho, tuntunan, dan petunjuk Allah, Sang Maha Pencipta. Allah-lah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

**Sangatta, 1 November 2020**

***Tim Penyusun***  
**Mudrajad Kuncoro**  
**Joko Sangaji**  
**Lestari Agusalim**  
**Rusman**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. GROWTH WITHOUT DEVELOPMENT .....	1
1.2. CHANGE BY DESIGN .....	3
<b>BAB 2 POTENSI EKONOMI KABUPATEN KUTIM</b> .....	<b>7</b>
2.1. SUMBANGAN KUTIM TERHADAP PROVINSI KALTIM .....	7
2.2. STRUKTUR EKONOMI .....	7
2.3. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDRB PER KAPITA .....	16
<b>BAB 3 ISU ISU STRATEJIK</b> .....	<b>17</b>
3.1. MENINGKATNYA KEMISKINAN .....	17
3.2. TIMPANGNYA SEBARAN PENDUDUK .....	21
3.3. MENINGKATNYA PENGANGGURAN .....	23
3.4. MENINGKATNYA KETIMPANGAN PENDAPATAN .....	25
3.5. RENDAHNYA KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA .....	27
3.6. MARAKNYA KORUPSI DAN NEPOTISME .....	31
3.7. MINIMNYA PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI MILENIAL .....	33
3.8. BURUKNYA INFRASTRUKTUR JALAN .....	36

3.9. MEMBURUKNYA EKONOMI SELAMA PANDEMI COVID-19 .....	38
3.9.1. Pandemi Covid-19 .....	39
3.9.2. Pertumbuhan Ekonomi Negatif .....	41
3.9.3. Merosotnya Ekspor Kaltim, Januari-Juni 2020 .....	45
3.9.4. Menurunnya Produksi dan Ekspor Batubara.....	46
3.10. BELUM TUNTASNYA PEMBANGUNAN KEK MBTK.....	48
3.11. TINGGINYA JUMLAH DESA TERTINGGAL.....	51
3.12. RENDAHNYA KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH .....	53
<b>BAB 4 VISI-MISI KUTIM 2021-2026.....</b>	<b>57</b>
4.1. VISI KABUPATEN/KOTA DI KALTIM.....	57
4.2. VISI DAN MISI KUTIM HINGGA 2020 .....	60
4.3. VISI MEMBANGUN KUTIM 2021-2026 .....	61
4.4. MISI MEMBANGUN KUTIM 2021-2026.....	64
<b>BAB 5 STRATEGI MEMBANGUN KUTIM.....</b>	<b>67</b>
5.1. PENDEKATAN SEKTORAL.....	69
5.2. PENDEKATAN SPASIAL .....	74
5.2.1. Jaringan Bulungan-Sangatta-Bontang- Tenggarong-Samarinda-Sendawar .....	75
5.2.2. Pengembangan Kawasan Agribisnis.....	75
5.2.3. Pembangunan Wilayah Tertinggal .....	77
5.3. PENDEKATAN MANUSIA.....	79
<b>BAB 6 PROGRAM AKSI .....</b>	<b>83</b>
6.1. PROGRAM PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN .....	84
6.1.1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Perkebunan dan Perikanan .....	84
6.1.2. Program Perluasan Areal Tanam.....	84
6.1.3. Program Pengelolaan Pasca Panen.....	85
6.1.4. Program Sertifikasi Produk.....	85

6.1.5. Program Pengembangan Gerai Produk.....	86
6.1.6. Program Ketahanan Energi.....	86
6.2. PROGRAM AKSI SPASIAL .....	88
6.2.1. Program Pembangunan Kawasan Agribisnis .....	88
6.2.2. Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy (KEK Maloy) .....	89
6.2.3. Pembangunan Wilayah Hulu dan Tertinggal.....	90
6.2.4. Manajemen Tata Ruang.....	91
6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) .....	91
6.3.1. Program Cerdas .....	96
6.3.2. Program Merata .....	97
6.3.3. Program Prestasi Gemilang.....	99
6.3.4. Peran Wanita.....	100
6.3.5. Program Peningkatan Layanan Kesehatan .....	101
6.3.6. Program Reformasi Birokrasi .....	106
6.3.7. Pelayanan Publik dan Iklim Investasi.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>119</b>



# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Kaltim, 2010-2019%) .....	8
Tabel 2. Distribusi PDRB Kutim Berdasarkan Lapangan Usaha, 2015-2019 (%) .....	9
Tabel 3. Pangsa Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2019 (Persentase Terhadap Total Produksi Tanaman Pangan) .....	12
Tabel 4. Perkembangan Produksi Pekebunan di Kabupaten Kutai Timur 2010-2019 (Ton).....	12
Tabel 5. Populasi Ternak di Kabupaten Kutai Timur, 2010-2019 .....	13
Tabel 6. Perusahaan dan Bidang Bisnis di Kabupaten Kutai Timur, 2019 .....	14
Tabel 7. Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang dan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim, 2019 .....	15
Tabel 8. PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Per Kapita di Kabupaten Kutim, 2015-2019 .....	16
Tabel 9. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Kaltim, 2017-2019 .....	18
Tabel 10. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kutim Menurut Kecamatan, 2018.....	22
Tabel 11. Perkembangan IPM Kutim, 2010-2019 .....	28
Tabel 12. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kutim 2010-2019 .....	28
Tabel 13. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kutim 2010-2019 .....	29

Tabel 14. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kutim 2010-2019 .....	30
Tabel 15. Perkembangan Pengeluaran per Kapita .....	31
Tabel 16. Penduduk Kutim Menurut Kelompok Umur, 2019 .....	34
Tabel 17. Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/ Kota (Km), Tahun 2016 .....	37
Tabel 18. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Kaltim, 2016 .....	38
Tabel 19. Perkembangan Kasus Covid19 Kabupaten Kutim, 21 September 2020 .....	41
Tabel 20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Menurut Pengeluaran, Triwulan I dan II 2020 .....	43
Tabel 21. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Kaltim, Juni 2020 .....	46
Tabel 22. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Provinsi Kaltim, 2020 .....	52
Tabel 23. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kutim 2017-2021 (Rp) .....	54
Tabel 24. Realiasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kutim Tahun 2017-2021 (dalam rupiah) .....	55
Tabel 25. Perbandingan Visi Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kaltim .....	58
Tabel 26. Visi Pembangunan Kabupaten Kutim: Jangka Panjang dan Menengah .....	60
Tabel 27. Misi Membangun Kabupaten Kutim 2021-2026 .....	65
Tabel 28. Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan .....	76
Tabel 29. Perwilayahan Komoditas Peternakan .....	77
Tabel 30. Jumlah Sekolah di Provinsi Kaltim Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota, 2019-2020 .....	93
Tabel 31. Banyaknya Perpustakaan di Kaltim Menurut Jenis dan Kab/Kota, 2019 .....	94

Tabel 32. Jumlah Sekolah di Kutim Menurut Jenis dan Kecamatan, 2018/2019 .....	98
Tabel 33. Jumlah Dokter, Perawat, Bidan, Rumah Sakit, dan Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2019 .....	102
Tabel 34. Jumlah Tenaga Medis, Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Kutim Menurut Kecamatan, 2019 109 .....	102

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kutim Berdasarkan Kecamatan .....	2
Gambar 2. Kerangka Pikir Perumusan Visi, Strategi dan Progam Aksi .....	5
Gambar 3. Tren Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) dan Persentase Kemiskinan Kutim Tahun 2015-2019 .....	19
Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2015-2019 (Ribu Jiwa) .....	19
Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim Tahun 2015-2019 .....	20
Gambar 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutim Menurut Kecamatan, 2018 .....	23
Gambar 7. Jumlah Pengangguran (Jiwa) Provinsi Kaltim Menurut Kab/Kota, Tahun 2017-2019 .....	24
Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2017-2019 (%) .....	25
Gambar 9. Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kutim, Kaltim dan Indonesia, 2006-2020 .....	26
Gambar 10. Pelaku Utama Korupsi di Indonesia .....	32
Gambar 11. Persentase Penduduk Kutim Menurut Kelompok Umur, 2019 .....	35
Gambar 12. Jumlah Kasus Positif Covid-19 Menurut Provinsi, Indonesia 20 September 2020 .....	39
Gambar 13. Peta Sebaran Kasus Postif Covid-19 Berdasarkan Kab/Kota di Kaltim, 22 September 2020 .....	40

Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi Kaltim-Pertambangan .....	44
Gambar 15. Perkembangan Ekspor Kaltim (juta US\$) Selama Masa Pandemi Covid-19, Januari-Juli 2020.....	45
Gambar 16. Volume Ekspor Batu Bara Kaltim, Triwulan I dan II 2020 .....	47
Gambar 17. Pembangunan Infrastruktur Dalam dan Luar Kawasan KEK Maloy.....	48
Gambar 18. Kemajuan Perkembangan KEK MBTK.....	49
Gambar 19. Hasil Evaluasi Kesiapan Beroperasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan .....	51
Gambar 20. Perbandingan Status Indeks Desa Membangun Menurut Kabupaten di Kaltim, 2020 .....	52
Gambar 21. Komposisi Pendapatan Daerah Kutim Tahun 2018 .....	55
Gambar 22. Hubungan antara Perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	59
Gambar 23. Tiga Aktivitas Utama Pemimpin Yang Ingin Melakukan Perubahan .....	61
Gambar 24. Tingkat Perubahan dan Strategi .....	63
Gambar 25. Sinergi Tiga Modal Bangsa .....	64
Gambar 26. Grand Desain Kutim Bangkit 2021-2026 .....	65
Gambar 27. Pendekatan Tripple Track Strategy untuk Revitalisasi Pertanian .....	70
Gambar 28. Integrasi Sistem dan Usaha Agribisnis .....	71
Gambar 29. Pendekatan Aksi Pengembangan Agribisnis.....	73
Gambar 30. Strategi Pengembangan Berdimensi Spasial.....	74
Gambar 31. Jaringan Tenggarong-Samarinda-Balikpapan.....	75
Gambar 32. Visi dan Strategi Pembangunan Wilayah/Desa Tertinggal Kutim .....	78
Gambar 33. Cakupan Pembangunan SDM Kutim .....	80
Gambar 34. Arah Pembangunan SDM Kutim .....	81
Gambar 35. Prioritas Pembangunan Kutim .....	83

Gambar 36. Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM .....	95
Gambar 37. Persebaran Sekolah di Kutim Menurut Jenis dan Kecamatan, 2018/2019 .....	98
Gambar 38. Inovasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Sakip .....	105
Gambar 39. Pendekatan Perencanaan Pembangunan THIS .....	108

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Kabupaten Kutai Timur (Kutim) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Indonesia yang berdiri pada tahun 1999. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km<sup>2</sup> atau 17% dari luas Kaltim. Kabupaten ini diproyeksikan akan memiliki jumlah penduduk sebanyak 375.928 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan 10,52 jiwa/km<sup>2</sup> dan pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir rata-rata 2,7% setiap tahun (BPS Kaltim, 2020). Kutim terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS- °52'39" LU. Kutim memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran seluas 536.200 ha, lereng bergelombang (1,42 juta ha), hingga pegunungan (1,6 juta ha), tersimpan potensi batu bara 5,35 miliar ton.

Bab ini akan menguraikan fenomena *growth without development* di Kutim. Sub bab berikutnya menguraikan garis besar isi buku ini dengan perspektif *change by design*: bagaimana melakukan perubahan yang direncanakan agar Kutim bisa bangkit 2026

### **1.1. GROWTH WITHOUT DEVELOPMENT**

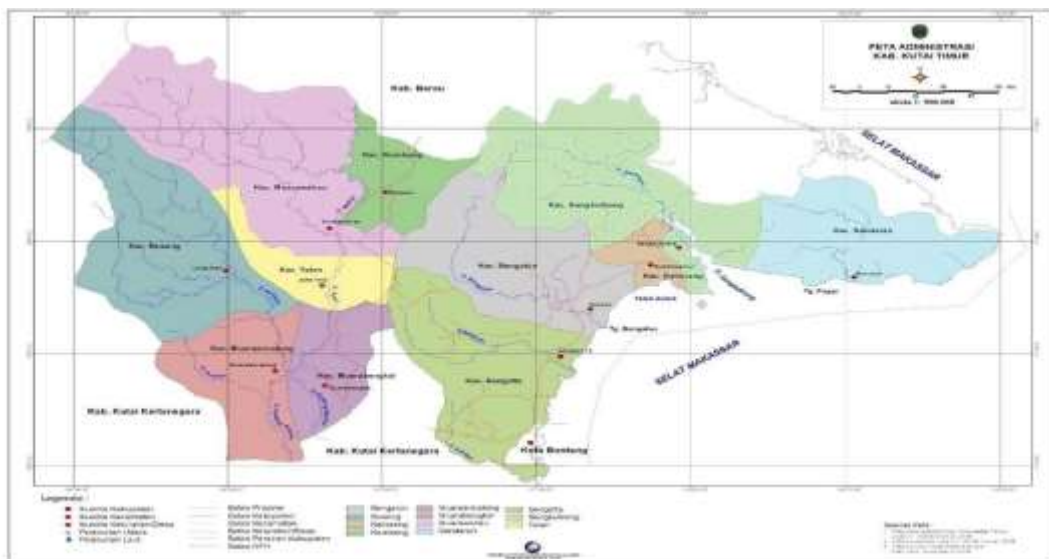
Kabupaten Kutim terdiri dari 18 kecamatan dan 13 kelurahan/desa (RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021). Gambar 1 menyajikan peta Kutim menurut kecamatan. Kutim merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, tentang Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sejak 1999, Kabupaten Kutai telah dimekarkan menjadi Kabupaten Kutim, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kota Bontang.

Kutim adalah kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) terutama sektor pertambangan-penggalian, sektor pertanian, dan sektor industri manufaktur. Kabupaten ini merupakan kabupaten kedua terkaya di Provinsi Kaltim setelah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) apabila diukur dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Namun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kutim



berada di posisi tertinggi di Kaltim melampaui Kukar, yaitu sebesar Rp. 355,55 juta pada tahun 2019 (BPS Kaltim, 2020). Hal ini dikarenakan oleh jumlah penduduk Kutim yang 375,9 jiwa ternyata hanya 48,71% dari penduduk Kukar.

**Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kutim Berdasarkan Kecamatan**



Sumber: DPMPTSP (2020)

Kekayaan alam Kutim yang melimpah, ditambah dengan pendapatan per kapita penduduknya yang tertinggi di Kaltim, ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Kutim. Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan yang mencapai 9,48% pada tahun 2019. Rekor kemiskinan ini merupakan tingkat kemiskinan tertinggi selama periode 2011-2019. Posisi ini menempatkan Kutim sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan kedua tertinggi di Kaltim, setelah Kabupaten Mahakam Ulu. Tentunya hal ini sangat ironis mengingat Kutim adalah kabupaten dengan pendapatan per kapita terbesar di Kaltim. Fakta ini mencerminkan bahwa hasil pembangunan di Kutim belum benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Kutim secara merata. Pembangunan Kutim masih jauh dari pembangunan inklusif.

Kekayaan alam Kutim belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercermin dari masih banyaknya keluarga miskin, pengangguran, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Kutim merupakan contoh daerah yang

mengalami “*growth without development*” (pertumbuhan tanpa diikuti dengan pembangunan), mirip dengan provinsi Kaltim sebelum dipimpin oleh Gubernur Awang Farouk Ishak (Kuncoro & Idris, 2010). Transformasi struktural belum terjadi dalam perekonomian Kutim. Bab 2 akan mengelaborasi bagaimana sektor pertambangan-penggalian sangat mendominasi ekonomi Kutim dengan sumbangan sebesar 78,9 hingga 81,6% selama tahun 2015-2019. Perekonomian Kutim justru mengalami gejala deindustrialisasi, yang ditunjukkan dengan penurunan sumbangan industri pengolahan terhadap PDRB Kutim, sekaligus menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi Kutim sejak tahun 2016.

Selain persoalan kemiskinan, realitasnya Kutim masih memiliki beberapa permasalahan mendasar lainnya seperti timpangnya sebaran penduduk, meningkatnya pengangguran, meningkatnya ketimpangan pendapatan, rendahnya kualitas pembangunan manusia, merebaknya korupsi dan nepotisme, masih rendahnya minat investor dalam mengembangkan KEK MBTK, memburuknya ekonomi selama pandemi covid-19, tingginya jumlah desa tertinggal dan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Bab 3 akan menguraikan secara rinci berbagai isu strategik terkini di Kutim.

## **1.2. CHANGE BY DESIGN**

Kabupaten Kutim memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan maju. Namun, berbagai permasalahan mendasar yang masih ada dapat menjadi penghambat bagi kemajuan Kutim jika tidak dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, Kutim membutuhkan pemimpin yang visioner dan kompeten untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh Kutim yang diwujudkan melalui strategi dan program aksi pembangunan yang jelas dan terarah.

Merujuk pada potensi ekonomi dan isu strategik, Kutim memiliki potensi luar biasa berupa sumber daya alam. Potensi yang besar itu, kalau saja dikelola dengan baik, mestinya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, Kutim memerlukan seorang pemimpin yang cakap dan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Ke depan dibutuhkan visi “Kutai Timur Bangkit, Berdaya Saing, dan Berbasis Agroindustri”. Visi ini merupakan keberlanjutan dari keberhasilan pembangunan Kutim dalam era Bupati Awang Faroek Ishak (AFI) periode 1999-2003 dan 2006-2008. Bab 4 akan menjabarkan bagaimana visi dan misi membangun Kutim 2021-2026.

Gerdabangagri merupakan akronim dari Gerakan Daerah Pembangunan Agroindustri. Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Kutim sebagai Sentra Agroindustri yang berbasiskan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kutim. Gerdabangagri Jilid I dirintis dan dirintis dan dilaksanakan oleh Awang Faroek Ishak, Bupati Pertama Kutim selama periode 1999 hingga 2003 dan 2006 hingga 2008. Pada Gerdabangagri Jilid 2 ini diarahkan untuk membangun agroindustri melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Potensi utama yang dapat dikembangkan dalam kawasan ekonomi ini adalah pembangunan industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan kayu. Keberhasilan pengembangan KEK ini sangat tergantung dengan iklim investasi. Oleh sebab itu, regulasi yang dibuat haruslah diarahkan untuk mempermudah investor, khususnya bagi rakyat Kutim maupun investor untuk terlibat dalam penanaman modal kebun dan ikut terlibat dalam kepemilikan saham baik di sektor hulu dan hilir. Pembangunan KEK ini hanya akan berhasil apabila investor lokal, nasional, dan luar negeri terlibat di dalam membangun Kutim yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Dengan begitu, seluruh masyarakat Kutim akan menikmati hasil-hasil pembangunan daerah.

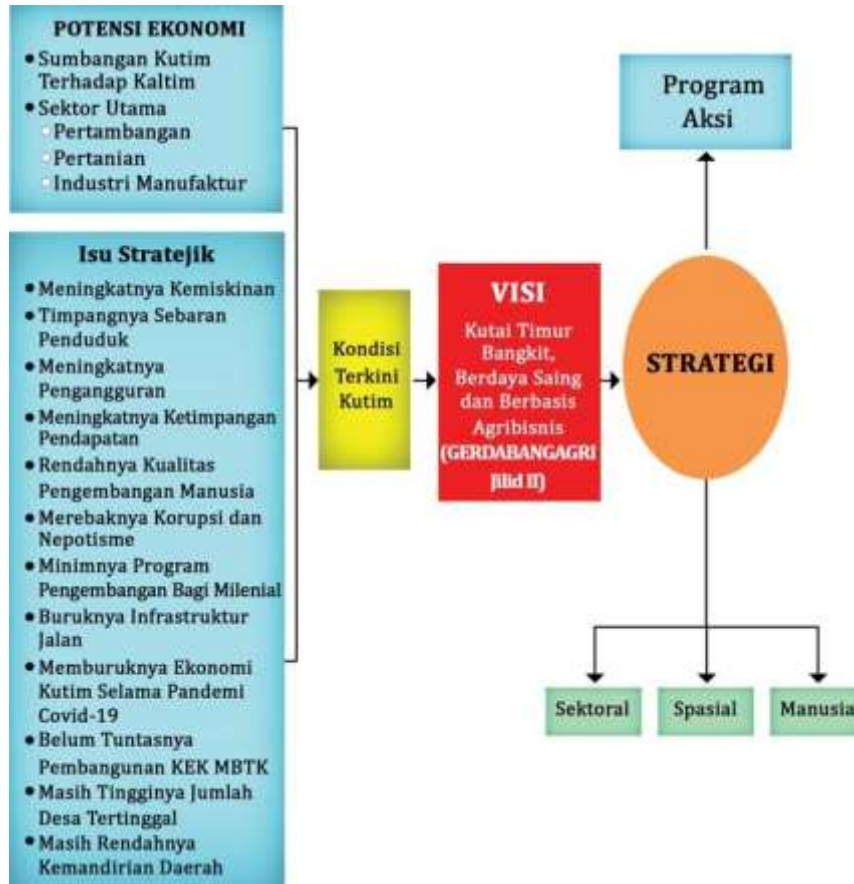
Pada sektor pertambangan, para pelaku bisnis tetap dapat terus melakukan aktivitas penambangan. Namun, lahan-lahan yang direklamasi haruslah diserahkan kepada karyawan berupa kaveling tanah yang dengan luasan yang layak dan diberikan saham sehingga mereka tidak perlu pergi setelah tambang habis. Untuk itu, kepala daerah kabupaten ini di masa mendatang harus membuat peraturan daerah dan peraturan bupati yang mendukung program tersebut.

Visi besar Kutim dapat dicapai dengan menyusun rencana strategi dan program aksi yang tepat. Terdapat tiga strategi pembangunan yang akan dilakukan, yaitu pembangunan yang berbasis sektoral, spasial, dan manusia. Ketiga strategi ini saling terkait satu dengan lainnya. Bab 5 akan menjabarkan bagaimana ketiga strategi membangun Kutim 2026. Apabila pembangunan bias terhadap salah satunya, makanya akan memunculkan persoalan sosialekonomi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ketiga pendekatan tersebut akan dilaksanakan secara terintegrasi. Selanjutnya, setelah menetapkan visi dan strategi.

Langkah penting terakhir yang perlu dilakukan adalah menentukan rencana program aksi. Bab 5 akan menjabarkan bagaimana program aksi yang akan diterapkan. Visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi tanpa visi yang jelas hanyalah sekedar aktivitas. Dalam banyak kasus, visi dan aksi yang terpadu dapat mengubah dunia. Bab 6 akan mengelaborasi program aksi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Kutim 2026. Dalam hal ini, visi, strategi, dan program aksi yang disampaikan dalam buku ini akan membawa Kutim menjadi lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan Kutim 2021-2026 dapat digambarkan dalam kerangka konseptual perumusan visi, strategi dan program aksi yang dapat dilihat pada Gambar 2. Visi, strategi, dan program aksi dirumuskan atas dasar kajian dan identifikasi yang mendalam atas potensi ekonomi dan isu stratejik Kutim. Setelah mengkaji dan mengidentifikasi potensi ekonomi dan isu stratejik, kemudian perumusan visi dan misi dimulai, diikuti dengan strategi dan program aksi yang jelas dan terarah dalam mencapai visi tersebut. Bab selanjutnya dalam buku ini akan menjabarkan potensi ekonomi, isu stratejik, visi, misi, strategi, dan program aksi secara rinci. Inilah yang disebut *change by design*, perubahan yang didesain sedemikian rupa agar Kutim mampu bangkit, berdaya saing, dan berbasis agroindustri sebagai pilar ekonomi rakyat.

**Gambar 2. Kerangka Pikir Perumusan Visi, Strategi, dan Program Aksi**



[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

## BAB 2

# POTENSI EKONOMI KABUPATEN KUTIM

Bab ini akan menelusuri seberapa jauh potensi ekonomi Kabupaten Kutim. Ada dua fokus analisis. Pertama, berapa sumbangan Kabupaten Kutim terhadap perekonomian Provinsi Kaltim? Kedua, bagaimana struktur ekonomi Kutim dilihat dari perspektif lapangan usaha dan komoditi utama yang dihasilkan?

### 2.1. SUMBANGAN KUTIM TERHADAP PROVINSI KALTIM

Kabupaten Kutim menyumbang PDRB Provinsi Kaltim antara 15,4%-20,5% selama tahun 2010-2019 (lihat Tabel 1). Selama periode tersebut, sumbangan Kutim meningkat dari 15,4% pada tahun 2010 menjadi 20,5% pada tahun 2019, meskipun ada penurunan dari 20,4% pada tahun 2017 menjadi 20,2% pada tahun 2018.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kutim merupakan penyumbang kedua terbesar PDRB Provinsi Kaltim, setelah Kabupaten Kukar. Sedangkan, Kabupaten Panajam Paser Utara dan Mahakam Ulu merupakan dua Kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil bagi PDRB Provinsi Kaltim. PDRB Kutim meningkat pesat dari hanya menyumbang 15,4% terhadap PDRB Provinsi Kaltim pada tahun 2010 menjadi 20,5% tahun 2019. Perlu dicatat, perbedaan sumbangan PDRB antara Kabupaten Kukar dan Kutim makin mengecil dari 16,3% pada tahun 2010 dan menjadi 4,4% pada tahun 2019.

### 2.2. STRUKTUR EKONOMI

Sektor utama penyumbang PDRB Kutim adalah sektor pertambangan-penggalian, diikuti pertanian-peternakan-kehutanan, dan industri pengolahan.

Sumbangan sektor pertambangan-penggalian sangat mendominasi ekonomi Kutim dengan sumbangan sebesar 78,9% hingga 81,6% selama tahun 2015-2019 (lihat Tabel 2). Tingginya pangsa sektor pertambangan-penggalian terutama

disebabkan oleh meningkatnya produksi batubara. Produksi batubara terutama dihasilkan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang meningkat 6,68% pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

**Tabel 1. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Kaltim, 2010-2019 (%)**

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Paser	7,1	7,2	7,3	7,6	7,8	7,6	7,3	7,4	7,6	7,4
Kutai Barat	3,3	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5	4,4
Kutai Kartanegara	31,7	30,2	30,3	29,7	28,8	25,3	25,0	25,3	25,5	24,9
Kutai Timur	15,4	17,1	18,1	18,4	18,7	18,6	18,6	20,4	20,2	20,5
Berau	3,8	4,4	4,8	5,2	5,5	6,0	6,0	6,0	5,9	6,0
Penajam Paser Utara	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
Mahakam Ulu	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Balikpapan	15,0	14,8	14,8	15,0	15,5	14,8	15,7	14,9	15,2	15,7
Samarinda	8,0	8,7	8,3	8,5	8,9	10,1	10,3	9,9	10,1	10,5
Bontang	14,2	12,3	10,6	9,8	9,3	11,6	10,8	10,0	9,3	8,9
Kalimantan Timur	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

BPS Kaltim (2020)

Sektor kedua dan ketiga penyumbang PDRB Kutim adalah pertanian-kehutanan-perikanan dan industri pengolahan. Sumbangan sektor pertanian-kehutanan-perikanan sebesar 7,6% hingga 8,7% pada periode 2015-2019, di mana sejak tahun 2016, sumbangan sektor ini cenderung menurun.

Sektor pertambangan memberi sumbangan terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Kutim, khususnya tambang minyak bumi dan batubara. Pada tahun 2017, produksi minyak bumi sebesar 339 barrel per hari dan produksi batubara mencapai 82,53 juta ton. Hasil tambang batubara dari Kabupaten Kutim merupakan penyangga terbesar ekspor batubara Kaltim dan juga merupakan bahan baku pembangkit listrik di Pulau Jawa dan juga diekspor ke manca negara.

**Tabel 2. Distribusi PDRB Kutim Berdasarkan Lapangan Usaha, 2015-2019 (%)**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,2	8,7	7,7	7,6	7,7
Pertambangan dan Penggalian	80,3	78,9	81,6	81,6	81,5
Industri Pengolahan	2,7	3,3	3,0	3,0	2,9
Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konstruksi	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,8	1,9	1,7	1,7	1,8
Transportasi dan Pergudangan	1,2	1,2	1,0	1,0	1,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Informasi dan Komunikasi	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Real Estat	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Jasa Perusahaan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9
Jasa Pendidikan	1,0	1,1	0,9	1,0	1,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Jasa Lainnya	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Produk Domestik Bruto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Kutim (2020)

Jumlah perusahaan pertambangan batubara yang memegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan beroperasi di Kabupaten Kutim ada 6 perusahaan. Keenam perusahaan tersebut adalah PT. KPC, PT. Indominco Mandiri, PT. Indexim Coalindo, PT. Ganda Alam makmur, PT. Perkasa Inakakerta, dan PT. Tambang Damai.



KPC merupakan produsen batu bara terbesar di Kutai Timur. Perusahaan juga memperoleh area konsesi pertambangan seluas 84.938 ha di Sangatta, Benyamin, dan Rantau Pulung, Kutai Timur, Kaltim. Penambangan batu bara anak perusahaan Bumi Resources ini merupakan salah satu *open pit mining* terbesar di dunia. Kapasitas produksi batubara KPC mencapai 70 juta ton per tahun. Pada tahun 2018 besaran produksi kurang lebih sekitar 57 juta ton dan naik menjadi 60 juta ton pada tahun 2019. Dengan besar produksi batubara tersebut, maka KPC merupakan produsen batubara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018, penjualan KPC ke dalam negeri mencapai 28,5%. Ekspor batubara KPC ke India sebesar 20,5%, Tiongkok sebesar 15%, Jepang sebesar 9,5%, Filipina sebesar 5,6%, dan selebihnya Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Italia, Pakistan, dan Brunei. Pengguna terbesar batu bara KPC adalah pembangkit listrik sebesar 68,4%. Selebihnya adalah penjualan kepada *trading company* sebesar 28%, pabrik baja sebesar 1,9%, dan industri sebesar 1,7% (Beritasatu, 2019).

Revitalisasi pertanian adalah upaya menjadikan sektor pertanian Kutim vital yang terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan budidaya hutan. Kutim memiliki potensi yang sangat besar untuk kelima bidang ini. Revitalisasi pertanian itu merupakan komitmen dan juga pemihakan kepada petani. Di samping itu, pembangunan pertanian juga meningkatkan sisi profesionalitas dan kesejahteraan petani. Selama ini, revitalisasi pertanian hanya menjadi janji politis saja.

Meskipun perekonomian Kutim didominasi oleh sektor migas dan batubara, sektor pertanian tetap memegang peranan penting untuk kemajuan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kutim. Kutim memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Pembangunan agribisnis berbasis ekologis dapat dilakukan dengan agribisnis yang memanfaatkan produk-produk ramah lingkungan yang dihasilkan oleh sejumlah wilayah di Kutim. Pengembangan usaha agribisnis akan meningkatkan nilai tambah (*value added*) sektor pertanian yang pada hakikatnya dapat diarahkan untuk pengembangan agroindustri.

Pengembangan agroindustri sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi Kutim, menjadi tumpuan masa depan Kutim pasca tambang di masa depan. Gagasan ini sangat mungkin untuk bisa diwujudkan, mengingat Kutim memiliki lahan pertanian seluas 1,3 juta hektar (Disbun Kaltim, 2020).

Sementara di sektor perkebunan, kelapa sawit merupakan produk unggulan yang terus mengalami peningkatan produksi dari 20.293,56 kilogram per hektar di 2012 menjadi 21.005,95 kilogram per hektar pada tahun 2014. Pertumbuhan industri kelapa sawit ini diikuti pula dengan perkembangan industri hasil perkebunan, yang ditandai dengan hadirnya 19 pabrik Crude Palm Oil (CPO) di beberapa kecamatan di Kutim. Hingga tahun 2014 telah terbangun 20 unit pabrik CPO dengan total produksi terpasang 1.045 ton per jam dengan kapasitas terpakai 985 ton per jam. Hingga tahun 2019, BPS Kutim mencatat produksi kelapa sawit telah mencapai 987,63 ton (BPS Kutim, 2020).

Untuk potensi tanaman pangan, di Kutim terdapat 18 kecamatan yang memiliki potensi lahan basah dan kering untuk swasembada pangan. Selain kelapa sawit, beberapa komoditas perkebunan lain yang tersebar di berbagai kecamatan adalah kopi, karet, dan kakao. Meskipun sumbangannya masih belum begitu besar, dengan konsep pembangunan yang senantiasa diarahkan dan berorientasi pada arah pengembangan agroindustri dan energi, pangsa subsektor ini masih dapat ditingkatkan sehingga secara signifikan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kutim.

Di bidang tanaman pangan, padi memberikan sumbangan terbesar, yang mencapai 76,1% hingga 97,6%, diikuti palawija sebesar 2,4% hingga 22,4% selama tahun 2010-2018 (lihat Tabel 3). Sumbangan komoditi padi terbesar berasal dari padi sawah dan kemudian diikuti oleh padi ladang. Selanjutnya, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung adalah tiga besar penyumbang palawija selama tahun 2010-2018. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, baik padi sawah maupun padi ladang. Produksi palawija pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Kenaikan produksi palawija disumbang oleh kenaikan jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar.

Produksi andalan di sektor perkebunan di Kabupaten Kutim adalah kelapa sawit dengan produksi 91.568,8 ton hingga 1.091.635,4 ton selama tahun 2010-2019. Produksi andalan berikutnya adalah kakao dengan produksi 1.234 ton hingga 3.616 ton, diikuti kelapa dengan produksi 495,6 ton hingga 2.256,4 ton, karet dengan produksi 267,7 ton hingga 970,7 ton, lada dengan produksi 77,3 ton hingga 127,3 ton, dan kopi dengan produksi 30,5 ton hingga 194,1 ton (lihat Tabel 4).

**Tabel 3. Pangsa Produksi Padi dan Palawija  
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2019 (Persentase Terhadap Total  
Produksi Tanaman Pangan)**

Komoditi		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Padi		77,7	81,6	83,9	88,2	86,3	89,6	77,6	80,6	76,1
1	Padi Sawah	43,2	48,2	49,3	56,4	54,8	56,9	41,7	52,8	48,9
2	Padi Ladang	34,5	33,4	34,6	31,8	31,5	32,7	35,9	27,8	27,3
Palawija		22,3	18,4	16,1	11,8	13,7	10,4	22,4	19,4	23,9
1	Jagung	4,2	2,7	1,3	1,6	1,9	0,7	3,8	2,7	3,4
2	Kedelai	1,1	0,7	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
3	Kacang Tanah	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4
4	Kacang Hijau	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Ubi Kayu	11,5	10,1	9,4	7,2	7,8	6,5	15,8	13,2	16,1
6	Ubi Jalar	4,5	4,2	4,0	2,5	3,2	2,8	2,3	3,1	3,7
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Kaltim (2020); BPS Kutim (2019;2020), Pemkab Kutim (2020)

**Tabel 4. Perkembangan Produksi Perkebunan  
di Kabupaten Kutai Timur 2010-2019 (Ton)**

Tahun	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kakao	Lada	Kopi
2010	267,7	2.256,4	91.568,8	3.616,0	110,6	194,1
2011	485,5	1.509,3	185.968,1	3.616,8	107,0	140,5
2012	543,6	583,9	260.354,0	2.510,9	77,3	42,6
2013	481,0	596,2	634.882,5	2.503,2	79,1	47,8
2014	764,5	495,6	756.708,3	2.522,5	99,8	40,8
2015	628,5	631,5	5.984.489,0	1.234,1	79,6	30,5
2016	866,7	977,1	5.082.353,8	1.311,4	103,7	48,5
2017	970,7	1.094,4	1.019.635,4	1.468,4	127,3	48,7
2018	907,2	911,9	940.158,4	1.372,3	119,0	45,6
2019	830,0	940,0	987.630,0	1.260,0	110,0	43,0

Sumber: BPS Kutim (2020)

Produksi kelapa sawit mengalami penurunan selama tahun 2015-2018, dan kemudian naik tipis pada tahun 2019. Produksi kelapa juga mengalami penurunan pada tahun 2017-2018, dan kemudian naik tipis pada tahun 2019. Selanjutnya, produksi karet, kakao, lada, dan kopi mengalami penurunan sejak tahun 2017.

Kabupaten Kutim memiliki andalan di bidang peternakan. Potensi peternakan Kutim juga cukup besar. Subsektor ini menjadi penyumbang terbesar ketiga di Kutim setelah subsektor kehutanan dan tanaman bahan makanan. Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa ayam pedaging merupakan populasi ternak terbanyak dan kuda adalah populasi ternak yang terkecil selama tahun 2010-2019. Jumlah populasi ternak tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, kecuali ayam kampung dan itik. Ayam pedaging mengalami penurunan terbesar dari 3.153.491 ekor tahun 2018 menjadi 2.653.146 ekor tahun 2019 atau turun sebesar 500.345 ekor dan sapi perah mengalami penurunan terkecil dari 70 ekor tahun 2018 menjadi 69 ekor tahun 2019 atau sebesar 1 ekor.

**Tabel 5. Populasi Ternak di Kabupaten Kutai Timur, 2010-2019**

Tahun	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
2010	2	18.312	864	-	8.196	-	6.366	642.150	-	408.393	21.103
2011	5	15.022	787	-	6.977	-	5.800	557.800	15.000	1.821.500	11.213
2012	12	15.983	779	-	7.633	-	6.591	625.168	29.293	1.903.693	16.588
2013	24	17.177	682	-	8.320	-	5.993	626.591	29.293	1.825.000	17.199
2014	51	17.406	617	10	9.953	33	6.528	633.398	28.166	2.192.083	29.446
2015	48	17.977	715	60	10.799	37	8.445	465.533	40.570	3.705.919	21.273
2016	69	19.118	699	53	10.584	37	8.328	435.096	40.145	3.832.574	13.822
2017	71	17.785	414	51	9.761	-	9.679	399.090	45.045	3.933.894	16.066
2018	70	18.357	539	55	8.826	-	9.924	300.044	45.845	3.153.491	34.185
2019	69	17.406	221	39	8.698	-	8.614	330.459	18.689	2.653.146	43.671

Sumber: BPS Kaltim (2020)

Sektor industri pengolahan menyumbang 2,7% hingga 2,9% terhadap PDRB Kabupaten Kutim selama periode 2015-2019. Sumbangan tertinggi industri pengolahan terjadi pada tahun 2016 (3,3%). Sejak tahun tersebut, sumbangan industri pengolahan cenderung mengalami penurunan. Tabel 6 menyajikan nama perusahaan, bidang bisnis dan kategori industri di Kabupaten Kutim. Bidang bisnis dari industri tersebut adalah CPO, kecuali PT Batu Bata Uul Jaya yang bergerak di bidang batubata dan PT Tjokro Bersaudara yang bergerak di bidang pabrikasi Mesin dan Komponen Alat Berat. Berdasarkan kategori industri, jumlah industri besar adalah 19 dan jumlah industri sedang adalah 3.

**Tabel 6. Perusahaan dan Bidang Bisnis di Kabupaten Kutai Timur, 2019**

No	Perusahaan	Bidang Bisnis	Kategori
1	Anugerah Energitama, PT	Crude Palm Oil (CPO)	Industri Besar
2	Batu Bata Uul Jaya	Bata Bata	Industri Sedang
3	Bima Agri Sawit, PT	CPO dan Kernel	Industri Besar
4	Dharma Setya Nusantara, PT	CPO	Industri Besar
5	Etam Bersama Lestari, PT	CPO	Industri Sedang
6	Fairco Agro Mandiri, PT	CPO	Industri Besar
7	Gunta Samba, PT	CPO	Industri Besar
8	Indonesia Plantation Synergy, PT	CPO, Crude Palm Kernel Oil (CPKO), Palm Kernel Expeller (PKE)	Industri Besar
9	Karya Nusa Eka Daya, PT	CPO	Industri Besar
10	Kemilau Indah Nusantara, PT	CPO	Industri Besar
11	Kresna Duta Agroindo, PT	CPO	Industri Besar
12	Kutai Balian Nauli, PT	CPO	Industri Besar
13	Multi Pacific International, PT	CPO	Industri Besar
14	Sawit Prima Nusantara, PT	CPO	Industri Besar
15	Sinergi Agro Industri, PT	CPO dan Palm Kernel	Industri Besar
16	Sumber Kharisma Persada (Astra Group), PT	CPO	Industri Sedang
17	Swakarsa Sinar Sentoso, PT	CPO	Industri Besar
18	Tapian Nadenggan (Jak Luay Mill), PT	CPO dan Kernel	Industri Besar
19	Telen (Pangadan Baay), PT	CPO dan Kernel	Industri Besar
20	Telen Prima Sawit, PT	CPO	Industri Besar
21	Tjokro Bersaudara, PT	Pabrikasi Mesin dan Komponen Alat Berat	Industri Besar
22	Wira Inova Nusantara, PT	CPO	Industri Besar

Sumber: BPS Kaltim (2019)

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan jumlah perusahaan sedang lebih besar dibandingkan perusahaan banyak di Provinsi Kaltim. Daya serap tenaga kerja perusahaan besar adalah 85,1% dari total tenaga kerja perusahaan industri, sedangkan daya serap tenaga kerja perusahaan industri sedang adalah 14,6% dari total tenaga kerja perusahaan industri di Provinsi Kaltim. Sementara itu, daya serap tenaga kerja perusahaan industri besar adalah 14,86% perusahaan industri sedang pangsa industri sedang, pangsa industri sedang adalah 0,5% dari total tenaga kerja perusahaan industri di Kabupaten Kutim.

**Tabel 7. Jumlah Perusahaan Industri Besar Seding dan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim, 2019**

Kabupaten/Kota	Industri Besar		Industri Seding		Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja		
Paser	9	1.137	7	496	16	1.633
Kutai Barat	2	241	1	99	3	340
Kutai Kartanegara	12	2.450	7	441	19	2.891
Kutai Timur	19	5.019	3	178	22	5.197
Berau	3	408	8	432	11	840
Panajam Paser Utara	3	738	6	343	9	1.081
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-
Balikpapan	20	6.069	42	1.930	62	7.999
Samarinda	16	9.470	20	958	36	10.428
Bontang	6	3.312	2	51	8	3.363

Sumber: BPS Kaltim (2020)

### 2.3. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDRB PER KAPITA

Besarnya PDRB ADHK di Kabupaten Kutim adalah Rp.84,7 hingga Rp.95,6 triliun selama tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutim mempunyai nilai yang berfluktuasi. Atas dasar harga konstan 2010 nonmigas dan batubara, pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,34% pada tahun 2018 dan terendah sebesar minus 1,08% pada tahun 2016. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 disebabkan oleh penurunan sumbangan sektor pertambangan di Kabupaten Kutim (lihat Tabel 8).

PDRB per kapita ADHK 2010 di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.244,80 hingga Rp.264,56 juta. PDRB per kapita ADHK cenderung menurun selama tahun 2015-2018 meski mulai meningkat pada tahun 2019 (lihat Tabel 8). Kecenderungan menurunnya PDRB per kapita Kutim mencerminkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat Kutim selama dipimpin Bupati Ismunandar.

**Tabel 8. PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Per Kapita di Kabupaten Kutim, 2015-2019**

Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
Rincian	2015	2016	2017	2018	2019
ADHK 2010	84.689.772,1	83.771.694,4	86.520.249,9	88.545.266,4	95.604.475,0
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
ADHK 2010 Nonmigas & Batubara	1,45	-1,08	3,28	5,34	4,53
PDRB Per Kapita (Juta Rpiah)					
ADHK 2010	264,56	251,11	248,98	244,80	254,19
Jumlah Penduduk (ribu orang)	320,12	333,6	347,5	361,7	376,1

Sumber: BPS Kutim (2020); Satu Data Indonesia (2020)

## BAB 3 ISU-ISU STRATEJIK

Penyusunan visi dan strategi pembangunan Kutim perlu mempertimbangkan isu-isu stratejik yang berkaitan dengan kondisi terkini Kutim. Isu-isu stratejik pembangunan Kutim setidaknya mencakup problem seperti meningkatnya kemiskinan, timpangnya sebaran penduduk, meningkatnya pengangguran, meningkatnya ketimpangan pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), merebaknya korupsi dan nepotisme, minimnya program pembangunan milenial dan buruknya infrastruktur jalan. Isu stratejik lain yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, antara lain seperti memburuknya ekonomi Kutim selama pandemi covid-19, belum tuntasnya pembangunan KEK MBTK, masih tingginya jumlah desa tertinggal dan rendahnya kemandirian daerah. Bab 3 ini akan menelusuri semua isu stratejik tersebut.

### 3.1. MENINGKATNYA KEMISKINAN

Posisi Kutim sebagai penyumbang terbesar kedua PDRB Kaltim ternyata belum mampu mengentaskan penduduknya dari jeratan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kutim pada tahun 2017 mencapai 31.950 jiwa, yang meningkat menjadi 33.020 jiwa pada tahun 2018 dan 35.310 jiwa pada tahun 2019 (lihat Tabel 9). Selain itu, persentase penduduk miskin di Kutim juga meningkat dari 9,29% pada tahun 2017, menjadi 9,22% pada tahun 2018, dan 9,48% pada tahun 2019.



Sumber: Suarakutim.com



**Tabel 9. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Kaltim, 2017-2019**

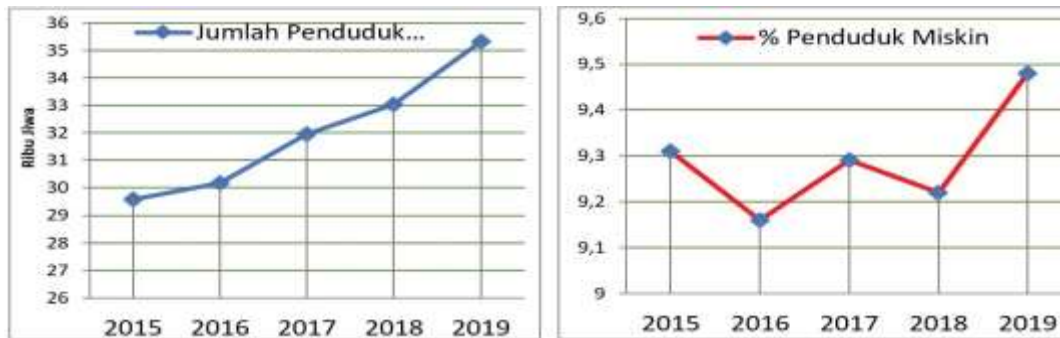
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			% Penduduk Miskin		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Paser	25,30	25,14	25,45	9,28	9,03	8,95
Kutai Barat	12,80	13,49	13,45	8,72	9,15	9,09
Kutai Kartanegara	56,57	56,56	56,34	7,57	7,41	7,2
Kutai Timur	31,95	33,02	35,31	9,29	9,22	9,48
Berau	11,86	11,33	11,62	5,41	5,04	5,04
Penajam Paser Utara	12,00	11,76	11,52	7,63	7,4	7,18
Mahakam Ulu	3,07	3,25	3,19	11,29	11,62	11,25
Balikpapan	17,86	17,01	15,78	2,82	2,64	2,42
Samarinda	40,01	39,23	39,80	4,77	4,59	4,59
Bontang	8,75	8,10	7,46	5,16	4,67	4,22
Kalimantan Timur	220,17	218,90	219,92	6,19	6,03	5,94

Sumber: BPS Kaltim (2020)

Searah dengan peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut, rata-rata persentase kemiskinan di Provinsi Kaltim pada tahun 2019 sebesar 5,94% yang mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 6,03%. Ironisnya, rata-rata persentase kemiskinan di Kabupaten Kutim justru mengalami peningkatan, pada tahun 2018 berada pada angka 9,22% meningkat sebesar 0,26% hingga mencapai 9,48% pada tahun 2019 (lihat Gambar 3).

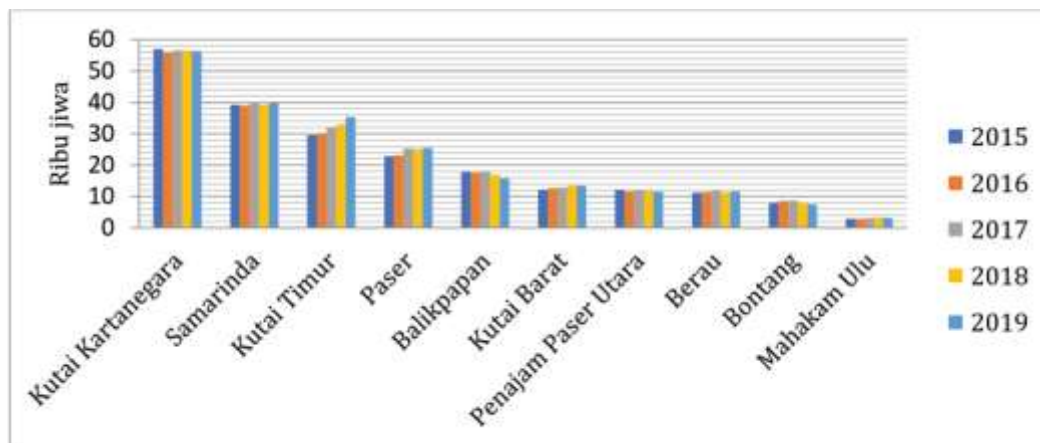
Selama periode 2015-2019, Kabupaten Kutim masih menempati posisi ke3 tertinggi di Provinsi Kaltim setelah Kabupaten Kukar dan Kota Samarinda dilihat dari jumlah penduduk miskin. Hingga pada akhir tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutim mencapai 35.310 jiwa, dengan tren yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir sejak tahun 2015 (lihat Gambar 4). Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin ini mengindikasikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah Kabupaten Kutim yang telah dijalankan oleh Bupati Ismunandar sejak 2016 belum berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin.

**Gambar 3. Tren Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) dan Persentase Kemiskinan Kutim Tahun 2015-2019**



Sumber: Diolah dari BPS Kaltim (2020)

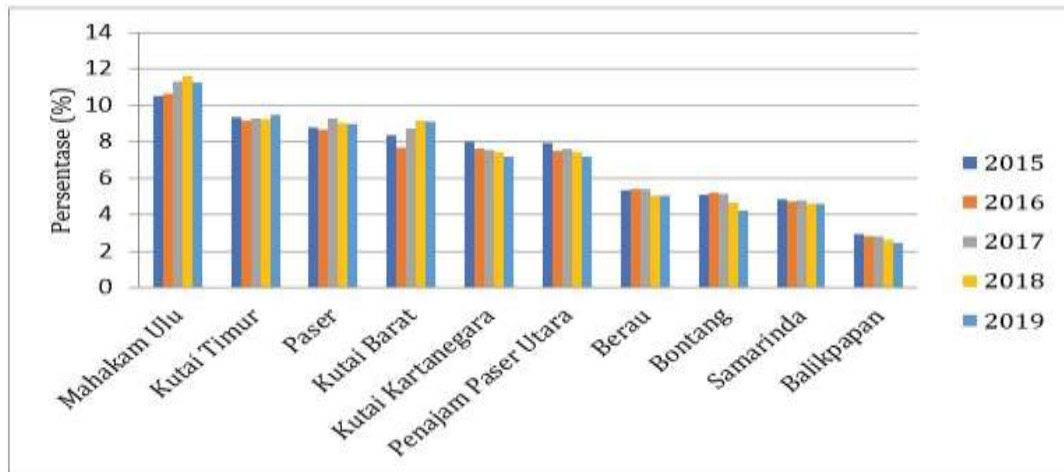
**Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2015-2019 (Ribuan Jiwa)**



Sumber: Diolah dari BPS Kaltim (2020)

Yang paling mengkhawatirkan, selama 2015-2019, Kabupaten Kutim tetap menempati posisi kedua tertinggi di Provinsi Kaltim, dilihat dari persentase penduduk miskin. Kemiskinan tertinggi di Provinsi Kaltim dipegang oleh Kabupaten Mahakam Ulu, yakni sebesar 11,06%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutim menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun (lihat Gambar 5). Rata-rata persentase kemiskinan Kabupaten Kutim pada periode ini adalah 9,29%, jauh lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kaltim yakni 6,1%. Empat daerah lain yang posisinya berada di bawah rata-rata provinsi adalah Kabupaten Berau (5,23%), Kota Bontang (4,85%), Kota Samarinda (4,69%), dan Kota Balikpapan (2,72%).

**Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim Tahun 2015-2019**



Sumber: Diolah dari BPS Kaltim (2020)

Tingginya tingkat kemiskinan Kutim bisa jadi terutama diakibatkan oleh para pendatang. Pendatang yang ingin berpenghidupan di Kutim inilah yang menyumbang angka kemiskinan. Bupati Kutim, Ismunandar, berkilah mereka datang dengan status tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal dan tidak memiliki penghasilan, otomatis masuk dalam keluarga miskin (Tribunkaltim, 2019).

Data statistik di atas mengindikasikan dua hal sekaligus. *Pertama*, Pemerintah Kabupaten Kutim dalam periode 2016-2019 belum memberikan perhatian yang serius pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini terbukti dari tingkat kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. *Kedua*, belum ada satu terobosan program pengentasan kemiskinan secara komprehensif yang mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Kutim. Tingkat kemiskinan yang tinggi, sangat erat kaitannya dengan tingkat pengangguran yang tinggi pula. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan langkah-langkah taktis dan inovatif untuk meningkatkan level kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutim, melalui serangkaian program-program pembangunan ekonomi, baik menggunakan pendekatan sektoral maupun spasial.

### **3.2. TIMPANGNYA SEBARAN PENDUDUK**

Kutim setidaknya memiliki dua masalah kependudukan, yaitu persebaran penduduk yang sangat timpang dan pertumbuhan penduduk antar wilayah yang bervariasi. Pola persebaran penduduk Kutim menurut kecamatan sangat timpang sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antarkecamatan yang mencolok. Pada tahun 2018, sebagian besar penduduk Kutim berada di ibukota Kutim, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, dengan penduduk 124.789 jiwa yang merupakan 30% dari seluruh penduduk Kutim (lihat Tabel 10).

Data di bawah ini mencerminkan adanya ketidakmerataan persebaran penduduk karena luas wilayah Kecamatan Rantau Pulung hanya 0,40% dari total luas wilayah Kutim yang dihuni sekitar 11.460 jiwa (2,72%) dari total penduduk Kutim. Akibatnya, kepadatan penduduk di Rantau Pulung mencapai 79,68 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu, Kecamatan Muara Wahau yang luasnya mencapai 16% dihuni oleh sekitar 29.187 jiwa (6,94%) dari total penduduk Kutim sehingga kepadatan penduduk di Muara Wahau hanya 5,10 jiwa/km<sup>2</sup>.

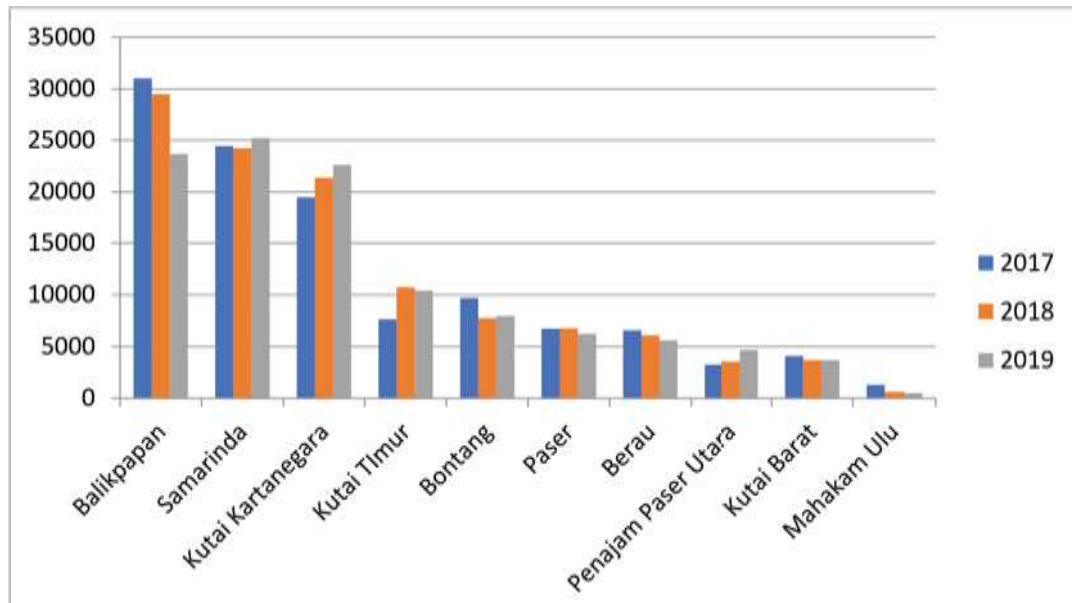
**Tabel 10. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kutim Menurut Kecamatan, 2018**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>
	Km <sup>2</sup>	%		
Muara Ancalong	2.739,30	7,66	14.278	5,21
Busang	3.721,61	10,41	6.180	1,66
Long Mesangat	526,98	1,47	7.252	13,76
Muara Wahau	5.724,32	16,01	29.187	5,10
Telen	3.129,61	8,76	10.966	3,50
Kongbeng	581,27	1,63	28.736	49,44
Muara Bengkal	1.522,80	4,26	14.346	9,42
Batu Ampar	204,50	0,57	7.832	38,30
Sangatta Utara	1.262,59	3,53	124.789	98,84
Bengalon	3.196,24	8,94	40.792	12,76
Teluk Pandan	831,00	2,32	15.710	18,90
Sangatta Selatan	1.660,85	4,65	31.479	18,95
Rantau Pulung	143,82	0,40	11.460	79,68
Kaliorang	438,91	1,23	14.431	32,88
Kaubun	257,45	0,72	15.268	59,30
Sangkulirang	3.322,80	9,30	23.074	6,94
Karangan	3.062,36	8,57	13.268	4,33
Sandaran	3.419,30	9,57	11.712	3,43
Total	35.745,71	100,00	420.760	11,77

Sumber: Diolah dari BPS Kaltim (2020)

Dari sisi jumlah penduduk yang tersebar di 18 kecamatan, konsentrasi penduduk terutama berada di Kecamatan Sangatta Utara yakni 29,66% dari total penduduk Kutim. Empat kecamatan lainnya yang menempati posisi kecamatan dengan penduduk tertinggi berturut-turut adalah Kecamatan Bengalon 9,69%, Kecamatan Sangatta Selatan 7,48%, Kecamatan Muara Wahau 6,94%, dan Kecamatan Kongbeng 6,83%. Sementara kecamatan lain, hanya menyumbang di bawah 5% dari total jumlah penduduk Kutim (lihat Gambar 6). Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Busang dengan luas wilayah 3.721,61 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 1,66 per km<sup>2</sup>.

**Gambar 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutim Menurut Kecamatan, 2019**

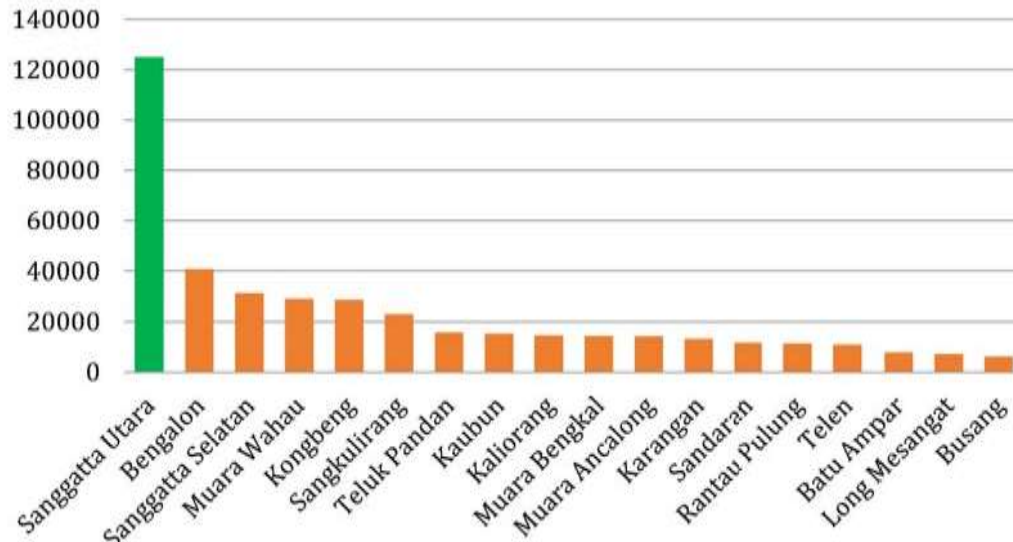


Sumber: Diolah dari BPS Kaltim (2020)

### 3.3. MENINGKATNYA PENGANGGURAN

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada suatu daerah, merupakan indikasi dari penyerapan tenaga kerja yang tinggi dalam berbagai sektor ekonomi pada daerah tersebut. Dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi positif, maka pada saat bersamaan juga angka kemiskinan dan pengangguran akan mengalami penurunan. Data statistik menunjukkan, ekonomi Kutim tumbuh 5,1% pada tahun 2017, meningkat menjadi 5,2% pada tahun 2018 dan 5,2% pada tahun 2019. Data menunjukkan selama periode tersebut, angka pengangguran di Kutim terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang ada, belum cukup berkualitas karena belum mampu menyerap tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran di Kutim (lihat Gambar 7).

**Gambar 7. Jumlah Pengangguran (Jiwa) Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017-2019**

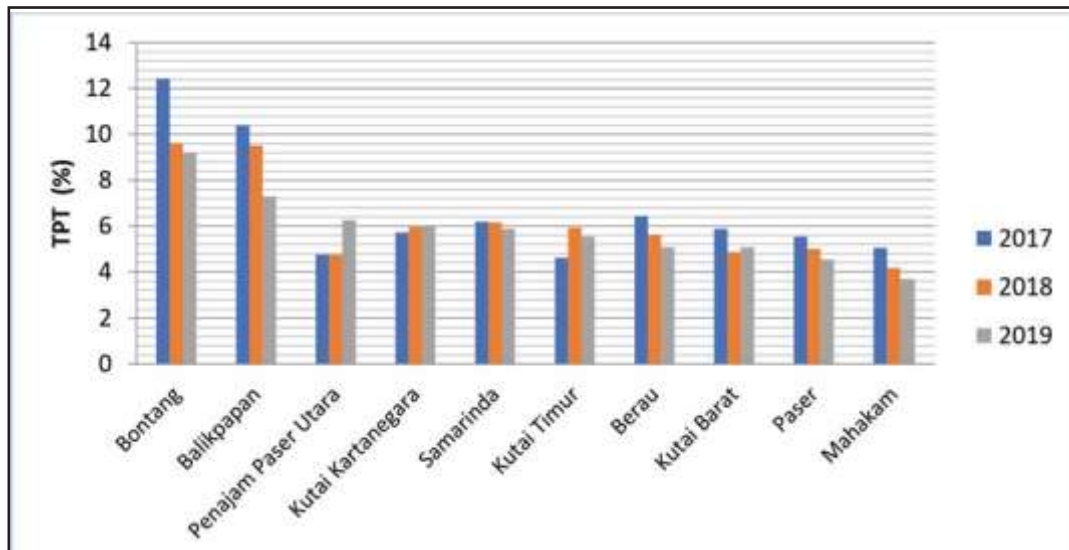


Sumber: Diolah dari BPS Kaltim (2020)

Berdasarkan data statistik yang ada, angka pengangguran di Kutim mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2017-2019. Sementara daerah lain seperti Paser, Kabupaten Kubar, Mahakam Ulu dan Bontang, mengalami penurunan. Meskipun jumlah angkatan kerja yang menganggur di Kabupaten Kutim, masih lebih rendah dari Kukar, Balikpapan dan Samarinda, tren peningkatan jumlah pengangguran yang telah mencapai angka 10.410 jiwa pada tahun 2019, ini merupakan gejala dan indikasi adanya kegagalan kinerja Pemda Kutim saat ini, dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Kutim. Dalam situasi seperti ini, diperlukan langkah-langkah strategik untuk menekan angka pengangguran, melalui perluasan kesempatan kerja yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kutim pada masa yang akan datang.

Dalam hal ketenagakerjaan, juga ada masalah mendasar yang dihadapi Kutim, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi. TPT di Kutim terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir hingga mencapai 5,53% pada tahun 2019 yang disebabkan oleh rendahnya kesempatan kerja (lihat Gambar 8).

**Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2017-2019 (%)**



Sumber: Diolah dari BPS Kaltim (2020)

Peningkatan jumlah pengangguran di Kutim sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 7 berjalan searah dengan peningkatan TPT pada periode yang sama. Selama periode 2017-2019, TPT di Kutim cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, angkanya sudah mencapai 5,53% kendatipun angka ini sebenarnya menurun dari tahun 2018 yakni sebesar 5,93%. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata persentase TPT Kutim adalah sebesar 5,25%.

### 3.4. MENINGKATNYA KETIMPANGAN PENDAPATAN

Ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah adalah Indeks gini. indeks gini memiliki angka pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin besar angka atau semakin mendekati angka 1 menunjukkan semakin tinggi tingkat ketimpangan pada suatu daerah. Sebaliknya jika angka semakin kecil atau mendekati angka 0, maka tingkat ketimpangan semakin rendah. Menurut Todaro & Smith (2015:222), sebaran indeks gini yang angka lebih besar dari 0,50 menandakan distribusi pendapatan sangat timpang. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,40–0,50 menunjukkan ketimpangan sedang. Sementara apabila lebih kecil dari 0.40 dinyatakan tingkat ketimpangan pendapatan rendah.



Di Kabupaten Kutim, jika dilihat dari indikator indeks gini, tingkat ketimpangan mengalami tendensi yang meningkat selama periode tahun 2006 hingga 2014. Capaian terbaik indeks gini terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 0,16. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,31 yang artinya ketimpangan di Kutim masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Namun, berdasarkan tren data, diproyeksikan pada tahun-tahun berikutnya tingkat ketimpangan di Kutim mengalami peningkatan. Hal ini berbeda pada level provinsi yang menunjukkan tren penurunan ketimpangan pendapatan.

**Gambar 9. Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kutim, Kaltim dan Indonesia, 2006-2020**



Sumber: Diolah dari BPS Kutim (2017), BPS Kaltim (2020)

Perkembangan rasio gini di Kutim dari tahun ke tahun mengalami cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan dibandingkan dengan rasio gini Kaltim dan nasional, rasio gini Kutim masih di bawahnya. Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan antar pendapatan di Kutim masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kaltim dan Nasional, meskipun menunjukkan tren yang meningkat seperti terlihat dalam Gambar 9.

Secara keseluruhan capaian ketimpangan Kutim pada kurun waktu 2006-2014 dapat dikatakan cukup baik karena berada di bawah ketimpangan Kaltim dan Nasional. Namun, ketimpangan Kutim mengalami fluktuasi yang tinggi dan memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Tingginya tingkat fluktuasi ini

mengindikasikan pemerintah daerah belum mampu mengendalikan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Apabila pemerintah daerah kurang fokus menangani persoalan ketimpangan ini, ada indikasi pada tahun-tahun mendatang nilai indeks gini Kutim akan melampaui tingkat provinsi, dan ini akan menjadi catatan buruk bagi pemerintah daerah Kutim.

### **3.5. RENDAHNYA KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun belum mencukupi persyaratan untuk dapat meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk di berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut, Perkins, *et al.* (2006) memaparkan bahwa terdapat paling sedikit tiga alasan utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dinikmati oleh semua penduduk secara merata. Kedua, hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak ditransfer untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, akan tetapi penduduk yang telah sejahtera menjadi semakin sejahtera dan penduduk yang sebelumnya kurang sejahtera hanya mengalami sedikit peningkatan kesejahteraan. Dengan kata lain, penduduk kaya semakin kaya dan penduduk miskin semakin miskin).

Dengan demikian, tujuan utama dari pembangunan haruslah diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990). Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan di mana manusia ditempatkan sebagai subjek kegiatan ekonomi. Pembangunan manusia menjadi tujuan akhir segala macam pembangunan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang diukur melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan. IPM pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990 melalui publikasi *Human Development Report 1990*.

Tabel 11 menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kutim, Kaltim dan nasional dalam kurun waktu 2010-2019. Dalam tabel tersebut terlihat IPM Kutim mempunyai pola peningkatan yang searah dengan IPM Kaltim dan nasional. Namun, nilai IPM Kutim lebih rendah dari nilai provinsinya, dan berada di peringkat keenam di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kaltim. Ini merupakan fakta ironis mengingat Kutim merupakan kabupaten dengan PDRB ADHK kedua terbesar di Kaltim sesudah Kukar. Fakta ini mengonfirmasi bahwa tinggi pendapatan rakyat Kutim belum diikuti dengan tingginya kualitas pembangunan manusia.

**Tabel 11. Perkembangan IPM Kutim, 2010-2019**

Peringkat/Nilai IPM	Indeks Pembangunan Manusia									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Peringkat Kutim di Kaltim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kutai Timur	66.94	67.73	68.71	69.79	70.39	70.76	71.10	71.91	72.56	73.49
Kalimanan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12	75.83	76.61
Indonesia	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39	71.92

Sumber: Diolah dari BPS (2020)

Dalam penghitungan IPM, digunakan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut diturunkan menjadi empat indikator yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan (Kuncoro, 2013).

Pertumbuhan IPM Kutim dipengaruhi oleh keempat komponen penyusunannya, terutama Umur Harapan Hidup (UHH) yang mencapai rangking tertinggi, yaitu peringkat keempat di Kaltim, dibandingkan dengan ketiga komponen IPM lainnya. UHH merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Berdasarkan Tabel 12, nilai UHH Kutim melebihi rata-rata nasional sepanjang periode 2010-2019. Akan tetapi, nilai UHH tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata Kaltim. Selain itu, pertumbuhan rata-rata UHH per tahun di Kutim (0.14%) masih lebih rendah dibandingkan dengan Kaltim (0.20%) dan Nasional (0.24%).

**Tabel 12. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kutim 2010-2019**

Peringkat/Nilai UHH	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Peringkat Kutim di Kaltim	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kutai Timur	72.08	72.16	72.23	72.30	72.37	72.39	72.45	72.51	72.76	73.03
Kaltim	72.89	73.10	73.32	73.52	73.62	73.65	73.68	73.70	73.96	74.22
Indonesia	69.81	70.01	70.20	70.40	70.59	70.78	70.90	71.06	71.20	71.34

Sumber: Diolah dari BPS (2020)

Komponen kedua adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan Tabel 13, nilai HLS di Kutim lebih rendah daripada angka rata-rata pada level provinsinya dan nasional selama periode 2010-2019. Hal ini mengindikasikan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di Kutim masih rendah. Di dalam Provinsi Kaltim, peringkat Kutim Dalam HLS pada tahun 2018 berada pada posisi kedelapan, atau posisi ketiga terbawah dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

**Tabel 13. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kutim 2010-2019**

Peringkat/Nilai HLS	Harapan Lama Sekolah (Tahun)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Peringkat Kutim di Kaltim	8	7	6	7	7	7	9	9	8	8
Kutai Timur	11.01	11.30	11.59	12.12	12.42	12.43	12.44	12.48	12.65	12.78
Kalimantan Timur	11.87	12.06	12.46	12.85	13.17	13.18	13.35	13.49	13.67	13.69
Indonesia	11.29	11.44	11.68	12.10	12.39	12.55	12.72	12.85	12.91	12.95

Sumber: Diolah dari BPS (2020)

Komponen ketiga adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Pada Tabel 14 terlihat RLS menunjukkan *trend* peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kutim semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, akan tetapi kurang didukung dengan pembangunan sistem pendidikan oleh pemerintah daerah. Angka RLS Kutim lebih tinggi daripada tingkat nasional, akan tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pada level provinsi. Untuk komponen RLS, Kutim berada pada posisi kelima dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kaltim.

**Tabel 14. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kutim 2010-2019**

Peringkat/Nilai RLS	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Peringkat Kutim di Kaltim	4	6	4	4	4	4	5	4	4	5
Kutai Timur	7.92	8.12	8.39	8.56	8.60	8.69	8.72	9.06	9.08	9.18
Kaltim	8.56	8.79	8.83	8.87	9.04	9.15	9.24	9.36	9.48	9.70
Indonesia	7.46	7.52	7.59	7.61	7.73	7.84	7.95	8.10	8.17	8.34

Sumber: Diolah dari BPS (2020)

Pemerintah daerah Kutim perlu memberi perhatian khusus dalam peningkatan kualitas modal manusia terutama dari sisi pendidikan yang diproksi menggunakan HLS dan RLS. Untuk itu, sarana dan prasarana pendidikan perlu diperbanyak agar kesempatan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya semakin terbuka lebar. Selain itu, masyarakat tidak mampu juga perlu disubsidi untuk mendapatkan akses ke pendidikan. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menjalankan program wajib belajar 12 tahun mengingat RLS masyarakat Kutim hanya mencapai 8,18 tahun pada tahun 2019.

Komponen terakhir adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*) yang mencerminkan standar hidup layak. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Tabel 15 memperlihatkan bahwa pengeluaran per kapita Kutim mengalami peningkatan sepanjang periode 2010-2019. Namun demikian, daya beli penduduk Kutim masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penduduk pada level provinsinya dan nasional. Kutim menduduki peringkat keenam dalam hal daya beli di antara 10 kabupaten/kota di Kaltim. Daya beli masih sangat mungkin ditingkatkan mengingat PDRB ADHK Kutim selama sepanjang periode 2010-2019 merupakan yang tertinggi setelah Kukar.

**Tabel 15. Perkembangan Pengeluaran per Kapita  
Disesuaikan Kutim 2010-2019**

Peringkat/ Nilai Penge- luaran/ kapita	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Peringkat Kutim di Kaltim	8	8	9	8	8	8	8	8	7	6
Kutai Timur	8,652	8,801	9,049	9,297	9,484	9,704	9,960	10,273	10,614	11,196
Kaltim	10,790	10,927	10,944	10,981	11,019	11,229	11,355	11,612	11,917	12,359
Indonesia	9,437	9,647	9,815	9,858	9,903	10,150	10,420	10,664	11,059	11,299

Sumber: Diolah dari BPS (2020)

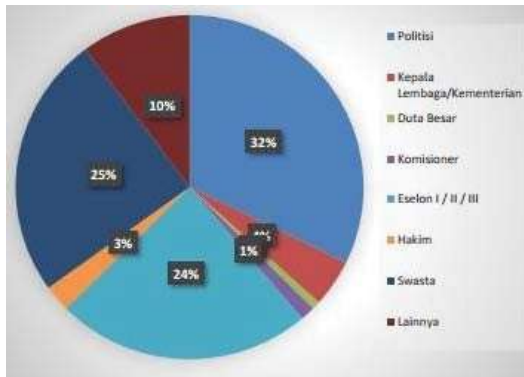
### 3.6. MARAKNYA KORUPSI DAN NEPOTISME

Gejala praktik korupsi dan nepotisme di Kutim juga penting untuk memperoleh perhatian serius. Bidang pelayanan publik yang lazim terjadi praktik korupsi adalah perizinan dalam investasi dan pembukaan usaha. Kenyataan ini merupakan suatu kemunduran setelah fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, telah dibangun oleh Awang Faroek Ishak (AFI) ketika menjabat Bupati Kutim selama dua periode pemerintahan (2008-2013 dan 2013-2018). Prestasi kinerja AFI dibuktikan dengan adanya penganugerahan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori bupati tercepat dalam izin investasi yang hanya membutuhkan 36 menit pada periode pertama saat menjabat sebagai Bupati Kutim tahun 2003. Kinerja aparatur birokrasi Pemda Kutim seharusnya sudah lebih baik pada saat ini, bukan malah sebaliknya.

Politisi, swasta, dan pejabat pemerintah merupakan tiga kelompok utama, yang rentan melakukan tindak pidana korupsi. Survei yang dilakukan Cegah Korupsi FEB UGM menemukan bahwa pelaku utama korupsi di Indonesia adalah: (1) Politisi (32%); (2) Swasta (25%); (3) Pejabat Pemerintah (24%) (lihat Gambar 10).

Pada tahun 2016, Bappeda Kaltim bekerjasama dengan Universitas Mulawarman dalam menyusun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kalimantan Timur. IPK Kaltim sebesar 56,67 pada rentang skala 0 sangat bersih dan 100 sangat korup. Jumlah sampel kabupaten/kota sebesar 800 yang terbagi dalam tiga kelompok dunia usaha. Usaha besar sebanyak 80, menengah sebanyak 240 dan kecil sebanyak 480. Metode pengumpulan data menggunakan data primer, wawancara dan kuesioner terstruktur. Artinya publik dunia usaha khususnya, masih menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kaltim masih sarat dengan perilaku korupsi.

## Gambar 10. Pelaku Utama Korupsi di Indonesia



Sumber: Cegah Korupsi FEB UGM (2016)

Kutim. Puncak dari semakin mengguritanya praktik korupsi di Kabupaten Kutim adalah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutim



Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Ismunandar ditetapkan sebagai tersangka setelah terjerat operasi tangkap tangan (Kompas, 2020). Berkaitan dengan kasus tersebut KPK memeriksa 11 orang saksi di Markas Polresta Samarinda. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, belasan saksi tersebut beberapa di antaranya ASN yang menjabat sebagai kepala bidang, kepala seksi, staf kantor hingga sopir pribadi para pejabat yang berada di lingkungan Pemkab Kutim yang diamankan KPK beberapa waktu lalu. Bupati Kutim, Ismunandar dan istrinya Encek UR Firsasih, yang juga sebagai ketua DPRD Kutim, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta pada Jumat 3 Juli 2020. Praktik di Kutim merupakan contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara. Sangat terang benderang betapa jalinan erat antara korupsi dan nepotisme di kabupaten ini (Media Indonesia, 2020):

Proyek disusun pemda kabupaten disetujui ketua DPRD yang dalam hal ini termasuk istri Bupati Kutai Timur kemudian dicarikan rekanan yakni tim sukses untuk pilkada bupati. Dan dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, bupati Kutai Timur menjamin tidak ada relokasi anggaran di diknas dan PUPR karena covid-19. Namun fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur.

Selain pasangan suami istri ini, mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutim, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutim, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutim juga diamankan KPK. Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutim dinilai merupakan bukti praktik nepotisme. Kelimanya oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus penerima suap sejumlah proyek infrastruktur di Kutim. Sementara, dua tersangka lainnya sebagai rekanan yakni Aditya Maharani dan Dedy Aryanto ditetapkan sebagai pemberi suap. Kini ketujuh tersangka ini masih dalam tahanan KPK di Jakarta.

### 3.7. MINIMNYA PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI MILENIAL

*Swing voters* adalah istilah untuk para pemilih rasional yang dapat berubah pilihan sesuai dengan ide atau gagasan tertentu. Dinamika demokrasi Indonesia di era digital ibarat dua sisi mata uang bagi *swing voters*, bisa berdampak positif maupun negatif. Mayoritas dari *swing voters* ialah generasi milenial yang banyak mengakses internet, untuk itu generasi milenial harus pintar dan bijak dalam menanggapi suatu informasi yang beredar di internet. Era digital dapat mempermudah pencarian informasi untuk referensi para *swing voters*.



Tim peneliti dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI (2018) melakukan penelitian pada milenial di berbagai kota untuk menganalisis karakter generasi milenial terhadap Pemilihan Umum tahun 2019. Hasil penelitian menghasilkan beberapa catatan penting tentang karakteristik dari pemilih milenial, sebagai berikut:

#### 1. Masih Ragu (*Doubtfulness*).

Terdapat kelompok generasi milenial yang masih belum menentukan pilihan. Mereka juga dapat disebut sebagai *swing voters* yakni orang-orang dengan karakter yang dapat menjadi pemilih potensial bagi para kandidat pemimpin politik.



## 2. Telah menentukan pilihan

Karakter selanjutnya adalah *open minded*. Mereka yang masuk dalam karakter ini telah memiliki partisipasi dan pengetahuan yang tinggi terkait politik.

## 3. Ikut orang terdekat (*Modest*)

Yaitu mereka yang memilih berdasarkan pilihan dari orang terdekat. Namun dalam hal ini, yang berpengaruh adalah lingkungan rumah. Mereka cenderung mengikuti pilihan dari anggota keluarga, seperti ayah atau ibunya.

## 4. Kurang peduli politik (*Apathetic*)

Orang-orang dengan karakter ini cenderung belum memiliki pilihan. Selain itu, mereka juga cenderung kurang peduli terhadap perpolitikan. Partisipasi dan pengetahuan terkait politik pun rendah.

Keempat karakter ini harus menjadi perhatian untuk menentukan strategi komunikasi politik bagi para pemilih milenial, sebelum menggaet mereka untuk memilih. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan menyebutkan pada pasal 1 ayat 1 bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dalam perkembangannya meskipun belum ditetapkan adanya perubahan, ada wacana untuk menetapkan kategori pemuda sampai pada usia 35 tahun.

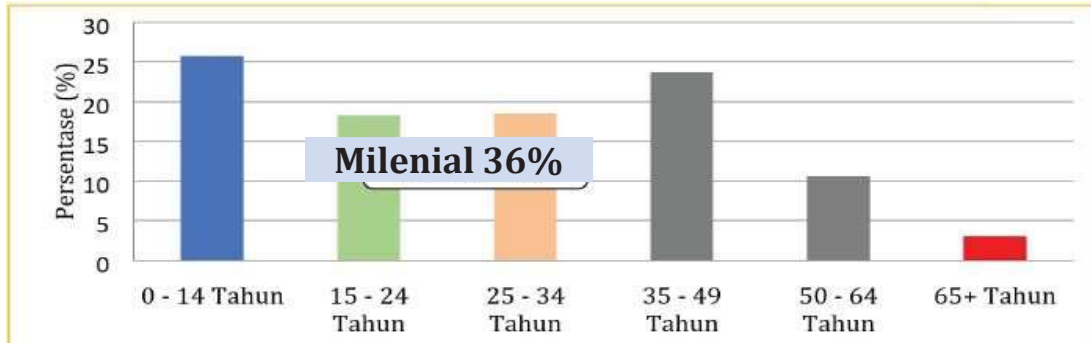
Secara statistik, karakteristik demografi penduduk Kutim berdasarkan kelompok umur tahun 2019 (lihat Tabel 16), dapat terlihat bahwa kelompok pemuda atau pemilih milenial ini berada pada kisaran 36% dari total penduduk Kutim (lihat Gambar 11). Dengan kata lain, keberadaan pemilih milenial mengambil pangsa sekitar 49,55% dari total wajib pilih. Sebuah angka potensial yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam menyusun dan menawarkan program berbasis kepemudaan.

**Tabel 16. Penduduk Kutim Menurut Kelompok Umur, 2019**

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	%
0 - 14	109.036	25,78
15 - 24	77.268	18,27
25 - 34	78279	18,50
35- 49	100.501	23,76
50 - 64	45.052	10,65
64+	12.769	3,01
<b>Jumlah</b>	<b>422.905</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari BPS Kutim (2020)

**Gambar 11 . Presentase Penduduk Kutim Menurut Kelompok Umur, 2019**



Sumber: Diolah dari BPS Kutim (2020)

Pemilih milenial di Indonesia mampu memberikan kontribusi besar dalam politik Indonesia, demikian juga di Kutim. Hal inilah yang menuntut banyak partai politik mencari tahu mengenai kriteria yang akan menjadi tolak ukur pemilih milenial dalam memutuskan siapa yang akan dipilih terutama pada saat proses pemilihan umum. Maka dari itu keputusan generasi milenial dalam menentukan pilihannya pada saat proses pemilihan umum berlangsung berpengaruh penting pada pilkada mendatang, dan dalam pengambilan keputusan tersebut terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan generasi milenial dalam memilih, antara lain *voting behavior*, *political branding* dan *political disaffection* (Azis, 2018).

Media sosial sebagai sarana generasi milenial untuk bersosialisasi yang mengandung berbagai macam informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2018) menyimpulkan bahwa generasi milenial kurang tertarik dan tidak mengetahui banyak hal mengenai dunia politik. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan niat mereka dalam menggunakan hak suaranya pada saat proses pemilu berlangsung, dikarenakan kepedulian yang tinggi akan kemajuan negara yang lebih baik dan berharap masyarakat mendapatkan kesejahteraan.

Penelitian dengan topik serupa juga dilakukan oleh Prasetyani (2017) tentang “Generasi *Millennial* Dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Generasi *Millennial* bukan hanya sekedar optimis, mereka juga memiliki semangat baru yang dapat menggerakkan peran masyarakat terutama generasi muda untuk lebih optimis terhadap masa depan politik daerah

yang merupakan implikasi dari kreativitas, semangat nasionalisme gaya baru, dan gambaran lemahnya kredibilitas aktor politik nusantara.

Tak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi yang diprediksi semakin kokoh dimotori oleh orang muda, mulai dari soal menggunakan internet hingga bisnis yang mulai dimasuki bahkan dipimpin oleh orang muda. Mayoritas pengguna internet adalah generasi milenial yang lahir ketika teknologi internet sudah mulai dikenal. Sebuah survei yang dilakukan IDN Research Institute bekerjasama dengan Alvara Research Center di 12 kota besar di Indonesia berjudul Indonesia Millennial Report 2019 menunjukkan bahwa generasi milenial Indonesia telah terkoneksi dengan internet sebanyak 94,4%.

Generasi milenial memiliki keunikan dibandingkan generasi sebelumnya, misalnya soal kepiawaian dalam teknologi. Jika Generasi X (lahir 1961-1980) adalah generasi yang sangat menikmati televisi dan gempita media, maka generasi milenial ini lebih tertarik dengan *digital marketing* dan juga tayangan termasuk iklan yang berbasis video atau internet. Tendensi generasi milenial adalah ingin bekerja cepat dan ingin cepat mendapatkan umpan balik (*feedback*), pekerjaan juga ingin yang *challenging* karena tingkat kebosanan lebih cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Itu tantangan karena sifat pekerjaan tidak selalu begitu.

Dalam kerangka seperti itu, aspirasi generasi milenial dapat ditampung dalam beberapa konsep program seperti industri kreatif, *linkage* antara UMKM dan Fintech, *digital marketing*, jejaring dan kolaborasi kepemudaan, pengembangan *Startup* berbasis kearifan lokal, kuliner, hingga pada kurikulum pelatihan dan pengembangan berbasis minat dan bakat para pemuda Kutim.

### **3.8. BURUKNYA INFRASTRUKTUR JALAN**

Daya saing ekonomi sebuah daerah, sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan sosial ekonomi pada daerah tersebut. Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan utama untuk mendukung kelancaran proses distribusi barang dan mobilitas manusia dalam berbagai kegiatan ekonomi. Berdasarkan data yang tersedia hingga pada tahun 2016, panjang jalan yang tersedia di setiap kabupaten/kota di Kaltim, sangat bervariasi (lihat Tabel 17).

Hingga tahun 2016, masih terdapat 562,49 km panjang jalan di seluruh Kaltim

yang masuk kategori rusak berat. Untuk Kutim, masih terdapat 44 km panjang jalan yang masuk kategori rusak berat atau sekitar 7,8% dari total jalan rusak berat di Kaltim. Namun panjang jalan di Kutim untuk kategori sedang adalah sepanjang 217,7 km pada tahun 2016. Dalam konteks ini, kondisi jalan kategori sedang di Kutim adalah 66,17% dari total panjang jalan di Kaltim yakni 329,52 km.

**Tabel 17. Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/Kota (Km), Tahun 2016**

Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Total
Paser	20,40	11,60	3,50	119,70	155,2
Kutai Barat	115,74	-	82,29	100,15	298,18
Kutai Kartanegara	68,92	98,42	42,30	160,17	369,81
<b>Kutai Timur</b>	<b>23,30</b>	<b>217,70</b>	<b>-</b>	<b>44,00</b>	<b>285,00</b>
Berau	96,20	-	78,10	54,30	228,60
Penajam Paser Utara	45,99	-	4,40	66,72	117,11
Balikpapan	15,55	-	5,20	7,00	27,75
Samarinda	66,88	1,80	35,60	10,45	114,73
Bontang	-	-	-	-	-
Mahakam Hulu	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>452,98</b>	<b>329,52</b>	<b>251,39</b>	<b>562,49</b>	<b>1.596,38</b>

Sumber: BPS Kaltim (2020)

Demikian juga dengan kondisi jalan yang masuk kategori baik di Kutim (tahun 2016) yang hanya 23,3 km dari panjang total jalan dengan kategori baik di Kaltim yakni 452,98 km. Artinya, hanya ada 5,15% kondisi jalan di Kutim dengan kategori baik dari total panjang jalan kategori baik di seluruh Kaltim.

Berdasarkan empat kategori kondisi jalan yang ada, total panjang jalan di seluruh Kutim adalah 285 km atau 17,85% dari seluruh jalan di Kaltim (1.596,38 km). Persentase panjang jalan di Kutim, menempati peringkat ketiga setelah Kukar (23,16%) dan Kubar (18,67%). Kondisi ini tentu belum ideal, mengingat jika kita lihat berdasarkan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di Kaltim, Kutim merupakan wilayah dengan peringkat pertama terluas yakni 27,69% dari total wilayah Kaltim (lihat Tabel 18).

**Tabel 18. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Kaltim, 2016**

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah	% Terhadap Kaltim
		(Km <sup>2</sup> )	
Paser	Tanah Grogot	7.730,88	5,98
Kutai Barat	Sendawar	20.381,59	15,79
Kutai Kartanegara	Tenggarong	23.601,91	18,28
<b>Kutai Timur</b>	<b>Sangatta</b>	<b>35.747,50</b>	<b>27,69</b>
Berau	Tanjung Redeb	21.240,00	16,45
Penajam Paser Utara	Penajam Paser Utara	3.333,06	2,58
Mahakam Ulu	Long Bagun	15.315,00	11,86
Balikpapan	Balikpapan	527,00	0,40
Samarinda	Samarinda	783,00	0,60
Bontang	Bontang	406,70	0,32
Kalimantan Timur		129.066,64	100

Sumber: BPS Kaltim (2020)

### 3.9. MEMBURUKNYA EKONOMI SELAMA PANDEMI COVID-19

Pertumbuhan ekonomi Kutim dan Kaltim pada triwulan II 2020 mengalami tekanan akibat dampak Covid-19. Penurunan kinerja perekonomian dipengaruhi oleh pelemahan dari sisi domestik maupun kinerja eksternal. Pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial

memengaruhi permintaan domestik sehingga pola konsumsi periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) tumbuh lebih rendah secara historis. Kaltim hingga triwulan kedua 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5,46%, yang paling terpuruk dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.



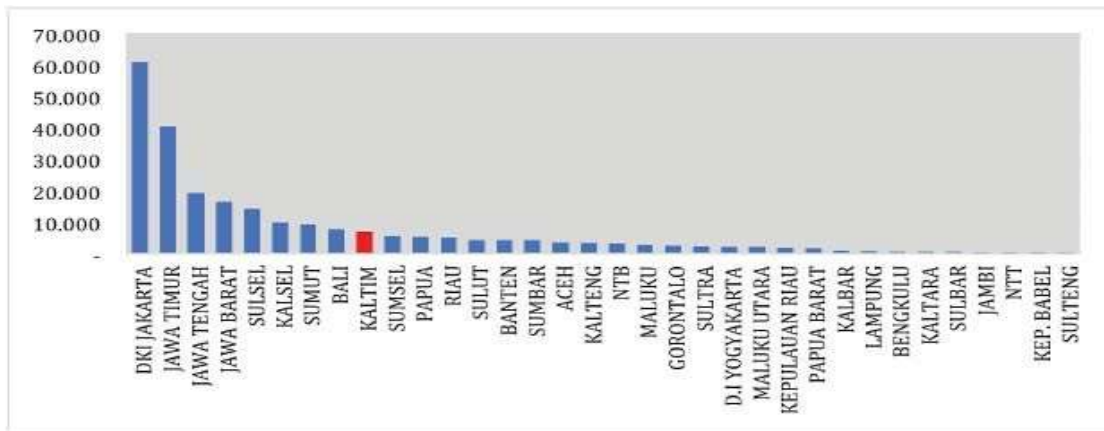
Pakar ekonomi Unmul Adji Sofyan Effendy memprediksi, pertumbuhan ekonomi Kutim akan anjlok antara 2-3%. Demikian juga dengan angka kemiskinan Kutim dipresiksi mengalami peningkatan hingga di kisaran 1011%, naik 0,52% hingga 1,52% dibanding tahun 2019 yakni 9,48%

atau sebanyak 35.310 jiwa. Saat ini tingkat pengangguran terbuka Kutim sebanyak 10.410 orang atau 5,53%, akibat pandemi covid-19 diprediksi akan naik menjadi 6-7% (AntaraneWS, 2020).

### 3.9.1. Pandemi Covid-19

Penyebaran Coronavirus Disease-19 (covid-19) telah hampir di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Worldometers per tanggal 24 September 2020, Indonesia tercatat ada total 262.022 kasus dan total kematian mencapai 10.105 jiwa. Gambar 12 menunjukkan bahwa Kaltim menempati peringkat ke-9 provinsi tertinggi di Indonesia berdasarkan kasus positif Covid-19<sup>1</sup>. Hingga tanggal 20 September 2020, jumlah kasus di Kaltim telah mencapai 6.716 kasus.

**Gambar 12. Jumlah Kasus Positif Covid-19 Menurut Provinsi, Indonesia 20 September 2020**



Sumber: Diolah dari KPCPEN (2020)

Peringkat ke-1 hingga ke-18 pada waktu yang sama, berturut-turut (lihat Gambar 12) ditempati oleh DKI Jakarta (60.828 kasus), Jawa Timur (40.372 kasus), Jawa Tengah (19.213 kasus), Jawa Barat (16.395 kasus), Sulawesi Selatan (14.193

<sup>1</sup>Perkembangan data kasus Covid-19 di Indonesia mengalami perubahan setiap hari, sehingga perlu terus dipantau melalui situs web Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) (<https://covid19.go.id/peta-sebaran>)

kasus), Kalimantan Selatan (9.650 kasus), Sumatera Utara (9.273 kasus), dan Bali (7.628 kasus). Tiga provinsi dengan jumlah kasus positif covid-19 terendah adalah NTT (315 kasus), Kepulauan Bangka Belitung (310 kasus) dan Sulteng (297 kasus).

Sementara itu, posisi Kutim di Kaltim menempati peringkat ke-5 yang termasuk kategori zona kuning dengan jumlah kasus sebanyak 265 kasus (lihat Gambar 13). Empat daerah dengan status zona merah yang menempati urutan peringkat ke-1 dan ke-4 berturut-turut adalah Balikpapan (2.701 kasus), Samarinda (1.879 kasus), Kukar (958 kasus) dan Bontang (416 kasus).

**Gambar 13. Peta Sebaran Kasus Postif Covid-19 Berdasarkan Kab/Kota Di Kaltim, 22 September 2020**



Sumber: Diolah dari Pemprov Kaltim (2020)

Data pada tanggal 22 September 2020 yang dipublikasikan oleh Satgas Penanganan covid-19, Provinsi Kaltim saat ini telah tercatat terdapat 6.954 kasus yang terkonfirmasi positif. Kebijakan relaksasi yang diambil Pemerintah Kaltim, termasuk pemerintah kabupaten/kota, justru memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap ledakan kasus Covid19. Merujuk data kasus pasien terkonfirmasi positif di atas, hanya dalam waktu dua hari antara 20 Juli hingga 22 Juli 2020, terdapat penambahan sebanyak 238 pasien positif covid-19 di seluruh Kaltim. Jumlah itu menjadi yang tertinggi di Kaltim sejak temuan covid-19 sekitar Maret-April 2020 lalu.

Tambahan 238 kasus pasien positif tersebut, tersebar di 6 kabupaten/kota. Kabupaten Berau sebanyak 4 kasus positif, Kabupaten Kutim 10 kasus positif, Kabupaten Paser sebanyak 3 kasus, Kota Samarinda sebanyak 93 kasus, ledakan

besar di Kabupaten Kukar dengan 25 kasus positif, dan di Kota Balikpapan dengan tambahan 47 kasus positif. Tambahan 238 kasus positif ini menjadi yang terbanyak atau yang tertinggi di Kaltim dalam 4 bulan terakhir. Dengan angka kasus kesembuhan mencapai 590 orang. Sementara yang masih menjalani perawatan dan isolasi, baik di rumah sakit rujukan covid-19 maupun isolasi mandiri di rumah masih ada sebanyak 355 kasus. Angka itu naik 2 kali lipat dari data kasus pasien yang sempat mengalami penurunan hingga di angka 130 kasus pada Juni lalu. Pasien positif di seluruh Kaltim yang telah meninggal dunia jumlahnya sebanyak 19 kasus.

**Tabel 19. Perkembangan Kasus Covid19 Kabupaten Kutim, 21 September 2020**

Status Pasien	Jumlah	Persentase
Positif	265	24,44
Sembuh	234	21,54
Meninggal	4	0,36
Suspek	583	53,68
<b>Total</b>	<b>1.086</b>	<b>100</b>

Sumber: Kutim Tanggap Covid-19 (2020)

Peningkatan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 di Kutim terus melaju pesat. Selama bulan September, peningkatannya mencapai 10 pasien positif. Data yang dipublikasikan oleh pemda Kutim, per tanggal 17 September 2020<sup>2</sup>, jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 265 kasus, sembuh 234 orang dan 4 orang meninggal dunia. Selain itu, terdapat 583 kasus yang diduga terpapar covid19 (lihat Tabel 19). Dari perkembangan yang ada, Kutim termasuk salah satu zona merah di Provinsi Kaltim.

Dampak buruk dari pandemi covid-19 juga dirasakan oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Demikian juga dengan daerah-daerah di Indonesia selama periode Januari hingga Mei 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh BPS untuk semester I 2020, menjadi penting untuk diperhatikan dengan seksama.

<sup>2</sup>Peta sebaran kasus Covid-19 di Kaltim mengalami perubahan setiap hari, sehingga perlu terus dipantau melalui <https://covid19.kaltimprov.go.id/>.



### 3.9.2. Pertumbuhan Ekonomi Negatif

Secara umum, perekonomian Kaltim pada triwulan I 2020 tetap mampu tumbuh positif di tengah melambatnya permintaan global, penurunan harga komoditas di pasar internasional, serta mulai merebaknya covid-19 di akhir triwulan I 2020. Pada triwulan I 2020, perekonomian Kaltim tetap tumbuh positif sebesar 1,27% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2019 sebesar 2,67% (yoy).

Lapangan usaha pertambangan dan ekspor luar negeri (LN) masih menjadi penopang utama kinerja perekonomian Kaltim pada triwulan I 2020. Pertumbuhan positif perekonomian Kaltim pada triwulan IV 2019 didukung oleh perbaikan kinerja industri pengolahan di tengah perlambatan pada lapangan usaha lainnya. Perbaikan kinerja lapangan usaha industri pengolahan sejalan dengan kenaikan produktivitas pada industri pengolahan migas maupun non migas. Sampai dengan tahun 2019, Kutim masih merupakan wilayah yang menempati posisi kedua dari sisi andil terhadap perekonomian Kaltim yakni sebesar 20,45%, setelah Kukar yakni sebesar 24,89%.

Memasuki triwulan kedua 2020, kinerja ekonomi Kaltim mengalami kontraksi yang sejalan dengan pelemahan ekonomi global. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kaltim disebabkan adanya tekanan dari hampir seluruh komponennya, yang utamanya disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Perekonomian Kaltim pada triwulan II 2020 tercatat terkontraksi sebesar minus 5,46% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 1,27% (yoy). Lapangan usaha pertambangan dan ekspor LN menjadi faktor utama yang menekan kinerja perekonomian Kaltim pada triwulan II 2020. Kontraksi perekonomian Kaltim pada triwulan II 2020 yang lebih dalam tertahan oleh masih positifnya kinerja konstruksi di tengah perlambatan pada lapangan usaha lainnya. Perbaikan kinerja lapangan konstruksi sejalan dengan tetap berlanjutnya beberapa proyek strategis Kaltim di tengah pandemi covid19.

Perekonomian Kaltim tanpa tambang pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi, namun tidak sedalam kontraksi perekonomian dengan tambang yang mengalami kontraksi sebesar minus 4,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,42% (yoy) (lihat Tabel 20).

Kontraksi perekonomian tersebut terutama disebabkan oleh kontraksi pada lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Kontraksi pada sektor tersier, khususnya lapangan usaha perdagangan bersumber dari menurunnya

aktivitas perekonomian masyarakat di tengah pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19. Kontraksi lebih dalam tertahan oleh kinerja lapangan usaha konstruksi yang masih mencatat pertumbuhan positif sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan beberapa proyek strategis di Kaltim.

**Tabel 20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Menurut Pengeluaran, Triwulan I dan II 2020**

Komponen PDRB	2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II
<b>Berdasarkan Lapangan Usaha</b>						
Pertanian	6,12	4,22	3,05	2,21	1,69	-2,19
Pertambangan	6,69	7,77	10,53	2,82	-0,48	-6,88
Industri Pengolahan	-0,95	0,95	0,67	0,09	3,23	-7,74
Listrik dan Gas	8,37	8,97	8,02	9,23	9,92	9,09
Air	6,06	8,11	5,49	2,75	3,04	5,16
Konstruksi	14,53	6,03	2,30	0,88	0,74	0,42
Perdagangan	3,55	3,24	6,92	7,12	5,83	-1,11
Transportasi dan Pergudangan	1,26	1,20	3,08	2,93	1,57	-16,91
Akomodasi dan Makan Minum	7,10	4,76	6,33	6,34	4,94	-13,43
Informasi dan Komunikasi	6,13	8,80	6,70	5,85	5,36	6,07
Jasa Keuangan	7,19	-3,03	-0,59	8,57	3,28	5,77
Real Estate	1,09	0,15	3,74	3,52	3,38	1,49
Jasa Perusahaan	-1,12	-3,72	6,05	4,86	2,52	-4,21
Adm. Pemerintahan	2,42	-0,03	4,58	9,96	1,76	-0,38
Jasa Pendidikan	6,46	3,79	4,16	4,25	0,12	0,82
Jasa Kesehatan dan Sosial	7,07	6,91	7,13	6,85	7,14	9,03
Jasa lainnya	9,20	7,27	7,42	8,80	6,02	-7,86
<b>Berdasarkan Pengeluaran</b>						
Konsumsi RT	4,03	3,37	3,13	2,09	1,65	-2,34
Konsumsi LNPR	7,41	6,41	6,67	3,33	-4,88	-3,12
Konsumsi Pemerintah	23,25	-5,56	11,03	13,69	5,13	-0,55
PMTB	9,87	-1,29	5,89	5,22	0,60	0,79
Ekspor*)	4,54	7,08	6,50	1,55	2,86	-6,03
Impor*)	6,47	4,70	5,63	2,09	4,46	-2,06
Ptoduk Domestik Bruto	5,11	5,06	6,31	2,67	1,27	-5,46

Sumber: Bank Indonesia Kaltim (2020)

Struktur PDRB Kaltim menurut lapangan usaha pada Triwulan II-2020 masih relatif sama dengan struktur pada triwulan-triwulan sebelumnya yang ditandai dengan masih dominannya lima lapangan usaha utama yaitu pertambangan dan penggalian dengan sumbangan sebesar 42,94%, industri pengolahan dengan peranan sebesar 17,90%, konstruksi sebesar 9,58%, pertanian, kehutanan, dan perikanan berperan sebesar 8,58%, dan perdagangan besar dan eceran dengan peranan sebesar 6,56%.

Dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami kontraksi yang tajam. Kontraksi terjadi terutama karena adanya penurunan sebesar minus 4,88% dari pengeluaran konsumsi pada sejumlah lembaga yang melayani pengadaan barang dan jasa untuk rumah tangga pada triwulan pertama tahun 2020. Penurunan pengeluaran konsumsi ini, merupakan implikasi negatif dari berkurangnya pendapatan karena adanya pembatasan sosial dan penerapan protokol penanggulangan covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran, sedikit

tertolong oleh adanya peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 5,13% pada periode yang sama, sementara sektor lain memberikan dampak yang tidak cukup signifikan.

Memasuki triwulan kedua tahun 2020, dampak negatif dari merebaknya pandemi covid-19 di Kaltim semakin terlihat dari angka-angka statistik. Pada triwulan II tahun 2020, semua sektor ekonomi mengalami kontraksi yang bervariasi dengan laju pertumbuhan yang negatif. Satu-satunya sektor penyangga yang masih tercatat mengalami pertumbuhan positif adalah Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB-investasi) sebesar 0,79%. Sektor ekonomi yang paling terpuak adalah ekspor yang mengalami pertumbuhan sebesar minus 6,03%, diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang minus 2,34%, konsumsi LNPRT minus 3,12%, dan konsumsi pemerintah sebesar minus 0,55%. Pandemi covid-19 telah membawa dampak sosial ekonomi yang sangat besar bagi perekonomian daerah, khususnya dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada sisi pengeluaran.

Kontraksi yang terjadi pada lapangan usaha pertambangan salah satunya bersumber dari penurunan produksi batubara Kaltim yang utamanya disebabkan oleh penurunan kuota produksi batubara serta penurunan produksi di beberapa perusahaan sebagai dampak dari pandemi covid-19 dan harga batubara internasional yang masih rendah. Produksi batubara Kaltim pada triwulan II 2020 tercatat mengalami penurunan sebesar 9,91% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan 6,17% (yoy) (lihat Gambar 14.) pada triwulan sebelumnya. Sebagai daerah penghasil batubara terbesar di Kaltim, ekonomi Kutim juga sangat terpengaruh oleh kontraksi ekonomi selama masa pandemi ini.

**Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Pertambangan**



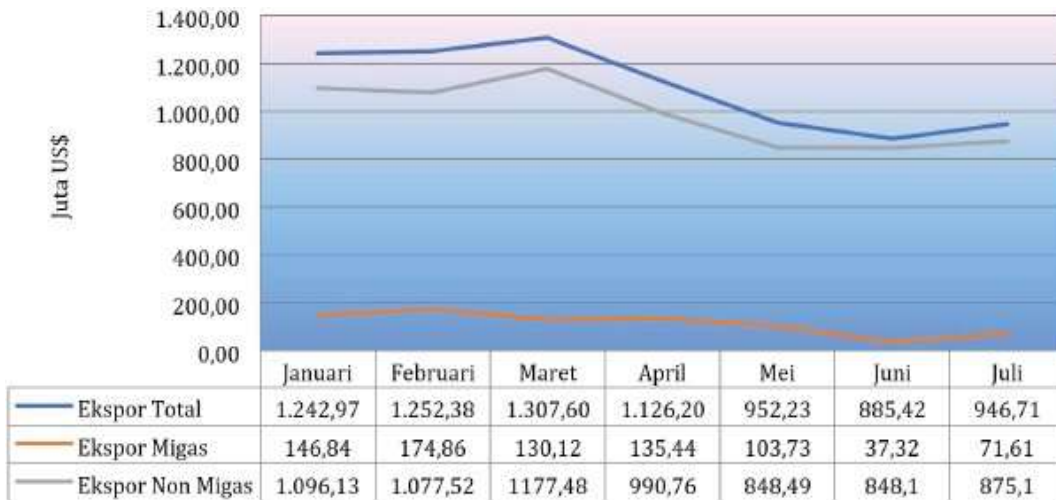
Sumber: Bank Indonesia Kaltim (2020)

### 3.9.3. Merosotnya Ekspor Kaltim, Januari-Juni 2020

Perekonomian regional Kaltim mengalami tekanan yang sangat kuat selama masa pandemi covid-19. Tekanan tersebut, terutama terjadi pada kinerja ekspor baik migas maupun nonmigas. Pada Tabel 15 di atas, telah ditunjukkan bagaimana peranan sektor ekspor terhadap PDRB Kaltim sisi pengeluaran. Pada triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekspor Kaltim masih tercatat positif sebesar 2,86% namun masih lebih rendah dibandingkan triwulan pertama 2019 yakni sebesar 4,54% (yoy).

Penurunan kinerja ekspor Kaltim, sangat terlihat pada triwulan kedua 2020 sebagai imbas dari adanya pengetatan atas pemberlakuan protokol kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyebaran pandemi covid-19 di Kaltim. Data statistik menunjukkan pada triwulan kedua 2020, kinerja ekspor Kaltim mengalami kontraksi yang sangat tajam hingga minus 6,03% (yoy), sangat jauh merosot dibandingkan triwulan kedua 2019 ketika permintaan ekspor komoditas dari Kaltim, baik migas maupun nonmigas (lihat Gambar 15).

**Gambar 15. Perkembangan Ekspor Kaltim (juta US\$) Selama Masa Pandemi Covid-19, Januari-Juli 2020**



Sumber: Bank Indonesia Kaltim (2020)

Sejumlah komoditas utama untuk ekspor dari Kaltim, masih didominasi oleh komoditas non migas seperti hasil tambang, hasil industri dan hasil pertanian. Sementara ekspor migas berupa minyak mentah, selama periode Januari-Juni 2020, tidak ada sama sekali. Pada periode yang sama tahun 2019, ekspor minyak mentah dari Kaltim pernah mencapai angka \$12,63 juta. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2019, terjadi penurunan ekspor yang sangat tajam (migas dan nonmigas) dari Kaltim sebesar minus 17,80% selama masa pandemi covid-19 di Kaltim.

Sumbangan dominan dari sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB Kutim berdasarkan lapangan usaha, tentu juga mengalami tekanan yang signifikan karena penurunan ekspor batubara ini. Mengingat posisi Kutim sebagai daerah penghasil batubara terbesar di Kaltim. Jenis komoditas ekspor yang paling berpengaruh adalah gas alam dan hasil tambang (lihat Tabel 21). Selama masa pandemi covid-19 Januari-Juni 2020, ekspor hasil tambang Kaltim telah mengalami penurunan sebesar minus 20,48% dibanding periode yang sama pada tahun 2019.

**Tabel 21. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Kaltim, Juni 2020**

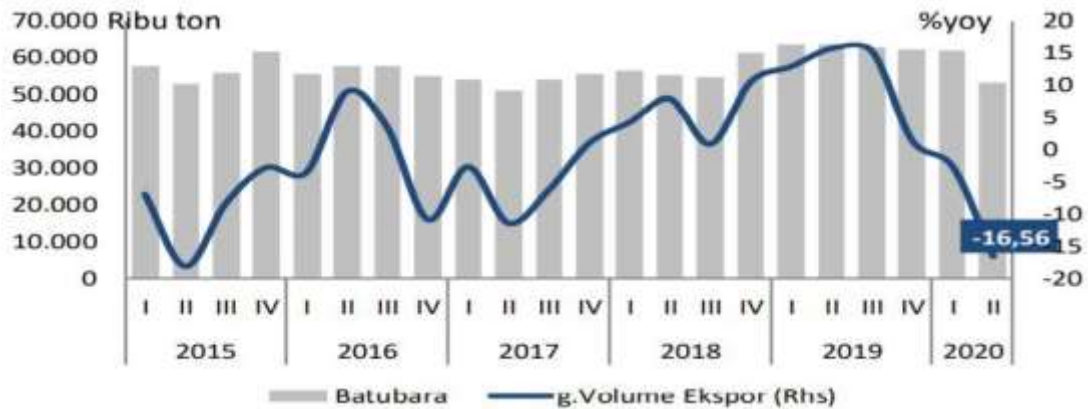
Uraian	Nilai FOB (juta US\$)				Perubahan (%)		Peran terhadap Total Jan-Juni 2020*) (%)
	Mei 2020	Juni*) 2020	Jan-Juni*) 2020	Jan.-Juni 2019	Juni 2020*) terhadap Mei 2020	Jan-Juni 2020*) terhadap Jan-Juni 2019	
Total Ekspor	952,23	885,03	6.766,42	8.231,38	-7,06	-17,80	100,00
Migas	103,73	36,79	727,79	1.033,19	-64,53	-29,56	10,76
Minyak Mentah	-	-	-	12,63	-	-	0,00
Hasil Minyak	1,95	7,80	78,04	38,75	299,51	101,42	1,15
Gas	101,78	28,99	649,75	981,82	-71,51	-33,82	9,60
Nonmigas	848,49	848,24	6.038,63	7.198,19	-0,03	-16,11	89,24
Hasil Tambang	695,52	731,05	5.147,34	6.472,91	5,11	-20,48	76,07
Hasil Industri	150,89	117,11	885,89	722,77	-22,38	22,57	13,09
Hasil Pertanian	2,09	0,07	5,40	2,51	-96,51	115,39	0,08

Sumber: Bank Indonesia Kaltim (2020)

### 3.9.4. Menurunnya Produksi dan Ekspor Batubara

Penurunan produksi batubara di Kaltim, utamanya berasal dari produksi perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 9,91% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 0,09% (yoy) (lihat Gambar 16). Di sisi lain, perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga tercatat mengalami penurunan produksi sebesar minus 19,37% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar minus 16,47%.

**Gambar 16. Volume Ekspor Batu Bara Kaltim, Triwulan I dan II 2020**



Sumber: Bank Indonesia Kaltim (2020)

Sementara itu, andil Kutim terhadap perekonomian Kaltim sampai tahun 2019, tercatat sebesar 20,45% setelah Kukar yakni sebesar 24,89%. Struktur ekonomi Kutim, masih sangat mengandalkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan peranan mencapai 81,5% pada tahun 2019. Akibatnya, gejolak yang terjadi pada sektor ini, akan sangat berpengaruh pada kinerja perekonomian Kaltim secara keseluruhan.

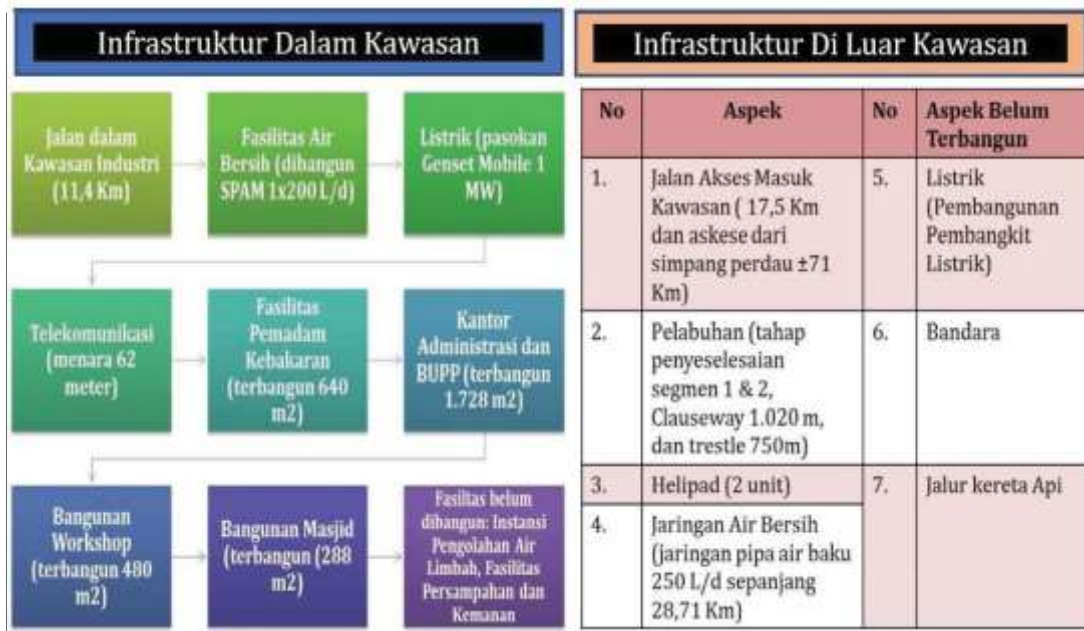
Rendahnya permintaan batubara dari negara tujuan utama di tengah kebijakan pembatasan kegiatan industri yang dilakukan negara tersebut serta kondisi pasokan batubara global yang *oversupply* turut menjadi faktor penurunan kinerja lapangan usaha pertambangan. Volume ekspor batubara Kaltim pada triwulan II 2020 tercatat mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar -16,56% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan 2,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya (lihat Gambar 16).

Berdasarkan negara tujuannya, penurunan tersebut bersumber dari kontraksi ekspor batubara ke Tiongkok, India, Korea Selatan dan Taiwan walau masih mampu tertahan oleh pertumbuhan ekspor yang positif ke ASEAN. Penurunan tersebut sejalan dengan adanya kebijakan pembatasan impor batubara Tiongkok serta kebijakan *lockdown* di wilayah India hingga 30 Juni 2020 yang turut menekan permintaan energi di negara tersebut. Adapun pangsa Tiongkok dan India terhadap total ekspor batubara Kaltim masing-masing mencapai 37,82% dan 15,33%.

### 3.10. BELUM TUNTASNYA PEMBANGUNAN KEK MBTK

Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) masih terhambat oleh infrastruktur listrik yang belum memadai. Untuk memenuhi keperluan industri di KEK MBTK, diperlukan pasokan listrik dengan kapasitas 90 megawatt (MW). Sementara, pasokan listrik yang sudah masuk di KEK MBTK baru 30 MW atau tegangan listrik menengah. Selain itu, masih ada banyak sarana dan prasarana penunjang yang perlu tingkatkan seperti infrastruktur jalan, sistem pengolahan air minum (SPAM) Maloy, perkantoran administrator, dan pembangunan dermaga KEK MBTK. Persoalan pembangunan infrastruktur yang belum memadai inilah yang menyebabkan utama investor masih menahan diri untuk berinvestasi (lihat Gambar 17).

**Gambar 17. Pembangunan Infrastruktur Dalam dan Luar Kawasan KEK Maloy**



Sumber: Kuncoro , *et al* (2019)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di KEK, bahwa pemerintah pusat memberikan insentif di kawasan KEK berupa pemanfaatan *tax allowance*. Berdasarkan kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa fasilitas *tax allowance* di beberapa perusahaan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja, artinya fasilitas tersebut memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Fasilitas *tax allowance* juga dapat mengisi pohon industri yang masih kosong karena terdapat beberapa perusahaan yang masuk dalam pohon industri yang masih harus dikembangkan atau industri yang belum didirikan di Indonesia.

Kendala dan hambatan dalam pemanfaatan *tax allowance*, yakni persoalan sosialisasi yang belum efektif, persoalan internal manajemen perusahaan, tingkat kepedulian dari manajemen perusahaan, dan adanya dugaan masih adanya pungutan di luar ketentuan dalam proses pengajuan mendapatkan fasilitas *tax allowance* tersebut. Kendala paling sedikit disebutkan oleh perusahaan adalah pertimbangan untung rugi (*cost-benefit*) perusahaan itu sendiri. Persoalan sosialisasi kebijakan yang belum cukup efektif merupakan temuan yang penting dalam kajian ini. Pola sosialisasi kebijakan *tax allowance* pada 2007 sampai dengan periode 2011 memiliki cakupan jumlah peserta yang besar.

**Gambar 18. Kemajuan Perkembangan KEK MBTK**

PERKEMBANGAN KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN (MBTK)			
Deskripsi Proyek	Pengusul & Badan Usaha Pembangunan Pengelola (BU/P)	Luas	Target Investasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertakwil di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>Ditetapkan melalui PP No.85 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014</li> <li>Masa pembangunan telah diperpanjang hingga 17 Oktober 2018, namun berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini belum siap beroperasi.</li> <li>Gubernur Kalimantan Timur telah mengajukan usulan perpanjangan pembangunan KEK MBTK hingga Oktober 2019 (surat nomor 500/5544/EK pada 10 Desember 2018)</li> </ul>	PT Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	557,34 Ha	Pembangunan Kawasan Rp 3,4 Triliun dan Investasi Pelaku Usaha Rp 34,31 Triliun
Aspek	Perkembangan		
Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dikuasai lahan seluas 518,34 Ha dan telah memperoleh SK HPL seluas 509,496 Ha dari Menteri ATR/BPN pada 29 Agustus 2018.</li> <li>Saat ini dalam proses penerbitan sertifikat HPL di Kantah Kutai Timur, namun terkendala dokumen persyaratan yang belum lengkap : surat pelepasan hak tanah, berita acara pembayaran uang pembebasan tanah, dan Kwitansi/ bukti pembayaran untuk 21 bidang tanah seluas 42 Ha.</li> </ul>		
Infrastruktur & Fasilitas Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah terbangun infrastruktur kawasan dengan nilai investasi sebesar Rp 801,8 M meliputi jalan kawasan, jaringan air bersih, menara telekomunikasi, listrik (genset mobile 1 MW), SPAM Maloy, causeway pelabuhan Maloy, kantor administrator dan BU/P, pos keamanan, gسلung pemadam kebakaran, serta gedung workshop.</li> <li>BU/P telah menandatangani nota kesepakatan dengan Telkom untuk penyediaan jaringan internet di kawasan.</li> <li>BU/P menyampaikan permohonan pembangunan IPAL kawasan kepada Gubernur Kalimantan Timur pada 1 Juli 2018.</li> </ul>		
Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Kilang Kaltim Continental : Pembangunan pengilangan minyak bumi dengan nilai investasi Rp 750 Miliar, dalam proses finalisasi studi kelayakan.</li> <li>PT Anugerah Energitama : Pembangunan tangki timbun dengan nilai investasi Rp 30 Miliar, telah menyampaikan LOI kepada BU/P.</li> </ul>		
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi lahan seluas 509,496 ha belum bisa diterbitkan oleh Kantor BPN Kutai Timur, dikarenakan dokumen persyaratan belum lengkap.</li> <li>Pembayaran pembangunan mengandalkan dana APBD.</li> </ul>		

Sumber: Kuncoro , et al (2019)



Kendala dan permasalahan yang dihadapi pelaku bisnis, antara lain: (1) perusahaan belum memahami benar tentang tata cara pengajuan dan manfaatnya bagi perusahaan; (2) keberatan dengan pengawasan dan kontrol pasca menerima fasilitas *tax allowance*; (3) adanya dugaan dari perusahaan mengenai kerumitan dan belum transparansinya birokrasi; (4) adanya dugaan dari perusahaan bahwa untuk mendapatkan fasilitas *tax allowance* perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya dan pungutan lain; dan (5) tidak tahu informasi tentang adanya fasilitas *tax allowance*.

Temuan yang menarik dalam kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018) bahwa perusahaan asing yang berada di Indonesia merasa bahwa dunia usaha di Indonesia yang paling diperhatikan adalah persoalan kenyamanan berusaha dan kepastian birokrasi daripada masalah ada tidaknya fasilitas keringanan pajak (*tax allowance*). Kenyamanan berusaha dapat dilihat dari frekuensi terjadinya mogok kerja atau demonstrasi dari tenaga kerja. Hal itu terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan yang menyangkut kehidupan kaum pekerja, misalnya mengenai tingkat upah dan kesejahteraan. Persoalan birokrasi oleh pengusaha dipandang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama dari aspek transparansi dan implementasi. Persoalan transparansi merupakan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap pelaksanaan kebijakan. Pada implementasinya setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengusaha dipandang masih memiliki hambatan, seperti pungutan di luar ketentuan dan politik kepentingan. Hal inilah yang tidak disukai para pengusaha.

Beberapa kendala dalam pengembangan KEK MBTK antara lain seperti masih rendahnya minat investor, belum tuntasnya sertifikasi lahan 509,5 ha, belum tersedianya fasilitas Kawasan seperti pintu gerbang, persampahan, pemadam kebakaran, belum ditentukannya nilai sewa lahan yang bisa menarik investor masuk KEK (lihat Gambar 19). Merujuk pada hasil kajian evaluasi kebijakan pemberian insentif di kawasan KEK MBTK yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim pada tahun 2019, kesiapan peraturan di daerah baik provinsi dan kabupaten tentang fasilitas dan kemudahan pengembangan KEK MBTK belum ada, namun dukungan dari pemerintah pusat sudah ada terkait kemudahan di seluruh kawasan KEK yang ada di Indonesia. Namun, peraturan itu belum cukup efektif salah satunya tentang aturan *tax allowance* dalam menarik investor untuk melakukan investasi di kawasan KEK khususnya KEK MBTK.

**Gambar 19. Hasil Evaluasi Kesiapan Beroperasi KEK  
Maloy Batuta Trans Kalimantan**

ASPEK	MBTK	ASPEK	MBTK
<b>INFRASTRUKTUR KAWASAN</b>		<b>KELEMBAGAAN DAN SDM</b>	
<b>PERTANAHAN TAHAP 1</b>	518,34 Ha	DEWAN KAWASAN	●
Pengadaan Lahan	●	SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN	●
Pematangan Lahan 140 Ha	●	ADMINISTRATOR	●
Sertifikasi Lahan 509,496 Ha	●	BADAN USAHA PEMBANGUN DAN PENGELOLA (BUPP)	●
<b>INFRASTRUKTUR DASAR</b>		<b>PERANGKAT PENGENDALI ADMINISTRASI</b>	
Listrik	●	<b>SISTEM PELAYANAN PERIZINAN</b>	
Instalasi & Jaringan Air Bersih	●	Pelimpahan Kewenangan dari Bupati/ Walikota	●
Jalan Kawasan	●	Pelimpahan Kewenangan dari Gubernur	●
Sistem Air Limbah *	●	Pelimpahan Kewenangan dari Kepala BKPM	●
Drainase	●	Pelimpahan Kewenangan dari Menteri Perdagangan	●
Telekomunikasi	●	<b>SISTEM PELAYANAN KAWASAN</b>	
Pintu Gerbang	●	Tata Tertib Kawasan	●
<b>FASILITAS KAWASAN</b>		Keterangan: ● : Tersedia ● : Dalam proses ● : Belum tersedia * : Dimasukkan dalam estate regulation merupakan kewajiban pelaku usaha	
Persampahan	●		
Pemadam Kebakaran	●		
Kantor Pengelola & Administrator	●		
Keamanan	●		

Sumber: Kuncoro , *et al* (2019)

### 3.11. TINGGINYA JUMLAH DESA TERTINGGAL

Indeks Desa Membangun (IDM), dikembangkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Kemendes PDTT) untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. IDM mengklasifikasi desa dalam lima status yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 hingga 0,92. Klasifikasi dalam lima status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus untuk menentukan bentuk intervensi kebijakan yang diperlukan sesuai status desa.

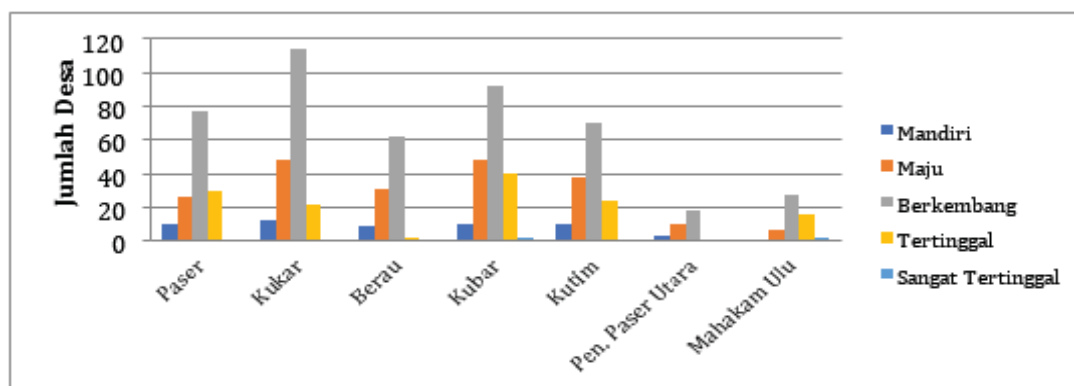
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) Kaltim pada Juni 2020, jumlah desa tertinggal dan berkembang di Kutim, masih cukup tinggi. Dari 129 desa tertinggal di seluruh Kaltim, 23 desa di antaranya atau 17,82% berada di Kutim. Untuk status desa berkembang, dari 455 desa berkembang di seluruh Kaltim, 69 desa atau 15,16% berada di Kutim. Untuk kategori desa maju, di Kutim terdapat 37 desa atau 18,31% dari seluruh desa maju di Kaltim (lihat Tabel 22 dan Gambar 20).

**Tabel 22. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Provinsi Kaltim, 2020**

Kabupaten	Jumlah Desa berdasarkan status					
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Total
Paser	9	26	76	29	0	139
Kutai Kartanegara	12	47	113	21	0	193
Berau	8	30	61	1	0	100
Kutai Barat	9	48	91	40	2	190
<b>Kutai Timur</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
Penajam Paser Utara	3	9	18	0	0	30
Mahakam Ulu	0	6	27	15	2	50
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>202</b>	<b>455</b>	<b>129</b>	<b>4</b>	<b>841</b>

Sumber: Kemendes PDTT (2020)

**Gambar 20. Perbandingan Status Indeks Desa Membangun Menurut Kabupaten di Kaltim, 2020**



Sumber: Kemendes PDTT (2020)

### 3.12.RENDAHNYA KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Pada tahun 2018, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim tercatat sebesar Rp133.88 miliar 5.503.220,12, mengalami penurunan sekitar 23,34% dibanding tahun 2017 yaitu tercatat mencapai Rp174.64 miliar. Adapun untuk realisasi PAD pada tahun 2019, dapat disimak dari pidato yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang, dalam penyampaian Nota Penjelasan Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna ke 11 DPRD Kutim yang dilaksanakan Rabu 8 Juni 2020. Laman [pro.kutaitimurkab.go.id](http://pro.kutaitimurkab.go.id) menyatakan sebagai berikut:

“Adapun rincian, di antaranya, realisasi pendapatan tahun 2019 adalah Rp. 3,96 triliun atau 98,97 persen dari target anggaran pendapatan sebesar Rp 4 triliun. Uraian pendapatan itu, PAD tahun 2019 sebesar Rp. 207,99 miliar (11,69%) dari PAD sebesar Rp. 184,56 miliar. Pendapatan transfer 2019 adalah sebesar Rp.3,53 triliun (89,66%) dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp 3,58 triliun.

Lain-lain pendapatan yang sah, tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 224,89 miliar (93,07%) dari anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp241,63 miliar. Kemudian, realisasi belanja anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3,37 triliun (94,44%) dari target anggaran belanja sebesar Rp. 3,57 triliun.

Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.2,30 triliun, belanja modal sebesar Rp.22,70 miliar,” sebut Kasmidi” (Prokutim, Juni 2020).

Dalam hal kemandirian fiskal daerah, kapasistas fiskal Kutim bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2017, rasio realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah tercatat sebesar 7,55%. Demikian juga pada tahun 2018, rasio realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah tercatat sebesar 4,31% yang malah mengalami penurunan 3,24% dibanding tahun sebelumnya (lihat Tabel 23).

**Tabel 23. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kutim 2017-2021 (Rp)**

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN DAERAH	2.311.764.785.502,59	3.103.721.222.538	3.359.939.415.390	3.488.154.058.990	3.553.874.058.990
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	174.640.591.101	133.875.503.220	164.584.524.300	172.384.524.300	175.104.524.300
1.1.1	Pajak Daerah	105.236.329.357	63.874.328.270	82.000.000.000	86.000.000.000	88.000.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	7.272.428.766	6.793.682.340	6.200.000.000	6.700.000.000	6.800.000.000
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang	8.414.031.131	7.471.365.194	8.376.180.000	8.676.180.000	8.696.180.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	53.717.801.847	55.736.127.416	68.008.344.300	71.008.344.300	71.608.344.300
1.2.	Dana Perimbangan	1.527.826.847.118	2.291.810.160.981	2.331.845.508.600	2.417.845.508.600	2.444.845.508.600
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	835.483.138.820	1.580.154.008.721	2.331.845.508.600	1.601.886.289.600	1.621.886.289.600
1.2.2	Dana alokasi umum	565.517.743.274	552.776.510.000	2.331.845.508.600	585.721.208.000	589.721.208.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	126.825.965.024	158.879.642.260	2.331.845.508.600	230.238.011.000	233.238.011.000
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	609.297.347.284	678.035.558.337	2.331.845.508.600	897.924.026.090	933.924.026.090
1.3.1	Hibah	44.268.465.703	0	2.331.845.508.600	60.150.198.090	60.150.198.090
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	378.425.844.000	440.712.590.000	2.331.845.508.600	522.721.777.000	552.721.777.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	7.500.000.000	9.000.000.000	2.331.845.508.600	34.000.000.000	35.000.000.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	61.767.500.000	87.815.000.000	2.331.845.508.600	95.250.000.000	97.250.000.000
1.3.6	Pendapatan Lainnya	117.335.537.581	140.507.968.337	2.331.845.508.600	185.802.051.000	188.802.051.000

Sumber: Bappeda Kutim (2020)

Dilihat dari komposisi pendapatan daerah, Kutim masih sangat mengandalkan dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, selama periode 2017-2021. Sumbangan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kutim hingga tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 2.291,8 miliar atau sekitar 73,84% dari total pendapatan daerah. Sisanya disumbang oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni sebesar Rp.678 miliar atau sekitar 21,84% dari total pendapatan daerah Kutim (lihat Gambar 21).

**Gambar 21. Komposisi Pendapatan Daerah Kutim Tahun 2018**



Sumber: Diolah dari Bappeda Kutim (2020)

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung selama 2017-2018, cukup dinamis. Belanja tidak langsung pada tahun 2017, tercatat sebesar Rp.1.031,4 miliar atau sekitar 36,92% dari total belanja daerah. Selanjutnya pada tahun 2018, belanja tidak langsung meningkat hingga Rp. 1.141,9 miliar atau 36,70% dari total realisasi belanja daerah.

Hal penting yang perlu diperhatikan di dalam struktur belanja tidak langsung ini, adalah belanja pegawai. Pada tahun 2017, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp. 681,8 miliar atau sekitar 66,10% dari total belanja tidak langsung. Pada tahun 2018, realisasinya meningkat hingga Rp. 703,6 miliar yang merupakan 61,61% dari total belanja tidak langsung pada tahun tersebut (lihat Tabel 24).

**Tabel 24. Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kutim Tahun 2017-2021 (dalam rupiah)**

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2017	2018	2019	2020	2021
2	BELANJA DAERAH	2.793.571.081.104	3.110.527.413.391	3.509.225.714.390	3.488.154.058.990	3.553.874.058.990
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.031.438.358.864	1.141.852.220.657	1.261.534.223.692	1.262.846.955.587	1.279.587.681.225
2.1.1	Belanja Pegawai	681.825.677.293	703.602.276.072	762.263.234.079	825.075.965.974	830.816.691.612
2.1.2	Belanja Bunga			16.500.000.000		
2.1.3	Belanja Subsidi	5.732.683.535	493.666.000	6.045.683.535	6.045.683.535	6.045.683.535
2.1.4	Belanja Hibah	84.977.395.036	121.457.802.986	90.080.954.318	45.080.954.318	46.080.954.318
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.660.000.000	754.900.000	4.660.000.000	4.660.000.000	4.660.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa				380.484.351.760	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	248.742.603.000	313.047.980.098	380.484.351.760	1.500.000.000	390.484.351.760
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000	2.495.595.500	1.500.000.000	3.488.154.058.990	1.500.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.762.132.722.240	1.968.675.192.734	2.247.691.490.698	2.225.307.103.403	2.274.286.377.765
2.2.1	Belanja Pegawai	133.877.953.164	227.196.643.872	190.442.600.817	195.768.561.404	198.768.561.404
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	677.555.565.519	898.351.932.275	961.513.498.691	683.803.150.809	912.803.150.809
2.2.3	Belanja Modal	950.699.203.557	843.126.616.587	1.095.735.391.190	1.345.735.391.190	1.162.714.665.552

Sumber: Bappeda (2020)

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

# BAB 4 VISI-MISI KUTIM

## 2021-2026

**F**ormulasi visi sangat penting sebagai arah strategi dan pedoman melaksanakan strategi yang diformulasikan. Visi adalah suatu pernyataan Komprehensif tentang: apa yang diinginkan oleh pemimpin organisasi, mengapa suatu organisasi berdiri dan apa yang diyakininya, atau gambaran masa depan organisasi (Kuncoro, 2006). Visi yang baik (*vision of success*) dapat didefinisikan sebagai “deskripsi tentang apa yang mau dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya” (Bryson, 2004).

Visi dan misi adalah sebuah bentuk perencanaan yang dapat mengarahkan pembangunan ke sasaran yang tepat. Hampir semua daerah memiliki perencanaan, tetapi tidak semua daerah menghasilkan kesejahteraan. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang stratejik dan rasional agar kesejahteraan itu dapat tercapai. Selanjutnya, kesinambungan serta keterkaitan visi dan misi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus dijaga. Tujuannya adalah terjalannya keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah.

Bab 4 akan menguraikan secara rinci visi pembangunan Kutim 2021-2026. Dimulai dengan mengidentifikasi seluruh visi Kabupaten/Kota di Kaltim, visi pembangunan jangka panjang dan menengah Kutim hingga 2021, dan visi serta strategi untuk mewujudkan Kutim Bangkit 2026.

### 4.1. VISI KABUPATEN/KOTA DI KALTIM

Perencanaan daerah di tingkat kabupaten/kota harus memasukkan dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan agar kita tidak hidup dalam dunia ‘aspasial’ (*spaceless*), di mana faktor perbedaan masalah dan potensi antarkecamatan, kabupaten, dan kota dianggap tetap dan seragam. Selain itu pendekatan regional/spasial harus lebih menonjol dibandingkan pendekatan sektoral. Di era otonomi daerah, harusnya paradigma ‘membangun daerah’ lebih difokuskan (Kuncoro, 2006; 2008). Artinya, daerahlah yang harus punya inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam menyusun, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan daerah.



Asumsinya, daerah lebih tahu tentang masalah dan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Secara komparatif, visi kabupaten/kota di Kaltim, sesungguhnya memiliki sejumlah isu yang bisa saling beririsan antara satu daerah dengan daerah yang lain (lihat Tabel 25). Di sinilah letak pentingnya menyusun visi dan misi perencanaan jangka menengah dan program aksi bagi daerah Kaltim. Mau dibawa ke mana Kaltim dan Kutim 5 tahun mendatang? Tabel 25 merangkum visi seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Terlihat masing-masing daerah memiliki visi yang berbeda, sejalan dengan tuntutan masyarakat, kebutuhan daerah, dan perspektif perencanaan di masing-masing daerah.

**Tabel 25. Perbandingan Visi Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kaltim**

No.	Kabupaten/Kota/ Provinsi	Visi
1	Kutai Timur	Terwujudnya kemandirian Kutai Timur melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri
2	Berau	Mewujudkan Berau sejahtera, unggul, dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
3	Kutai Barat	Terwujudnya Kutai Barat yang semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
4	Kutai Kartanegara	Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan
5	Bontang	Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat
6	Samarinda	Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
7	Balikpapan	Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman
8	Penajam Paser Utara	Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Maju, Modern dan Religius
9	Paser	Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
10	Kaltim	Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat

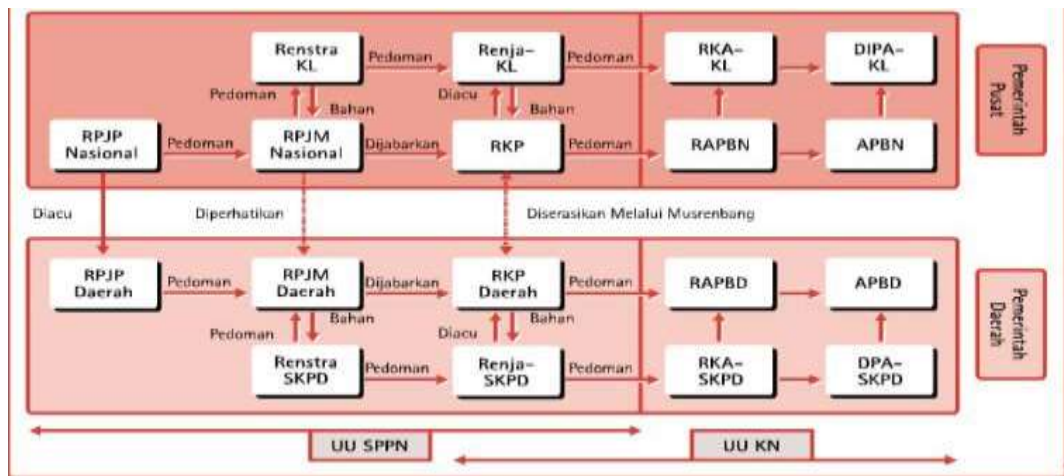
Sumber: Pemkab Kutai Timur (2020), Pemkab Berau (2020), Pemkab Kutai Barat (2020), Pemkab Kutai Kartanegara (2020), BPKP Kota Bontang (2020), Pemkot Samarinda (2020), Pemkot Balikpapan (2020), Pemkab Penajam Paser Utara (2020), Pemkab Paser (2020), Provinsi Kaltim (2020)

Apabila orientasi para bupati/walikota/gubernur hanyalah jangka pendek, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang seirama dengan masa jabatannya, jangan-jangan Kaltim dan Kutim nanti tidak “ke mana-mana,” alias jalan di tempat. Masukan dari seluruh *stakeholders* Kaltim dan Kutim merupakan sebuah keharusan. Ini bukan hanya tugas Gubernur, Bupati, Walikota dan aparat Pemda. Ini tanggung jawab semua warga Kaltim dan Kutim.

Kita memerlukan ‘kesamaan’ visi antarprovinsi, kabupaten dan kota di Kaltim. Sayangnya saat ini belum ada koherensi dan sinergi antarvisi maupun RPJMD. Di sinilah letak pentingnya mensinergikan perencanaan pembangunan propinsi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Kaltim dalam menyusun rencana aksi pembangunan maupun rencana program aksi ke depan. Apalagi saat ini, di banyak daerah, fanatisme sektoral mulai beralih menjadi fanatisme daerah yang cenderung berlebihan.

Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (lihat Gambar 22). Jangan sampai pemerintah provinsi Kaltim dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim terjebak dalam ‘*strategic myopia*’ karena masing-masing daerah jalan sendirisendiri. Survei membuktikan: “Visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi tanpa visi yang jelas hanyalah sekedar aktivitas. Namun, visi dan aksi yang terpadu di banyak kasus dapat mengubah dunia.”

**Gambar 22. Hubungan antara Perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**



Sumber: Kuncoro (2018)

## 4.2. VISI DAN MISI KUTIM HINGGA 2021

*Grand strategy* atau konsepsi umum tentang pendekatan pembangunan daerah di Kutim selama 2006-2025 dikenal dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kutim. Tabel 26 menyajikan visi pembangunan jangka panjang dan menengah Kutim. Visi ini berbasis pada pemberdayaan semua komponen, baik pemerintah, legislatif, masyarakat, maupun investor swasta merupakan visi dan misi pembangunan yang tidak bersifat dogmatis atau bersifat kaku, tetapi merupakan konsepsi pembangunan yang bersifat inklusif (terbuka) bagi tumbuh dan berkembangnya ide dan kreatifitas yang akan memberikan penguatan bagi terwujudnya masyarakat Kutim menuju masyarakat madani yang mandiri, penuh kreatifitas dan sejahtera lahir batin.

**Tabel 26. Visi Pembangunan Kabupaten Kutim: Jangka Panjang dan Menengah**

Periode	Visi
Jangka Panjang Tahun 2006-2025	"Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Daerah".
Jangka Menengah Tahun 2016-2021 (Ismunandar dan Kasmidi Bulang)	"Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri"

Sumber: Bappeda Kutim (2020)

Visi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kutim tersebut merupakan amanat yang diemban Bupati dan Wakil Bupati Kutim periode 2016-2021, yaitu Ir. H. Ismunandar, MT dan Kasmidi Bulang, ST, MM. Ismunandar bersama wakilnya, resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur pada tanggal 17 Februari 2016 di Planary Hall Sempaja Samarinda. Bupati yang akrab disapa Ismu ini, adalah seorang yang memiliki karier dan pengalaman birokrasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim tahun 2010, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Kutim, pernah bertugas di Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang, Ketua PC Nahdatul Ulama Kutim, dan Ketua PMI Kutim. Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati, Kasmidi dikenal sebagai wakil rakyat di DPRD Kutim, dua periode sebagai ketua komisi C dan satu periode menjabat komisi B.

Kendati visi Kabupaten Kutim 2016-2021 merupakan visi yang baik, capaian pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai permasalahan dan isu-isu strategik yang menggemana di Kabupaten Kutim, sebagaimana telah dianalisis dalam Bab 3, menjadi petunjuk jelas

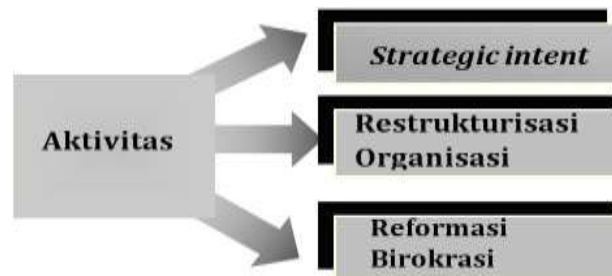
perlu dipilih dan ditetapkannya pemimpin baru yang memiliki visi baru yang benar-benar dapat menjawab permasalahan Kutim yang sebenarnya. Subbab berikut akan menguraikan visi dan misi bagi pembangunan Kutim 2021-2026.

### 4.3. VISI MEMBANGUN KUTIM 2021-2026

Dalam kepemimpinan stratejik, ada tiga aktivitas utama yang harus dilakukan seorang pemimpin yang ingin melakukan perubahan. Tantangan bagi seorang pemimpin ialah mengarahkan komitmen semua orang dalam suatu organisasi dan para *stakeholders* di luar organisasi untuk meraih perubahan dan mengimplementasikan strategi yang dirumuskan. Pemimpin mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan melalui tiga aktivitas utama yang saling berkaitan: klarifikasi maksud strategik (*strategic intent*), restrukturisasi organisasi, dan reformasi birokrasi (lihat Gambar 23).

Konsep *strategic intent* berasal dari perspektif bagaimana mengembangkan organisasi dan mengimplemen-tasikan strategi. Ada dua perspektif dalam *strategic intent*, yakni: (1) perspektif menurut model *strategic fit*, yang intinya menyarankan agar organisasi menyesuaikan strateginya agar sesuai (*fit*) dengan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapinya; dan (2) perspektif *leveraging resources*, yang intinya menekankan pentingnya memanfaatkan sumberdaya untuk meraih tujuan yang belum tercapai, sebagaimana dituangkan dalam *strategic intent*. Perubahan dapat diraih pemimpin dengan mempersiapkan visi yang jelas yang diperlukan untuk menangani organisasi.

**Gambar 23. Tiga Aktivitas Utama Pemimpin Yang Ingin Melakukan Perubahan**



Sumber: Dimodifikasi dari Kuncoro (2006: 298)

Konsep *strategic intent* berasal dari perspektif bagaimana mengembangkan organisasi dan mengimplementasikan strategi. Ada dua perspektif dalam *strategic intent*, yakni: (1) perspektif menurut model *strategic fit*, yang intinya menyarankan agar organisasi menyesuaikan strateginya agar sesuai (*fit*) dengan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapinya; dan (2) perspektif *leveraging resources*, yang intinya menekankan pentingnya memanfaatkan sumberdaya untuk meraih tujuan yang belum tercapai, sebagaimana dituangkan dalam *strategic intent*.

Perubahan dapat diraih pemimpin dengan mempersiapkan visi yang jelas yang diperlukan untuk menangani organisasi.

Perubahan menjadi suatu bagian integral dalam organisasi. Seorang pemimpin perlu membangun kembali (*re-building*) dan membuat kembali (*remaking*) organisasi untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan kebutuhan akan strategi. Apa yang menjadi prioritas organisasi, klarifikasi tanggung jawab di antara para pemimpin dan unit-unit organisasi merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam restrukturisasi organisasi.

Pemimpin paham betul bahwa nilai dan kepercayaan yang berkembang di organisasi akan membentuk kinerja organisasi. Reformasi birokrasi menjadi keharusan untuk dilakukan ketika budaya organisasi sudah tidak lagi mendukung bagi perkembangan organisasi. Budaya *dilayani* dan *bureaucratic* sudah saatnya diubah dengan budaya *melayani* dan *entrepreneurship*. Intinya, Kutim membutuhkan perubahan mendasar dalam berbagai hal. Dalam manajemen perubahan, setidaknya dikenal tiga tingkatan perubahan dan strategi yang relevan untuk masing-masing tingkatan (lihat Gambar 24).

Pertama, *reacting*, artinya daerah hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan. Perubahan yang dimaksud dapat terjadi karena pergerakan pesaing, kebijakan pemerintah yang baru, dan permintaan konstituen yang tidak diduga sebelumnya. Oleh karena itu strategi yang dianjurkan adalah mengeluarkan kebijakan yang lebih baik dibanding para pesaing, menciptakan pelayanan yang memanfaatkan perubahan, dan memodifikasi paket kebijakan yang ada.

Kedua, *anticipating*, artinya daerah harus mengantisipasi perubahan akibat globalisasi pasar, munculnya segmen pelanggan yang baru, dan munculnya pengetahuan. Strategi yang diterapkan dapat berupa mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki, mengembangkan jalur pemasaran, dan menciptakan teknik baru.

Ketiga, *leading*, artinya daerah harus berupaya mengungguli para pesaingnya. Strateginya adalah dengan memaksa daerah lain untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh daerah kita. Caranya dapat dengan menciptakan teknologi dan produk baru, memasuki pasar baru, meningkatkan standar industri, meredefinisi harapan rakyat, dan meningkatkan kecepatan siklus produk dalam suatu industri.

**Gambar 24. Tingkat Perubahan dan Strategi**



Sumber: Kuncoro (2006: 311)

Dalam perencanaan pembangunan daerah, formulasi visi amat penting sebagai pedoman implementasi pembangunan. Visi yang terumuskan dengan baik setidaknya harus memiliki dua unsur utama, yaitu: Ideologi inti dan membayangkan masa depan (Collins & Porras, 2000). Ideologi inti menunjukkan posisi (di mana sekarang kita berada), dan eksistensi (mengapa kita ada). Gambaran masa depan adalah apa yang kita cita-citakan. Misalnya, akan menjadi apa? Apa yang hendak dicapai? Apa yang hendak dihasilkan? Karakteristik visi yang baik umumnya memiliki ciri: (1) *berorientasi ke depan*, artinya memberikan gambaran yang menyeluruh tentang

apa yang diinginkan oleh daerah; (2) *inspiratif*, artinya mendorong semua orang untuk menuju imaginasi atau impian yang disepakati; (3) *realistis*, artinya berupaya mencapai gambaran realitas yang paling optimal selama kurun waktu tertentu (Walters, 2002).

Visi untuk Kutim Bangkit 2026 diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah dan isu-isu strategik yang terjadi di Kutim. Visi untuk mengubah Kutim yang lebih baik adalah:

***“Kutai Timur Bangkit, Berdaya Saing, dan Berbasis Agroindustri***

Visi pembangunan Kutim 2021-2026 diwujudkan melalui sinergi tiga modal bangsa yaitu: (a) Modal manusia, dilakukan dengan mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bebas dari kemiskinan; (b) Modal alam dan fisik, dengan memanfaatkan kekayaan alam secara optimal dan berkelanjutan; (c) Modal sosial dengan mewujudkan sinergi kelompok birokrasi, wirausaha/pebisnis, dan pekerja menuju daya saing yang global (lihat Gambar 25).

**Gambar 25. Sinergi Tiga Modal Bangsa**



Di samping melimpahnya sumber daya alam dan energi sebagai modal dasar pembangunan, Kutim juga memiliki komposisi penerimaan daerah yang besar dari dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA). Semuanya ini dapat dijadikan modal dasar untuk menggerakkan pembangunan Kutim.

#### **4.4. MISI MEMBANGUN KUTIM 2021-2026**

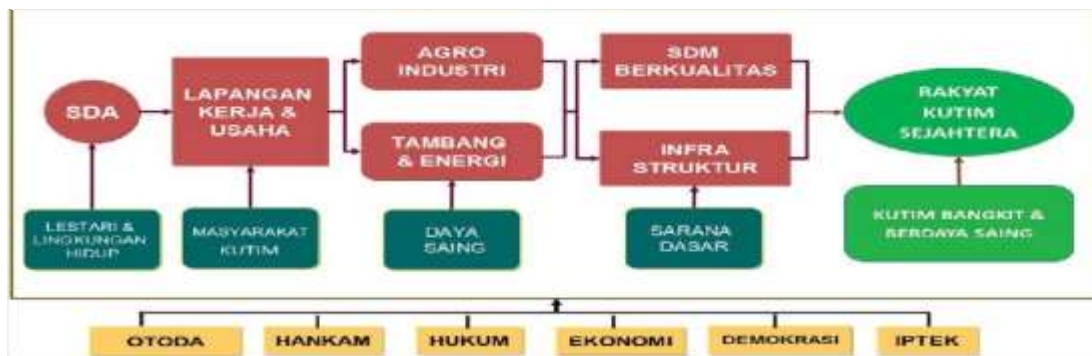
Bila visi untuk Kutim Bangkit 2026 memberikan gambaran menyeluruh tentang ke mana Kutim mau dibawa di masa depan, misi mengungkapkan komitmen organisasi untuk mengidentifikasi, menangkap, dan memberikan nilai setinggi mungkin kepada pelanggan (Robbins & Coulter, 2018:653). Misi bisa juga merupakan kumpulan tujuan organisasi yang mengidentifikasi tujuan dari organisasi, yang dasarnya kompetisi, dan keunggulan kompetitif (Dess, *et al.* 2019). Untuk menunjang visi yang telah diuraikan pada sub bab 4.3, maka misi dapat dijabarkan dalam Tabel 27 berikut.

Visi dan misi dapat dijabarkan ke dalam Grand Desain Kutim Bangkit 2021-2026. Grand desain ini merupakan model untuk membangun Kutim yang terdiri beberapa aspek penunjang untuk mewujudkan cita-cita Kutim bangkit dan berdaya saing yaitu menjadi daerah yang masyarakatnya sejahtera. Aspek tersebut adalah kelestarian lingkungan hidup, masyarakat Kutim, daya saing, dan sarana dasar (lihat Gambar 26).

**Tabel 27. Misi Membangun Kabupaten Kutim 2021-2026**

1	Menurunkan angka kemiskinan melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri.
2	Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui UMKM secara berkeadilan.
3	Mempercepat pembangunan desa tertinggal untuk mencapai pemerataan pendapatan dan wilayah.
4	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dengan membuka lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran.
5	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih dengan "digital government" dan <i>zero tolerance on corruption</i> .
7	Memberdayakan pemuda Kutim yang kreatif, inovatif dan adaptif melalui pemanfaatan platform digital sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan daerah.
8	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan ekonomi untuk memperlancar arus barang, jasa, orang.
9	Menciptakan iklim investasi yang kondusif yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

**Gambar 26. Grand Desain Kutim Bangkit 2021-2026**





Upaya melestarian lingkungan hidup dilakukan dengan cara optimalisasi dan rehabilitasi sumberdaya alam yang terdapat di Kutim dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Kecenderungan yang terjadi adalah penggunaan dan produksi SDA meningkat, namun *supply*-nya justru mengalami penurunan dan tidak ada upaya rehabilitasi. Kemudian untuk aspek masyarakat Kutim dilakukan upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pengembangan usaha agroindustri dan tambang, baik itu skala kecil, menengah, maupun besar. Aspek daya saing akan dikembangkan, terutama dalam kerangka kegiatan agroindustri. Karena, bidang ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Kutim. Untuk mendukung itu diperlukan sarana dasar. Sarana dasar yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai.

Semua aspek di atas harus dikembangkan secara bersamaan dalam ruang lingkup otonomi daerah, hankam, hukum, ekonomi, demokrasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dengan model tersebut, pembangunan Kutim dapat dilaksanakan secara tepat dan efisien. Di era otonomi daerah sekarang ini, muncul peluang emas dalam hal pembangunan daerah. Ada peluang membangun tanpa tergantung pada pendekatan sentralistik. Namun perlu diperhatikan bahwa otonomi daerah itu mengandung hak dan kewajiban. Jadi, hal terpenting adalah pengembangan amanat otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tanggung jawab yang besar.

Dalam konteks pembangunan daerah, ada beberapa tujuan yang harus dicapai dan harus berhasil diwujudkan. Pertama, aparat pemerintah harus benar-benar bisa melayani dan mengayomi rakyat (hankam) dengan baik. Kedua, penegakan hukum harus diterapkan tanpa tebang pilih. Ketiga, dapat melaksanakan pemerataan pembangunan ekonomi agar kesenjangan antargolongan pendapatan dan antardaerah harus dapat diatasi. Keempat, limpahan sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kelima, mewujudkan demokratisasi yang sehat. Jadi, daerah itu harus memiliki infrastruktur politik yang lengkap dan partisipasi aktif rakyat Kutim. Keenam, iptek harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah Kutim.

## BAB 5

# STRATEGI MEMBANGUN KUTIM

**M**erujuk pada potensi ekonomi dan isu strategik, Kutim memiliki potensi luar biasa berupa sumber daya alam. Potensi yang besar itu, kalau saja dikelola dengan baik, mestinya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, Kutim memerlukan seorang pemimpin yang cakap dan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Seorang pemimpin Kutim ke depan seharusnya memiliki visi “Kutai Timur Maju, Berdaya Saing dan Berbasis Agribisnis (Gerdabangagri Jilid-II)”. Visi ini merupakan keberlanjutan dari keberhasilan pembangunan Kutim dalam era Bupati Awang Faroek Ishak periode 1999-2003 dan 2006-2008.

Gerdabangagri merupakan akronim dari gerakan daerah pembangunan agribisnis. Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Kutim sebagai Sentra Agribisnis yang berbasiskan potensi SDA Kutim. Pada Gerdabangagri Jilid 2 ini diarahkan untuk membangun agroindustri melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Potensi utama yang dapat dikembangkan dalam kawasan ekonomi ini adalah pembangunan industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan kayu. Keberhasilan pengembangan KEK ini sangat tergantung dengan iklim investasi. Oleh sebab itu, regulasi yang dibuat haruslah diarahkan untuk mempermudah investor, khususnya bagi rakyat Kutim untuk terlibat dalam penanaman modal kebun dan ikut terlibat dalam kepemilikan saham baik di sektor hulu dan hilir. Pembangunan KEK ini hanya akan berhasil apabila investor lokal, nasional, dan luar negeri terlibat di dalam membangun Kutim yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Dengan begitu, seluruh masyarakat Kutim akan menikmati hasil-hasil pembangunan daerah.

Pada sektor pertambangan, para pelaku bisnis tetap dapat terus melakukan aktivitas penambangan. Namun, lahan-lahan yang direklamasi haruslah diserahkan kepada karyawan berupa kaveling tanah yang dengan luasan yang layak dan diberikan saham sehingga mereka tidak perlu pergi setelah tambang habis. Untuk itu, kepala daerah kabupaten ini di masa mendatang harus membuat peraturan daerah dan peraturan bupati yang mendukung program tersebut.

Visi besar dari Gerdabangagri dapat dicapai dengan menyusun rencana strategi dan program aksi yang tepat. Bab 5 ini akan menjabarkan strategi berbasis pendekatan sektoral, spasial, dan manusia. Terdapat tiga strategi pembangunan yang akan dilakukan, yaitu pembangunan yang berbasis sektoral, spasial, dan manusia. Pembangunan dengan pendekatan sektoral dalam perencanaan pembangunan menyangkut sektor unggulan dan potensial apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Pendekatan sektoral ini menekankan pada berapa banyak barang dan jasa yang perlu diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, kapan harus diproduksi, dan bagaimana memasarkan hasil produksi. Selanjutnya ditentukan di mana aktivitas tersebut dijalankan. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk keterkaitan (*lingkaged*) antar sektor sehingga memberikan *multiplier effect* kepada seluruh sektor ekonomi. Pembangunan yang hanya berfokus pada aspek sektoral semata akan menyebabkan ketimpangan sektoral di Kutim.

Dengan demikian, pembangunan sektoral saja tidak cukup, pembangunan juga harus memperhatikan aspek spasial dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya daerah baik di kecamatan maupun desa bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Keberhasilan pembangunan berbasis spasial membutuhkan pengaturan bersama antara pemerintah daerah dengan partisipasi seluruh masyarakat. Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan masyarakat.

Pendekatan berbasis manusia (*people centered development*) berkeyakinan bahwa pembangunan tidak akan berkesinambungan apabila tidak diikuti dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Rakyat Kutim haruslah dipandang bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dari pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan manusia memainkan peranan kunci dan menjadi pengarusutamaan dalam pembangunan jangka panjang Kutim. Upaya ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan SDM juga menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing manusia dan ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian dunia. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, masyarakat Kutim menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.

Ketiga strategi ini saling terkait satu dengan lainnya. Apabila pembangunan bias terhadap salah satunya, makanya akan memunculkan persoalan sosial-ekonomi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ketiga pendekatan tersebut akan dilaksanakan secara terintegrasi. Selanjutnya, setelah menetapkan visi dan strategi. Langkah penting terakhir yang perlu dilakukan adalah menentukan rencana program aksi. Visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi tanpa visi yang jelas hanyalah sekedar aktivitas. Dalam banyak kasus, visi dan aksi yang terpadu dapat mengubah dunia. Dalam hal ini, visi, strategi, dan program aksi yang disampaikan dalam buku ini akan membawa Kutim menjadi lebih maju.

## 5.1. PENDEKATAN SEKTORAL

Pada intinya, pendekatan sektoral memperhatikan dan memprioritaskan subsektor kunci. Struktur ekonomi Kutim saat ini masih berbasis (1) pertambangan dan penggalian, (2) pertanian, kehutanan dan perikanan, dan (3) industri pengolahan. Sektor-sektor tersebut juga diperkirakan masih menjadi tumpuan utama ekonomi Kutim hingga beberapa tahun ke depan. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian saat ini mencapai lebih dari 80 persen PDRB Kutim. Sebagai sumberdaya tak terbarui, tambang, minyak, dan batubara tersebut suatu saat akan habis.

Dengan terbatasnya sumberdaya tak terbarui yang selama ini menjadi andalan penopang struktur ekonomi Kutim, Kutim harus segera mempersiapkan alternatif baru untuk menjadi “lokomotif ekonomi” yang berbasis pada sumberdaya terbarui (*renewable resources*) yang sangat potensial, yaitu agribisnis. Oleh karena itu, berbagai upaya percepatan pembangunan agribisnis perlu dilakukan sesegera mungkin dan terencana agar saat sektor pertambangan mulai menurun, sektor agribisnis sudah siap menopang ekonomi Kutim.

Program revitalisasi pertanian harus menjadi basis penguatan sektor pertanian. Revitalisasi pertanian sebagai bagian dari pengembangan agribisnis dapat mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali dan membangun komitmen tentang arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan daerah. Revitalisasi ini dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-jobs* (lihat Gambar 27).

Gambar 27. Pendekatan *Tripple Track Strategy* untuk Revitalisasi Pertanian



Sumber: Kuncoro (2008)

Dalam program revitalisasi pertanian, perlu dikembangkan suatu sistem dan usaha agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani dan subsistem agribisnis hilir, perlu dibantu atau ditopang oleh suatu sistem penunjang (lihat Gambar 28). Sistem penunjang ini terdiri dari perkreditan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan penyuluhan, transportasi dan pergudangan, dan kebijakan pemerintah. Dengan sistem yang terintegrasi diharapkan lebih mendukung perkembangan agribisnis.

Pada subsistem hulu, agribisnis sudah mulai berkembang, tetapi belum sampai pada tingkat yang optimal untuk mendorong pertumbuhan bisnis perdesaan karena masih ada berbagai aspek yang belum tergarap dengan baik, seperti bibit, pupuk, dan pakan ternak yang merupakan input pertanian.

**Gambar 28. Integrasi Sistem dan Usaha Agribisnis**



Sumber: Kuncoro (2008)

Pada subsistem usaha tani, usaha yang dimiliki biasanya masih bersifat tradisional. Hal penting yang perlu dioptimalkan di subsistem ini adalah manajemen usaha tani. Manajemen usaha tani harus diperbaiki dan ditingkatkan efektivitasnya untuk mengembangkan agropolitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang menitikberatkan pada peningkatan hasil. Pada subsistem hilir, pertumbuhan industri pengolahan perlu dipercepat agar semua produk dapat tersedia dengan baik. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung industri pengolahan, pemasaran, dan perdagangan sehingga dapat berkembang secara simultan.

Integrasi sistem dan usaha agribisnis bertujuan untuk mendorong dan memantapkan kemandirian pangan di seluruh wilayah Kutim. Dengan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan lokal yang mampu mencukupi kebutuhan penduduk setempat, terutama kebutuhan pangan pokok seperti padi. Untuk itu pemerintah daerah perlu membuat kebijakan intensifikasi dan

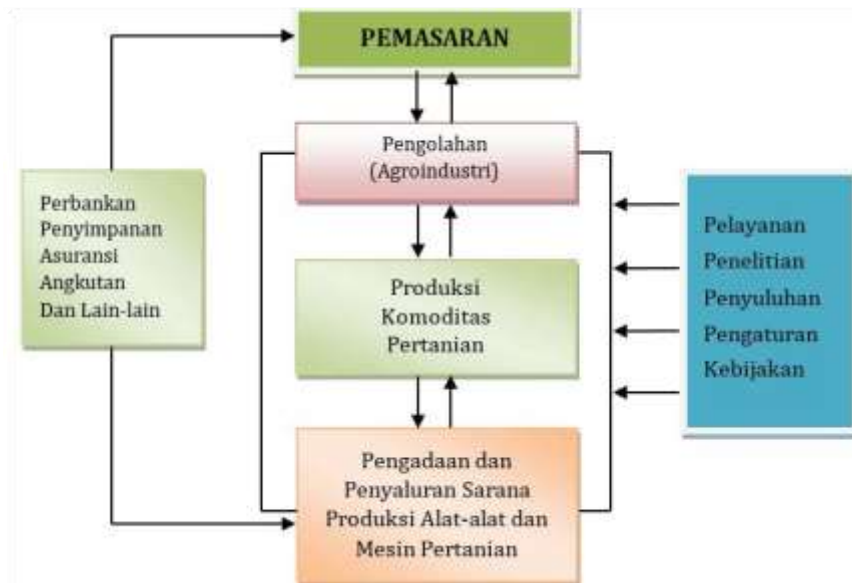
ekstensifikasi pertanian utama. Melalui upaya ini diharapkan dapat menggenjot produktivitas sektor pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan kemandirian pangan.

Untuk mendukung perkembangan ketiga subsistem tersebut, maka diperlukan subsistem penunjang antara lain berupa lembaga keuangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan penyuluhan, transportasi dan pergudangan, dan kebijakan pemerintah. Semuanya merupakan aspek pendukung yang harus dimanfaatkan dengan secara optimal. Sebagai contoh, pemanfaatan lembaga keuangan yang ada di desa selama ini masih kurang, padahal perannya sangat potensial. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dioptimalkan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga harus disesuaikan dengan perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan pasar sehingga pengetahuan dapat ditingkatkan dan dapat melihat peluang bisnis dengan berbagai inovasi dan modifikasi yang kreatif.

Setelah suatu sistem usaha disusun, pendekatan pembangunan pertanian harus ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan bisnis, dengan demikian aspek usaha dan pendapatan menjadi dasar pertimbangan utama. Pembangunan pertanian bukan semata pembangunan sektoral, namun juga terkait dengan sektor lain (lintas-sektoral). Pembangunan pertanian bukan hanya pengembangan komoditas secara parsial, melainkan sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya perdesaan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendapatan petani. Oleh karena itu, pemerataan melalui percepatan pembangunan ekonomi, terutama agribisnis diharapkan dapat mengurangi urbanisasi dan pengentasan kemiskinan (lihat Gambar 29).

Revitalisasi perkebunan harus menjadi bagian integral dari pengembangan agribisnis Kutim. Perkebunan diharapkan menjadi basis industri unggulan di masa depan. Produksi kelapa sawit Indonesia dan Malaysia mencapai 85% produksi dunia. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai 14.73 juta ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas 6,04 juta ha (41%), Perkebunan Besar Negara seluas 0,65 juta ha (4,43%) dan Perkebunan Besar Swasta seluas 8,04 juta ha (54.57%).

**Gambar 29. Pendekatan Aksi Pengembangan Agribisnis**



Sumber: Kuncoro (2008)

Strategi pengembangan kelapa sawit yaitu pemberdayaan di hulu dan memperkuat di hilir, untuk itu diperlukan dukungan organisasi *sawit board*. Peranan pemerintah sebagai pendorong terjadinya integrasi kegiatan *on-farm* dan *off-farm* serta mengembangkan sistem mekanisme risiko dan ketidakpastian. Dalam jangka pendek pengembangan industri hilir kelapa sawit diarahkan kepada produk *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel Oil (PKO)*, abu Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), pulp kertas, pakan ternak, *Medium Density Fibreboard (MDF)*, jok mobil/kasur, arang aktif, olein, stearin, pupuk cair, asam lemak, sabun dan deterjen, minyak goreng, margarin, *shortening*, vanaspati, minyak pelumas. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, pengembangan industri hilir diarahkan pada pengembangan produk bio-diesel, vitamin A, vitamin E, alkohol, sulfat, alkohol etoksilat, aditif plastik dan karet, alkanolamida (kosmetika), polihidroksobutirat (bio-plastik), emulsi pangan *grade* tinggi, tinta, agrosida, dan lain-lain.

Di dalam rencana strategis Dinas Pertanian Kutim disebutkan bahwa upaya untuk mengoptimalkan peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian dilakukan melalui beberapa strategi pemantapan dan pengembangan komoditi dan produk hasil pertanian dan peternakan. Strategi ini dicapai melalui kebijakan yang mendorong implementasi konsep *One Village One Product (OVOP)*



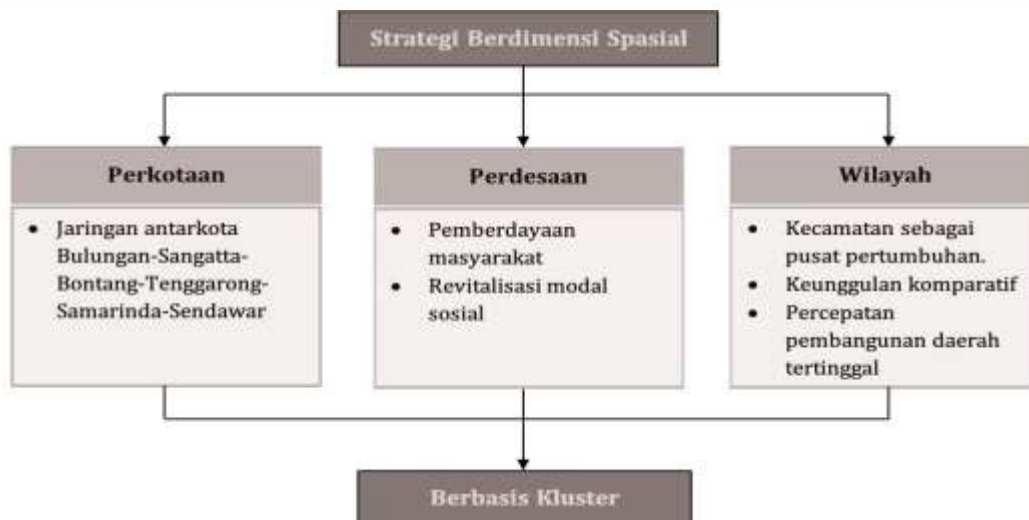
melalui pengembangan komoditi potensial/unggulan berdasarkan karakteristik wilayah. Sayangnya dalam dokumen rencana strategis tersebut tidak disebutkan apa saja strategik unggulan dan potensial sektor pertanian yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian daerah.

## 5.2. PENDEKATAN SPASIAL

Pendekatan sektor unggulan perlu dikombinasikan dengan identifikasi di mana lokasi yang memiliki sektor unggulan. Strategi berdimensi spasial Kutim perlu menitikberatkan pada strategi pengembangan perkotaan, perdesaan, dan wilayah (lihat Gambar 30). Pada gilirannya, ketiga strategi ini bermuara pada strategi pengembangan kawasan berbasis kluster.

Pengembangan ekonomi wilayah secara spasial sangat tergantung kepada inisiator yang menggerakkan. Pengembangan kawasan juga sebaiknya berbasis komunitas, mengingat di masa yang akan datang masyarakat harus dapat diberdayakan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mengembangkan kawasan bisnis. Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan harus dapat menguatkan posisinya sebagai daerah sentra produk tertentu dan dapat menarik banyak investasi, maupun meningkatkan pendapatan bagi daerah.

**Gambar 30. Strategi Pengembangan Berdimensi Spasial**



### 5.2.1. Jaringan Bulungan-Sangatta-Bontang-Tenggarong-Samarinda-Sendawar

Pembangunan jaringan antarkota menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan mengakselerasi pembangunan. Jaringan Bulungan-Sangatta-Bontang-Tenggarong-Samarinda-Sendawar yang telah diinisiasi sejak tahun 2002 perlu dikembangkan realisasinya. Pembangunan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan jaringan Bulungan-Sangatta-Bontang-Tenggarong-Samarinda-Sendawar (lihat Gambar 31) adalah dengan mengembangkan jaringan transportasi massal seperti kereta api penumpang, jalan bebas hambatan, sistem angkutan untuk batubara, dan jaringan telekomunikasi.

**Gambar 31. Jaringan Tenggarong-Samarinda-Balikpapan**



### 5.2.2. Pengembangan Kawasan Agribisnis

Pengembangan kawasan agribisnis merupakan alternatif solusi yang tepat dalam pembangunan spasial berbasis komoditas unggulan dan potensial masing-masing desa atau kecamatan di Kutim. Strategi ini perlu didukung oleh infrastruktur pertanian yang berdasarkan kluster wilayah.

Tabel 28 menunjukkan kawasan pengembangan tanaman pangan berdasarkan kecamatan. Sebagian besar kecamatan di Kutim berpotensi untuk mengembangkan komoditas padi sawah, padi ladang, dan jagung. Komoditas kedelai dapat

dikembangkan di Kecamatan Kaliorang, Kaubun, Kongbeng, Karang, Batu Ampar, Busang, dan Rantau Pulung. Kecamatan Kaliorang, Kongbeng, dan Busang memiliki peluang untuk mengembangkan komoditas kacang tanah. Komoditas kacang hijau dapat dikembangkan di Kongbeng. Untuk komoditas palawija dapat dikembangkan di Teluk Pandan dan Sangatta Selatan. Kecamatan Rantau Pulung dapat difokuskan untuk memproduksi singkong.

**Tabel 28. Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan**

No	Kecamatan	Komoditi
1	Sangkulirang	Jagung, padi sawah, padi ladang
2	Kaliorang	Padi sawah, kedelai, kacang tanah, padi ladang, jagung
3	Muara Bengkal	Padi sawah, padi ladang
4	Long Mesangat	Padi sawah, padi ladang
5	Kaubun	Padi sawah, padi ladang, kedelai
6	Bengalon	Kedelai, padi ladang, jagung
7	Telen	Padi ladang, padi sawah
8	Sangatta Utara	Jagung
9	Sandaran	Jagung, padi ladang
10	Muara Wahau	Padi sawah, padi ladang, jagung
11	Kongbeng	Padi ladang, padi sawah, jagung, kedelai, kac. Tanah, kac. Hijau
12	Karang	Padi sawah, padi ladang, kedelai, jagung
13	Batu Ampar	Kedelai, padi ladang
14	Busang	Padi ladang, kedelai, jagung, kac. Tanah
15	Muara Ancalong	Padi ladang
16	Teluk Pandan	Padi Sawah, palawija
17	Sangatta Selatan	Padi Sawah, palawija
18	Rantau Pulung	Padi Sawah, Padi Ladang, Kedelai, Jagung, singkong

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kutim (2018)

Stategi spasial untuk komoditas peternakan dapat dilihat pada Tabel 29. Terdapat beberapa bisnis peternakan unggulan dan potensial yang dapat di Kutim, yaitu sapi potong, sapi perah, babi, kambing, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras, dan itik. Peternakan sapi potong dapat dikembangkan di Kecamatan Rantau Pulung, Kaliorang, Long Mesangat, Muara Wahau, Kongbeng, Sangkulirang, Muara Bengkal, dan Muara Wahau. Usaha peternakan sapi perah dapat dikembangkan di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.

**Tabel 29. Perwilayahan Komoditas Peternakan**

No.	Jenis Ternak	Kecamatan
1	Sapi Potong	Rantau Pulung, Kaliorang, Long Mesangat, Muara Wahau, Kongbeng, Sangkulirang, Muara Bengkal, Muara Wahau
2	Sapi Perah	Sangatta Utara, Sangatta Selatan
3	Babi	Busang, Kongbeng, Muara Wahau, Long Mesangat
4	Kambing	Kaliorang, Kaubun
5	Ayam Pedaging	Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Teluk Pandan
6	Ayam Petelur	Teluk Pandan, Sangatta Selatan
7	Ayam Buras	Kaliorang, Sangatta Selatan, Bengalon
8	Itik	Kaubun, Kaliorang

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kutim (2018)

Kecamatan yang berpotensi untuk mengembangkan ternak babi adalah kecamatan Busang, Kongbeng, Muara Wahau, dan Long Mesangat. Untuk komoditas kambing dapat dternakan di Kecamatan Kaliorang dan Kaubun. Pertenakan ayam pedaging dapat dikembangkan di Sangatta Selatan, Sangatta Utara, dan Teluk Pandan. Ayam petelur dapat dikembangkan di Kecamatan Teluk Pandan dan Sangatta Selatan. Aya, buras berpotensi dternakan di Kecamatan Kaliorang, Sangatta Selatan, dan Bengalon. Sementara itu, untuk peternakan itik dapat dikembangkan di Kecamatan Kaubun dan Kaliorang.

### 5.2.3. Pembangunan Wilayah Tertinggal

Dimensi spasial juga perlu ditekankan dalam reorientasi strategi untuk membangun wilayah tertinggal. Pendekatan kluster bagi pengembangan bisnis di daerah merupakan tren yang banyak dianut di berbagai negara. Masalah ketertinggalan sering kali terjadi karena mayoritas kelurahan/desa masih termasuk kawasan perdesaan. Desa, yang jauh dengan keramaian dan hiburan, umumnya masih tertinggal dalam berbagai jenis infrastruktur sehingga dapat dipahami bila kantong-kantong kemiskinan umumnya berada di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, strategi pembangunan perdesaan tampaknya perlu diintegrasikan dengan strategi pengembangan kota, dengan mengembangkan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkage*) dan jejaring antarkota (*network cities*).

Pembangunan wilayah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan wilayah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan. Di samping itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan dari pemerintah.

Dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal diperlukan daya dorong yang tinggi (*big push*). Daya dorong yang tinggi dapat diartikan sebagai modal dan infrastruktur untuk mengakselerasi pembangunan. Aksesibilitas modal dan keberpihakan kepada daerah tertinggal merupakan langkah strategik. Pengembangan struktur ekonomi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan pusat-pusat bisnis dan jejaring internasional perlu menjadi prioritas (lihat Gambar 32).

**Gambar 32. Visi dan Strategi Pembangunan Wilayah/Desa Tertinggal Kutim**

<p>"Terwujudnya wilayah tertinggal sebagai wilayah dengan masyarakat yang maju dan setara dengan wilayah lain di Indonesia"</p>			
<p>Sasaran Jangka Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya jumlah desa tertinggal</li> <li>• Turunnya indeks kemiskinan di wilayah tertinggal</li> <li>• Berkurangnya wilayah terisolasi</li> <li>• Meningkatnya pendapatan penduduk</li> <li>• Tercapainya rehabilitasi dan pemulihan</li> </ul>			
<p>Pembangunan Ekonomi Lokal</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Pengembangan Sarana Prasarana</p>	<p>Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat keterampilan</li> <li>• Tingkat modal sosial</li> <li>• Tingkat akses pasar</li> <li>• Menghubungkan wilayah tertinggal dengan pusat-pusat</li> <li>• Kerjasama ekonomi antardaerah</li> <li>• Kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan sosial</li> <li>• Keterampilan masyarakat</li> <li>• Pengelompokan pemukiman</li> <li>• Penegakan hukum pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan aksesibilitas</li> <li>• Telekomunikasi</li> <li>• Air bersih</li> <li>• Listrik</li> <li>• Pengolahan hasil pertanian</li> <li>• Kesehatan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana sosial ekonomi yang rusak</li> <li>• Harmonisasi antarkelompok</li> <li>• Penghijauan</li> <li>• Bangunan tahan bencana</li> <li>• Deteksi dini</li> </ul>

Sumber: Kuncoro (2008)

Pembangunan wilayah tertinggal perlu lebih difokuskan pada percepatan pembangunan yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan, aksesibilitas, dan ketersediaan infrastrukturnya masih tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut umumnya terdapat pada wilayah yang secara geografis terisolasi, hulu, terpencil, serta wilayah rawan bencana.

### 5.3. PENDEKATAN MANUSIA

Penekanan investasi pada manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Tanah, tenaga kerja, dan modal fisik bisa saja mengalami *diminishing return*, namun tidak demikian dengan pengetahuan. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial.

Alternatif lain dari strategi pembangunan adalah apa yang disebut sebagai *people-centered development* atau *putting people first* (Korten, 1981:201). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumberdaya yang paling penting. Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu: kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Dengan luas wilayah Kutim yang relatif luas dan kepadatan penduduk yang jarang (hanya 20 orang per km<sup>2</sup>) ketersediaan tenaga kerja di Kutim sangat langka. Selain kelangkaan tenaga kerja, kelangkaan SDM yang bermutu juga menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan dalam pembangunan. Dengan kata lain, upaya mengatasi kelangkaan tenaga kerja seperti mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, penerapan teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan Kutim. Demikian juga untuk meningkatkan mutu SDM di perdesaan melalui penyuluhan, *training*, magang perlu dijadikan sebagai bagian dari pembangunan di Kutim.

Peningkatan mutu SDM Kutim mencakup 5 aspek, yakni peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan akhlak dan agama, peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan aparatur pemerintah, dan kependudukan (lihat Gambar 33). Kelima aspek ini harus dilakukan secara simultan sebagai syarat peningkatan kualitas SDM Kutim yang sesuai dengan arah pembangunan SDM Kutim ke depan.

**Gambar 33. Cakupan Pembangunan SDM Kutim**



Pembangunan SDM lebih ditekankan pada pembangunan ketenagakerjaan dan aparatur pemerintah. Di samping itu, pengembangan dari sisi agama dilakukan dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan. Karena dengan moral dan akhlak yang mulia, karakter bangsa dapat diciptakan. Pengembangan dalam bidang agama mutlak dilakukan mengingat prestasi Kutim sebagai juara dalam dugaan kasus korupsi yang dilakukan pejabat setempat. Agama sebagai sebuah instrumen pembentukan karakter harus mampu mengurangi munculnya karakter masyarakat yang negatif.

Arah pembangunan SDM Kutim dilatar belakangi oleh gambaran masa depan yang akan dihadapi oleh Kutim seperti persaingan yang ketat, perubahan cepat, makin tingginya ketidakpastian, era globalisasi dengan kualitas dan informasi yang makin mutakhir, dan munculnya tatanan dunia baru dengan pasar bebasnya (lihat Gambar 34). Arah pembangunan SDM Kutim harus mampu menyiapkan dan menjawab gambaran masa depan ini sehingga pembangunan SDM adalah syarat utama Kutim bangkit sebagai keunggulan kompetitif. Kutim masa depan adalah Kutim yang mampu mewujudkan masyarakat yang berdaya saing (kompetitif), berkeadilan dan sejahtera, ditunjang oleh pemerintahan yang amanah dengan memanfaatkan sumberdaya alam lestari serta jaringan berbasis teknologi.

Gambar 34. Arah Pembangunan SDM Kutim





[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

## BAB 6

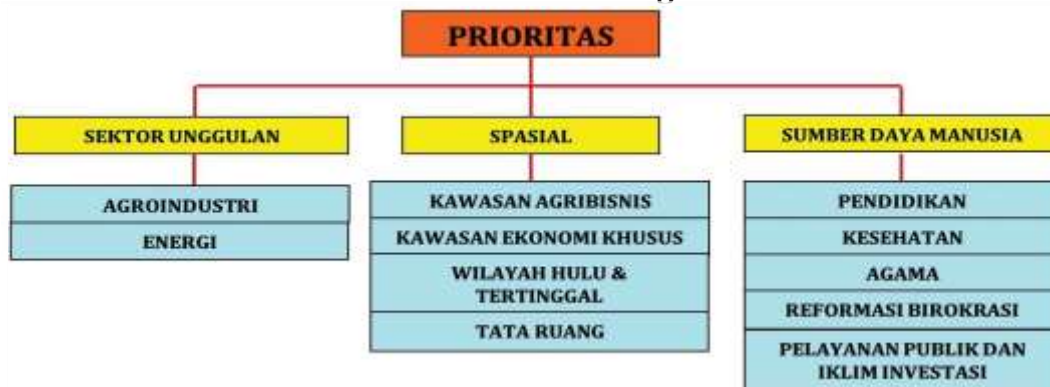
# PROGRAM AKSI

Sebagai langkah kongkret untuk mencapai visi, misi, dan strategi perlu disusun serangkaian program aksi yang komprehensif. Program aksi disusun berdasarkan tiga pendekatan strategi yang telah dijelaskan sebelumnya yakni pendekatan sektoral, spasial, dan manusia. Bab ini akan memaparkan program-program aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai Kutim Bangkit 2026.

Secara ringkas, arah pembangunan Kutim bangkit 2026 perlu diprioritaskan pada tiga strategi, yaitu strategi pengembangan sektor unggulan, pembangunan berbasis spasial, dan pembangunan sumber daya manusia (lihat Gambar 35). Sektor unggulan di Kutim meliputi pertambangan-penggalian, pertanian-kehutanan-perikanan dan industri pengolahan. Pembangunan sektor unggulan dilakukan dengan cara pengembangan agroindustri dan energi terbarukan.

Salah satu cara pengembangan agroindustri adalah dengan irigasi. Dengan adanya pembangunan irigasi, diharapkan lahan pertanian dan perkebunan tidak mengalami gagal panen karena kekeringan. Kemudian, hal yang harus diprioritaskan adalah revitalisasi pertanian dalam arti yang luas. Jadi diharapkan hasilnya adalah petani yang modern, tidak jorok, tidak bau, penghasilannya besar, serta anak-anaknya berpendidikan tinggi. Ke depannya diharapkan pula petani Indonesia akan sama dengan petani-petani dari negara lain seperti Thailand, Taiwan, dan Korea.

**Gambar 35. Prioritas Pembangunan Kutim**



## **6.1. PROGRAM PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN**

Untuk mewujudkan Kabupaten Kutim sebagai sentra agroindustri dan energi terkemuka yang didukung sistem ketahanan pangan yang kuat, dan memperhatikan kewenangan pemerintah kabupaten, diusulkan program aksi sebagai berikut: (1) peningkatan sarana prasarana pertanian perkebunan dan perikanan; (2) perluasan areal tanam; (3) peningkatan mutu produk; (4) pengolahan pasca panen; (5) sertifikasi produk; dan (6) pembangunan gerai produk dan (7) optimalisasi potensi pertambangan sebagai input energi.

### **6.1.1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Perkebunan dan Perikanan**

Strategi peningkatan sarana prasarana pertanian perkebunan dan perikanan, merupakan landasan yang diperlukan untuk mencapai produktifitas hasil-hasil pertanian dan subsektornya. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan, mulai dari level rumah tangga (Rumah Tangga Mandiri Pangan), level desa (Desa Mandiri Pangan), level kecamatan (Kecamatan Mandiri Pangan), dan level kabupaten (Kabupaten Mandiri Pangan). Kemandirian pangan yang dikembangkan berbasis pada keanekaragaman bahan pangan lokal, kelembagaan pangan lokal, dan keragaman budaya pangan.

Pembangunan ketahanan pangan akan dilakukan dengan serangkaian program meliputi: (1) penyediaan saran produksi pertanian; (2) pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman; (3) pengembangan tanaman hortikultura; (4) penyediaan sarana produksi perkebunan; dan (5) dukungan khusus untuk peningkatan produksi padi, jagung, bawang dan cabai.

### **6.1.2. Program Perluasan Areal Tanam**

Program ini akan fokus pada langkah-langkah ekstensifikasi lahan pertanian dan perkebunan produktif serta penggunaan teknologi tepat guna untuk memaksimalkan output hasil pertanian dan perkebunan. Beberapa langkah yang akan dilakukan, antara lain (1) pembukaan area-areal pertanian dan perkebunan potensial; (2) pendataan dan identifikasi lahan tidur; (3) penerapan teknologi dan budidaya pertanian modern yang ramah lingkungan; dan (4) pemanfaatan media tanam secara efisien.

### 6.1.3. Program Pengolahan Pasca Panen

Pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap sesuatu komoditi hasil pertanian segera setelah komoditi tersebut dipanen. Pentingnya penanganan pasca panen disebabkan beberapa faktor antara lain bahwa komoditas pangan masih merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat, komoditas pangan tidak terbatas hanya pada padi saja, tetapi mencakup produk-produk lainnya dan beberapa teknologi penanganan pasca panen komoditi pangan telah banyak dilakukan masyarakat.

Tujuan utama dari pengolahan pasca panen adalah mencegah susut bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing dan mencegah kerusakan fisik. Penyimpanan pada pascapanen berperan penting dalam mempertahankan kualitas hasil pertanian. Selain itu juga, program ini dimaksudkan untuk memperoleh nilai tambah (*value added*) hasil-hasil pertanian dan perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Para petani harus diarahkan, tidak hanya sebagai produsen namun juga sebagai pemasok pasar dalam suatu skema *Farm-Gate Marketing System (FGMS)*. Dalam konteks ini, keberadaan Gapoktan harus menjadi basis dan landasan peningkatan nilai tambah, posisi tawar dan peningkatan pendapatan. Untuk itu, para petani akan didukung oleh kebijakan integrasi jaringan pemasaran yang kuat, baik pada level lokal, wilayah maupun nasional. Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi penambangan sistem agribisnis dan agroindustri sekaligus sebagai sistem pendukung industri pengolahan komoditas pertanian dan perkebunan di Kutim.

### 6.1.4. Program Sertifikasi Produk

Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Beberapa tujuan diberlakukannya SNI antara lain adalah untuk menjamin perlindungan konsumen, tenaga kerja yang membuat produk, dan masyarakat dari aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Kegiatan sertifikasi ini dilakukan oleh Lembaga sertifikasi produk (LsPro), yang merupakan lembaga pemerintah maupun swasta yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memastikan standar mutu

produk atau barang. LsPro memiliki peran dalam menunjang kebijakan pemerintah untuk pemberlakuan SNI wajib yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan lingkungan.

Pentingnya pemberian sertifikasi produk, khususnya bagi produksi hasil olahan sektor pertanian dan perkebunan di Kutim, menjadi syarat mutlak untuk memajukan ekonomi rakyat Kutim. Selain itu juga, hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan UMKM di Kutim, sehingga memiliki daya saing dan dapat mendorong pendapatan guna perbaikan kesejahteraan masyarakat Kutim.

#### **6.1.5. Program Pengembangan Gerai Produk Agroindustri**

Sebagai upaya komprehensif untuk mendukung peningkatan performa UMKM, khususnya yang berbasis pada kegiatan ekonomi berbasis agribisnis dan agroindustri, program pengembangan gerai produk agroindustri adalah salah satu langkah terobosan untuk membantu proses pemasaran produk agroindustri. Program ini akan dilakukan dengan beberapa langkah taktis seperti; (1) pengembangan pasar hasil pertanian dan perkebunan; (2) promosi dan peningkatan hasil produksi; (3) pengembangan kawasan pemasaran produk hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu; dan (4) pemanfaatan platform digital untuk menunjang pemasaran dan kemudahan bertransaksi bagi para konsumen.

#### **6.1.6. Program Ketahanan Energi**

Salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan berkelanjutan adalah ketersediaan energi, selain pangan, air dan infrastruktur pendukungnya. Pembangunan ketahanan energi merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menuju Kutim sebagai pusat energi terkemuka. Potensi besar di bidang pertambangan menjadikan Kutim kaya akan input energi. Untuk dapat melaksanakan pembangunan energi yang berwawasan kemasyarakatan dan lingkungan hidup diperlukan keikutsertaan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam suatu kemitraan yang sinergis. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi yang berwawasan kemasyarakatan dan lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan perlu didasarkan pada empat faktor yaitu (Kusumastanto *et al.*, 2008): Pertama, *pemerataan* dan *keadilan* yakni pemanfaatan sumber daya energi diarahkan sebesar-besarnya guna mendukung kemakmuran rakyat. Konsep kemitraan dan eksistensi yang bersinergi antara kegiatan tradisional, skala kecil menengah dan skala besar perlu dikembangkan

sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat, dunia usaha dan pemerintah tentang arah, lingkup, ruang gerak dan tingkat keleluasaan dalam pelaksanaan pembangunan energi yang berwawasan kemasyarakatan dan lingkungan hidup.

Kedua, *pendekatan integratif*. Pelaksanaan pembangunan energi harus dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan yang terintegrasi, dengan memperhatikan daya dukung sosial, dan keberlanjutan fungsi-fungsi lingkungan hidup, keterpaduan seluruh sektor dalam pemanfaatan segenap potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia, optimasi dari seluruh potensi dari pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki secara merata dan berkeadilan dengan menerapkan atas konservasi sumber daya alam serta efisiensi dalam pengusahaannya.

Ketiga, *wawasan jangka panjang*. Sumber daya energi minyak bumi, gas dan batubara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui oleh karena itu eksploitasinya perlu dilaksanakan dengan asas efisiensi yang berlandaskan pada pencapaian nilai tambah yang maksimal. Pemanfaatan sumber daya alam ini harus didasarkan kepada wawasan keberlanjutan sehingga apabila sumber daya alam habis dieksploitasi tidak menimbulkan biaya sosial bagi generasi masa depan. Kegiatan pasca tambang harus dikembangkan berdasarkan dimensi ruang dan waktu sehingga 'reklasifikasi' dari kegiatan pemanfaatan energi menjadi kegiatan lainnya (industri, pertanian, pariwisata, dan lain-lain) dapat dikembangkan secara simultan.

Keempat, *menghargai keanekaragaman*. Sebagai daerah yang pluralistik, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi di Kutim harus dapat menghargai keanekaragaman sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi di sekitar wilayah kegiatan dan menjadikan pembangunan energi sebagai basis menuju kemandirian yang keberhasilannya sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut.

Potensi energi yang besar di Kutim harus disesuaikan dengan kebijakan energi nasional yang bertujuan: (1) meningkatkan kemampuan pasokan energi, (2) mengoptimalkan produksi energi, (3) konservasi sumber daya energi. Pemanfaatan energi sebagai sumber daya alam yang terbatas pun harus disesuaikan dengan cara efisiensi dalam pemanfaatannya atau melalui diversifikasi dalam penggunaan sumber energi. Selain berguna untuk penghematan, hal ini diharapkan mampu mendorong harga energi ke arah harga keekonomian untuk pengembangan energi namun tetap memberikan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Eksplorasi energi pun harus menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya agar dalam skala mikro dapat terjadi internalisasi eksternalitas dan dalam skala makro dapat mendukung terjadinya pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mendukung terciptanya pusat energi yang terkemuka diperlukan pembangunan infrastruktur energi, termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses konsumen terhadap energi, kemitraan pemerintah dan dunia usaha, pemberdayaan masyarakat, serta adanya pengembangan penelitian dan pengembangan (pendidikan dan pelatihan).

## **6.2. PROGRAM AKSI SPASIAL**

Dari perspektif pengembangan spasial, diusulkan program aksi untuk mewujudkan Kabupaten Kutim sebagai sentra agroindustri dan energi terkemuka yang didukung sistem ketahanan pangan yang kuat sebagai berikut: (1) Program Pembangunan Kawasan Agribisnis; (2) Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy (KEK Maloy); (3) Pembangunan Wilayah Hulu dan Tertinggal; dan (4) Manajemen Tata Ruang dan Pemekaran Wilayah.

### **6.2.1. Program Pembangunan Kawasan Agribisnis**

Pembangunan kawasan agribisnis akan dilakukan dengan serangkaian program meliputi: (1) program pengembangan usaha pembibitan tanaman pangan dan hortikultura (padi, palawija, sayuran dan buah-buahan); (2) program pengembangan usaha pembibitan tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, kakao); (3) program pemberian jaminan bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat petani secara keseluruhan untuk memiliki dan mengelola kebun sawit minimal 2 hektar per kepala keluarga (4) program pengembangan usaha pembibitan peternakan (unggas, sapi potong, domba/kambing, babi); (5) program pengembangan usaha pembibitan ikan dan akuakultur; (6) program pengembangan usaha alat dan mesin pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan (usaha pelayanan jasa alat dan mesin agribisnis, usaha bengkel alat dan mesin agribisnis, dan lain-lain); (7) program pengembangan jaringan teknologi agribisnis/akuabisnis; (8) program pengembangan produksi agribisnis/akuabisnis; (9) program pengembangan mutu sumberdaya manusia agribisnis dan sistem penyuluhan agribisnis; (10) program pengembangan sistem pengairan lahan kering, sawah, rawa, dan tambak; (11) program pengembangan subterminal dan terminal agribisnis serta pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, dan rumah pemotongan hewan; (12) program pengembangan koperasi dan usaha kecil-menengah agribisnis; (13) program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan petani; (14) program pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman/hewan/ikan; (15) program

pengembangan sistem manajemen mutu agribisnis; (16) program pengembangan kelembagaan dan usaha perkreditan agribisnis serta bantuan modal usaha.

Strategi pembangunan Kawasan Sentra Agribisnis (KSA) yang dimaksud adalah mengembangkan dalam satu kawasan secara simultan: (1) agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) seperti industri pembibitan/perbenihan, industri pupuk, industri pestisida, industri alat dan mesin pertanian; (2) usaha tani/ternak/ikan (*on-farm agribusiness*) baik sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan; (3) agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*), yakni industri-industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan, serta; (4) didukung oleh pengembangan infrastruktur lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, lembaga pembiayaan dan kebijakan daerah (*supporting system agribusiness*).

Kawasan sentra agribisnis yang akan dikembangkan adalah: (1) kawasan sentra agribisnis padi (*rice belt*); (2) kawasan sentra agribisnis palawija (*serelia belt*); (3) kawasan sentra agribisnis sayuran (*vegetable belt*); (4) kawasan sentra agribisnis buah-buahan (*fruits belt*); (5) kawasan sentra agribisnis kelapa sawit (*palm oil belt*); (6) kawasan sentra agribisnis kelapa (*coconut belt*); (7) kawasan sentra agribisnis karet (*rubber belt*); (8) kawasan sentra agribisnis lada (*pepper*); (9) kawasan sentra agribisnis kopi (*coffee*); (10) kawasan sentra agribisnis kakao (*cocoa belt*); (11) kawasan sentra agribisnis unggas (*poultry belt*); (12) kawasan sentra agribisnis sapi potong (*beef belt*); (13) kawasan sentra akuabisnis perikanan darat (*inland fishery belt*).

Setiap kawasan agribisnis yang dikembangkan bercirikan kerakyatan (melibatkan rakyat lokal) baik secara individu maupun bentuk koperasi, berdaya saing (mulai level lokal, nasional, internasional), dan berkelanjutan (secara ekonomi, sosial, ekologis). Kawasan-kawasan sentra agribisnis yang akan dikembangkan tersebut adalah agribisnis yang tidak hanya memiliki tingkat produksi yang besar tetapi juga menyerap tenaga kerja (petani) dalam jumlah yang besar.

### **6.2.2. Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy (KEK Maloy)**

Pembangunan KEK Maloy belum tuntas sehingga belum bisa beroperasi secara penuh. Sejumlah infrastruktur kawasan, sudah tersedia seperti jalan kawasan, jaringan air bersih (SPAM), kantor administrator, menara telekomunikasi, pos keamanan, gedung pemadam kebakaran dan gedung workshop.



Akibatnya, hingga saat ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaan operasional yakni antara lain seperti masih rendahnya minat investor, belum tuntasnya sertifikasi lahan 509,5 ha, belum tersedianya fasilitas kawasan seperti pintu gerbang, prasarana persampahan, pemadam kebakaran, belum ditentukannya nilai sewa lahan yang bisa menarik investor masuk KEK dan pembiayaan masih mengandalkan APBD Kutim. Selain itu juga, beberapa infrastruktur strategis seperti pembangkit listrik, bandara dan jalur kereta api.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang akan diambil ke depan adalah memastikan bahwa semua kendala-kendala yang ada, dapat diselesaikan dengan baik dengan melibatkan partisipasi dan kontribusi semua pihak secara kolektif. Beberapa kegiatan utama yang akan dilakukan antara lain; (1) pengadaan pembangkit listrik 90 megawatt; (2) permohonan pembangunan bandara kepada pemerintah pusat; dan (3) pembangunan jaringan kereta api untuk menunjang mobilitas manusia dan distribusi barang dari dan ke wilayah KEK.

### 6.2.3. Pembangunan Wilayah Hulu dan Tertinggal

Program aksi yang perlu dilakukan bagi pemerataan pembangunan di wilayah hulu dan tertinggal adalah: (1) membuka isolasi wilayah yang diwujudkan melalui pembangunan yang terencana dan proporsional; (2) pembangunan hubungan darat dan udara menuju wilayah yang terisolasi; (3) memperkecil disparitas kuantitas dan kualitas pembangunan antarwilayah perkotaan dan pantai/pesisir; (4) pelaksanaan transmigrasi dalam bentuk Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dengan berbagai profesi, seperti petani, peternak, pedagang, guru, perawat, dokter,



dan lainnya; (5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan wilayah tertinggal dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan; (6) melaksanakan program bagi hasil tambang bagi wilayah tertinggal yang merupakan wilayah penghasil tambang.

Program aksi tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dicapai begitu saja. Ada prasyarat percepatan dan pembangunan

yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: (1) sikap alternatif bagi wilayah hulu dan tertinggal dalam aspek kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian; (2) keselarasan dan keterpaduan di antara ketiga level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penentuan agenda kegiatan; (3) program dan instrumen pelaksanaan serta alokasi anggaran dari kementerian/lembaga yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah hulu dan tertinggal; (4) adanya skema pendanaan khusus bagi pembangunan wilayah hulu dan tertinggal; (5) adanya inisiatif baik dari kabupaten maupun provinsi untuk menangani ketertinggalan wilayah sesuai masalah, potensi, dan kewenangan yang dimiliki; (6) adanya pengaturan kewenangan tanggung jawab, alokasi anggaran, mekanisme kerja, dan hubungan kerja antarinstansi; (7) adanya insentif yang memadai bagi masyarakat yang bekerja di wilayah hulu; (8) adanya program penanganan atas kerusakan lingkungan, antisipasi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim; dan (9) menjaga kawasan lindung, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan daerah reboisasi.

#### **6.2.4. Manajemen Tata Ruang**

Dalam pengembangan wilayah Kutim, penataan ruang dapat memberikan arahan berupa rekayasa untuk mengarahkan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana yang diinginkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RT,RW). Penataan ruang yang baik akan mendukung pertumbuhan dan menyelaraskan pembangunan di Kutim.

Program aksi yang akan dilakukan dalam perbaikan manajemen tata ruang Kutim antara lain: (1) mengadakan konsolidasi serta pendidikan dan pelatihan tata ruang untuk aparat daerah terkait; (2) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan mengenai tata ruang; (3) membuat rencana struktur ruang yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana jaringan sistem prasarana; (4) membuat rencana pola ruang yang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya; (5) membuat rancangan zonasi wilayah Kutim.

### **6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Pembangunan SDM dilakukan pada lima sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, agama, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik dan iklim investasi. Pembangunan SDM lebih ditekankan pada pembangunan kualitas SDM dan aparatur pemerintah. Di samping itu, pengembangan dari sisi agama dilakukan dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan. Karena dengan moral dan akhlak yang mulia, karakter

bangsa dapat diciptakan. Pengembangan dalam bidang agama mutlak dilakukan mengingat prestasi Kutim sebagai juara dalam dugaan kasus korupsi yang dilakukan pejabat pemda dan ketua DPRD. Agama sebagai sebuah instrumen pembentukan karakter harus mampu mengurangi munculnya karakter masyarakat yang negatif.

Dari sisi pendidikan, hal utama yang dilakukan adalah memerangi kebodohan. Pembangunan bidang pendidikan Kutim ke depan, akan dilaksanakan dengan konsep "Kutim Cemerlang" (CERdas, MERata, dan prestasi gemiLANG). Penerapan konsep tersebut adalah dengan cara merealisasikan anggaran pendidikan 20% dan wajib belajar 12 tahun. Setelah itu meningkatkan kualitas guru berdasarkan undang-undang guru dengan cara menetapkan syarat bahwa semua guru harus S1. Kualitas guru harus ditingkatkan karena pendidikan di Kutim bisa meningkat apabila kualitas gurunya juga bagus. Hal lainnya adalah peningkatan kesejahteraan guru. Peningkatan kesejahteraan guru dilakukan dengan cara memberikan insentif kepada para guru. Kemudian peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan juga penting untuk dilakukan, yaitu dengan cara pembangunan sekolah-sekolah baru dan unggulan. Selain itu, membantu kepala sekolah mendapatkan mobil. Semua kepala sekolah memperoleh bantuan kendaraan roda empat secara bertahap.

Salah satu instrumen dalam pembangunan dan peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut adalah sekolah dan perpustakaan. Dengan adanya sekolah dan perpustakaan yang lengkap diharapkan masyarakat menjadi terbuka wawasannya akan ilmu pengetahuan. Hal ini nantinya dapat meningkatkan kualitas SDM dalam pembangunan daerah.

Pada tahun 2019/2020, jumlah sekolah di Kaltim mencapai 4.888 unit. Dengan rinciannya yaitu TK sebanyak 1.521 unit, SD sebanyak 2.032 unit, SLTP sebanyak 821 unit, SMU sebanyak 293 unit, dan SMK sebanyak 221 unit. Selama 2019/2020, Kabupaten Kutim merupakan kabupaten yang memiliki jumlah sekolah terbanyak ketiga di Kaltim dengan pangsa mencapai 11,17% atau sebesar 546 unit. Posisi pertama ditempati oleh Kukar dengan pangsa sebesar 24,84% dengan jumlah sekolah

sebanyak 1.214. Posisi kedua ditempati oleh Samarinda sebesar 14,77% atau 722 unit, dan posisi keempat ditempati oleh Balikpapan sebesar 11,01% atau 538 unit (lihat Tabel 30).

**Tabel 30. Jumlah Sekolah di Provinsi Kaltim Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota, 2019-2020**

Kabupaten/Kota	Sekolah					Jumlah	Pangsa
	TK <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SLTP <sup>3</sup>	SMU <sup>4</sup>	SMK	2019/2020	2019/2020
Paser	155	239	94	31	13	532	10,88
Kutai Barat	108	217	67	24	13	429	8,78
Kutai Kartanegara	393	509	196	72	44	1.214	24,84
<b>Kutai Timur</b>	<b>171</b>	<b>227</b>	<b>98</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>546</b>	<b>11,17</b>
Berau	101	172	62	22	14	371	7,59
Penajam Paser Utara	77	109	42	13	10	251	5,14
Mahakam Ulu	34	39	15	7	2	97	1,98
Balikpapan	178	210	85	32	33	538	11,01
Samarinda	238	249	128	54	53	722	14,77
Bontang	66	61	34	13	14	188	3,85
Jumlah	1.521	2.032	821	293	221	4.888	100

TK Juga termasuk Raudatul Athfal

SD juga mencakup Madrasah Ibtidaiyah;

<sup>3</sup>SLTP juga mencakup Madrasah Tsanawiyah;

<sup>4</sup>SMU juga mencakup Madrasah Aliyah;

Sumber: BPS Kaltim (2020)

Sedangkan untuk jumlah perpustakaan, pada tahun 2019 Kaltim memiliki perpustakaan sebanyak 1.743 unit. Dari jumlah ini, perpustakaan sekolah memiliki proporsi yang besar yaitu 1.058 unit (60,7%), diikuti perpustakaan desa sebanyak 455 unit (26,10%), dan perpustakaan rumah ibadah sebanyak 85 (4,87%). Instansi sebanyak 83 unit, dan terakhir perpustakaan umum yang berlokasi di rumah ibadah sebanyak 85 unit. Sama halnya dengan jumlah sekolah, pangsa jumlah perpustakaan tertinggi pun berada di wilayah Kukar yaitu sebesar 26,16% atau 456 unit, diikuti oleh Samarinda sebesar 17,95% atau 313 unit, diikuti oleh Balikpapan sebesar 13,48% atau 235 unit, dan Paser sebesar 13,19% atau 230 unit (lihat Tabel 31). Sementara Kutim berada di posisi kelima dengan pangsa sebesar 7,74% atau hanya 135 unit perpustakaan di seluruh wilayah Kutim.

Kebijakan prioritas dalam perluasan akses dan pemerataan pendidikan meliputi: (1) pendanaan biaya operasi Wajib Belajar 12 tahun dari sebesar minimal 20% dari APBD; (2) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; (3) perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia di atas 15 tahun; (4) pengembangan Sekolah Wajib Belajar; (5) pelayanan khusus bagi wilayah hulu/terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar; (6) perluasan akses pendidikan Wajib Belajar pada jalur nonformal; (7) perluasan akses PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini); (8) perluasan akses SMU/SMK besar dan SM Terpadu; (9) perluasan akses pendidikan tinggi; (10) peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/SM Terpadu, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Perguruan Tinggi; (11) pemanfaatan *Information and Communication Technology* (ICT) sebagai media pembelajaran jarak jauh; dan (12) perluasan akses Program Akselerasi, Sekolah Unggulan Bertaraf Internasional dan SLB.

**Tabel 31. Banyaknya Perpustakaan di Kaltim  
Menurut Jenis dan Kab/Kota, 2019**

Kabupaten/Kota	Umum			Instansi	Sekolah				Rumah Ibadah	Jumlah
	Desa	Kec.	Kab/ Kota		SD	SMP	SMA	PT		
Paser	71	0	1	2	104	25	12	3	12	230
Kutai Barat	51	0	1	5	33	13	6	3	4	116
Kutai Kartanegara	102	18	1	4	213	65	23	3	27	456
Kutai Timur	57	35	1	6	15	10	5	3	3	135
Berau	57	0	1	7	36	14	7	3	2	127
Penajam Paser Utara	30	0	0	1	24	5	4	0	6	70
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Balikpapan	27	0	1	9	149	14	15	6	14	235
Samarinda	45	0	2	48	75	54	46	29	14	313
Bontang	15	0	1	1	16	11	14	0	3	61
Jumlah	455	53	9	83	665	211	132	50	85	1.743

Sumber: BPS Kaltim (2020)

Program aksi kebijakan perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang perlu dilakukan menuju Kutim Bangkit 2026 adalah: (1) perluasan akses dan pemerataan pendidikan; (2) pencapaian sasaran mutu dan relevansi pendidikan; (3) pencapaian sasaran tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik (lihat Gambar 36).

**Gambar 36. Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM**

**Perluasan Akses dan  
Pemerataan Pendidikan**

**Pencapaian Sasaran Mutu  
Dan Relevansi Pendidikan**

**Pencapaian Sasaran Tata Kelola  
Akuntabilitas dan Pencitraan Publik**

Program aksi prioritas dalam pencapaian sasaran mutu dan relevansi pendidikan meliputi: (1) penyusunan dan implementasi Rencana Strategik dan Perda (Peraturan Daerah) penyelenggaraan pendidikan; (2) pendataan dan pemanfaatan sistem informasi pendidikan berbasis ICT; (3) penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP; (4) perbaikan sarana dan prasarana; (5) penetapan telematika dalam pendidikan; (6) pengembangan sekolah bertaraf internasional; (7) perluasan akses pendidikan Wajib Belajar pada jalur nonformal; (8) perluasan akses PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini); (9) perluasan akses SMU/SMK besar dan SM Terpadu; (10) perluasan akses pendidikan tinggi; (11) peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/SM Terpadu, SLB dan PT; (12) pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran jarak jauh; dan (13) perluasan akses program akselerasi sekolah.

Program aksi prioritas dalam pencapaian sasaran tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan meliputi: (1) peningkatan sistem pengawasan internal; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi pemeriksaan aparat; (3) peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat; (4) peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran; (5) peningkatan ketaatan aparat pada peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung percepatan pengembangan kualitas SDM, selain tiga prioritas kebijakan di atas, diimplementasikan juga tiga program unggulan yang telah menjadi program pada level Provinsi Kaltim yakni program cerdas, program merata, dan program cemerlang yang diterapkan di era Gubernur Awang Faroek Ishak. Ketiga program tersebut akan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

### 6.3.1. Program Cerdas

Program Cerdas mempunyai makna “Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berdaya saing tinggi.” Konsep ini pada dasarnya memiliki arti luas dalam hal peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Implementasi dari konsep ini dituangkan dalam rencana kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan sistem pendidikan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, yang secara garis besar dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan berikut: (1) sistem baku tentang penyelenggaraan pendidikan yang dimuat dalam Perda; (2) penyusunan Rencana Strategik pendidikan yang dibuat untuk jangka waktu 5 tahun dalam rangka menyusun kerangka konsep pengembangan pendidikan yang berkelanjutan (*sustainable education*); (3) pemutakhiran *database* pendidikan dan pemetaan kualitas pendidikan; (4) peningkatan kualifikasi pendidikan formal pendidik dan tenaga kependidikan menjadi minimal S1/D4 untuk guru dan minimal S2/S3 untuk dosen; (5) pengembangan silabus dan kurikulum sekolah dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetap dikembangkan dengan acuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Berbasis Masyarakat (KBM) dan potensi wilayah; (6) pengembangan pendidikan kejuruan yang disesuaikan dalam mendukung program pembangunan agroindustri dan energi; (7) pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama di sekolah-sekolah; (8) pengembangan dan pembinaan seni dan budaya; (9) pengembangan bakat khusus siswa dalam bidang sains, seni, olah raga dan bidang khusus lainnya; (10) pengembangan sekolah unggulan dan sekolah terpadu berbasis teknologi informasi di setiap kabupaten/kota; (11) pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi.

Sistem baku pendidikan tentang penyelenggaraan pendidikan harus memuat segala hal prinsip dan dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan pendidikan kabupaten, di mana minimal di dalamnya memuat: (1) pengalokasian anggaran pendidikan 20% dari APBD sesuai dengan amanat konstitusi; (2) strategi penuntasan wajib belajar 9 tahun dan penancangan dan target penuntasan wajib belajar 12 tahun di Kutim; (3) strategi dan kebijakan tentang bebas biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu; (4) strategi dan kebijakan tentang peningkatan kualitas, profesionalitas dan kesejahteraan pendidik, dan tenaga kependidikan; (5) kebijakan tentang arah pengembangan pendidikan kejuruan ke arah agroindustri dan energi.

### 6.3.2. Program Merata

Sekolah menurut jenisnya tersebar secara tidak merata pada semua kecamatan di Kutim (lihat Tabel 32). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan akses pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah di Kutim, perlu mendapatkan perhatian serius. Untuk level TK misalnya, Kecamatan Sangatta Utara memiliki 40 unit sekolah (21,50%) dan Kecamatan Sandaran hanya memiliki 4 unit sekolah (2,15%). Demikian juga dengan SD. Terdapat 26 unit sekolah di Sangatta Utara (12,14%) sementara di Kecamatan Teluk Pandan hanya terdapat 5 unit sekolah (2,33%).

Untuk level SMP, SMA dan SMK, persebarannya sudah cukup merata, namun Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibukota kabupaten menunjukkan posisi dominan yang mencolok dibandingkan kecamatan lainnya (lihat Gambar 37).

Program Merata memiliki makna "pendidikan yang berkeadilan, berpihak pada rakyat kecil, merata bagi seluruh masyarakat dan menyejahterakan tenaga kependidikan." Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya: (1) penyediaan akses pendidikan gratis dari SD hingga Perguruan Tinggi atau bebas biaya pendidikan (bebas SPP); (2) peningkatan insentif dan honorarium yang memadai bagi pendidik dan tenaga kependidikan; (3) penambahan guru profesional dan distribusi guru secara merata; (4) *rewards* guru dan dosen berprestasi dalam bentuk *academic rewards*; (5) pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah serta organisasi-organisasi profesi di bidang pendidikan; dan (6) pemenuhan kebutuhan informasi pendidikan.

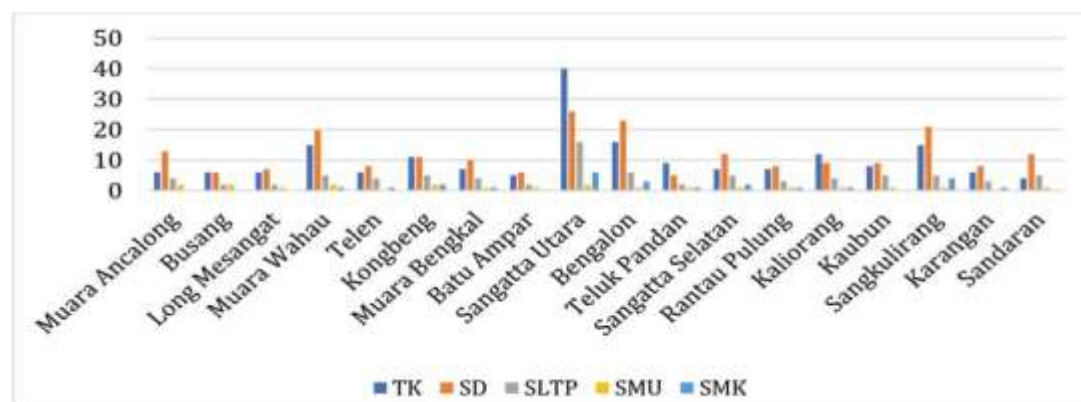


**Tabel 32. Jumlah Sekolah di Kutim Menurut Jenis dan Kecamatan, 2018/2019**

Kecamatan	TK	SD	SLTP	SMU	SMK
Muara Ancalong	6	13	4	2	-
Busang	6	6	2	2	-
Long Mesangat	6	7	2	1	-
Muara Wahau	15	20	5	2	1
Telen	6	8	4	-	1
Kongbeng	11	11	5	2	2
Muara Bengkal	7	10	4	1	1
Batu Ampar	5	6	2	1	-
Sangatta Utara	40	26	16	2	6
Bengalon	16	23	6	1	3
Teluk Pandan	9	5	2	1	1
Sangatta Selatan	7	12	5	1	2
Rantau Pulung	7	8	3	1	1
Kaliorang	12	9	4	1	1
Kaubun	8	9	5	1	-
Sangkulirang	15	21	5	1	4
Karangan	6	8	3	-	1
Sandaran	4	12	5	1	-
Total	186	214	82	21	24

Sumber: Diringkas dari BPS Kutim (2020)

**Gambar 37. Persebaran Sekolah di Kutim Menurut Jenis dan Kecamatan, 2018/2019**



Sumber: Diolah dari BPS Kutim (2020)

Program Merata juga fokus pada kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagai modal pengembangan pendidikan. Program-program yang akan dilaksanakan adalah: (1) pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat; (2) penambahan gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, bengkel, dan sarana lainnya pada satuan-satuan pendidikan yang memerlukan; (3) penambahan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana pembelajaran seperti alat-alat peraga, peralatan laboratorium, peralatan mesin-mesin keterampilan, dan prasarana pendukung pembelajaran lainnya.

Pemenuhan kebutuhan akses ilmu pengetahuan, di mana sehubungan dengan perkembangan ilmu yang dinamis, maka akses menuju pengayaan ilmu baik guru maupun siswa harus dilakukan dengan beberapa alternatif, di antaranya: (1) pengadaan buku-buku terbaru untuk perpustakaan sekolah dan daerah; (2) berlangganan majalah dan atau jurnal ilmiah; (3) mengusahakan fasilitas *free internet on-line* di beberapa tempat yang mudah diakses oleh guru dan siswa.

Fasilitas bersama (*education center*) berupa fasilitas pendidikan terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh komponen pendidikan, khususnya bagi yang belum memiliki cukup fasilitas. Beberapa fasilitas bersama tersebut di antaranya adalah: (1) perpustakaan, yang mengoleksi buku-buku referensi, ensiklopedia, kamus dan lain-lain; (2) laboratorium, seperti laboratorium kimia, fisika, biologi, komputer dan bahasa; (3) bengkel keterampilan mesin, listrik, otomotif, dan lain-lain yang diperuntukkan bagi siswa SMK; (4) taman bermain bagi anak usia dini dan usia taman kanak-kanak; (5) aula, auditorium atau ruang pertemuan.

### 6.3.3. Program Prestasi Gemilang

Prestasi Gemilang yang dimaksud dalam hal ini memiliki arti yang lebih luas yaitu "menghasilkan prestasi gemilang, mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan kebutuhan daerah, regional, nasional bahkan internasional, serta terwujudnya institusi pendidikan yang mempunyai citra yang baik di masyarakat." Oleh karena itu, konsep prestasi gemilang lebih berorientasi pada kemampuan kompetitif pada masa persaingan bebas. Beberapa program yang



dapat dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut: (1) pembenahan manajemen, akuntabilitas publik dan pencitraan pengelola pendidikan; (2) pembenahan kurikulum dan silabus secara periodik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di setiap lingkungan satuan pendidikan; (3) penciptaan iklim kompetisi ilmiah baik antarsiswa, antarpendidik dan tenaga kependidikan dan antarsatuan pendidikan; (4) pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa kurang mampu dan berprestasi; (5) mendorong keterlibatan lintas sektoral dalam peningkatan mutu pendidikan; (6) menciptakan program-program unggulan seperti program akselerasi, kelas berbahasa asing; (7) pembinaan dan pemanfaatan lembaga pendidikan nonformal.



#### **6.3.4. Peranan Wanita**

Program kebijakan pembangunan yang berperspektif gender dalam kerangka otonomi daerah, hendaknya terarah, sistematis dan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan peluang dan memberi kepercayaan yang proporsional kepada perempuan untuk menunjukkan peran terbaiknya dalam berbagai kegiatan pembangunan dan melindungi kaum perempuan dari ketidakberdayaannya. Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya kekerasan terhadap perempuan, timbulnya *trafficking* (perdagangan manusia terutama perempuan dan anak) di beberapa daerah.

Oleh karena itu suksesnya pelaksanaan otonomi daerah mensyaratkan strategi yang tepat di antaranya dengan cara memberdayakan segenap lembaga negara, baik di pusat maupun daerah termasuk pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan

gender. Kebijakan dan strategi penataan lanjut yang menjadi opsi pendayagunaan adalah mengharmonisasikan, menyetarakan serta menyinergikan antara undang-undang otonomi dengan undang-undang sektoral, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan di tingkat pusat dan daerah, menyusun visi misi dan kebijakan serta kemitraan bersama, melakukan revitalisasi dan reposisi pemberdayaan perempuan, menyusun peraturan pengarusutamaan gender di setiap strata pemerintahan dan elemen dalam masyarakat.

### **6.3.5. Program Peningkatan Layanan Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sekaligus prasyarat yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas SDM Kutim. Masyarakat sehat yang menjadi tujuan tersebut akan dapat dicapai dengan disediakannya infrastruktur kesehatan yang berkualitas dan merata. Infrastruktur kesehatan mencakup puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan, dan lain-lain.

Dari sisi jumlah dokter, Kutim menempati posisi kelima dengan 141 dokter atau hanya 8,43% dari seluruh Kaltim. Demikian juga untuk jumlah perawat dan bidan. Kutim menempati posisi kelima dengan 549 perawat atau 7,28% dari total jumlah perawat yang ada di Kaltim. Sementara untuk jumlah bidan, posisi Kutim tidak terlalu jauh dari kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. Demikian juga untuk fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas. Saat ini sudah terdapat 4 unit Rumah Sakit dan 21 unit Puskesmas yang tersebar pada berbagai kecamatan di Kutim (lihat Tabel 33). Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kutim bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kaltim tergolong cukup bagus.

Jika dilihat jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan, maka permasalahan belum meratanya jumlah tenaga kesehatan di kabupaten ini menjadi sangat jelas (lihat Tabel 34). Dari ketersediaan tenaga kesehatan, data juga menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang signifikan antarkecamatan di Kutim. Kecamatan Sangatta Utara juga memiliki jumlah tenaga kesehatan yang dominan, mengingat posisinya sebagai ibukota kabupaten dan jumlah penduduk yang terkonsentrasi di Sangatta.

**Tabel 33. Jumlah Dokter, Perawat, Bidan, Rumah Sakit, dan Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2019**

Kabupaten/Kota	Dokter	Perawat	Bidan	Rumah Sakit	Puskesmas
Pasar	83	525	418	3	20
Kutai Barat	46	411	258	1	19
Kutai Kartanegara	160	1 073	631	3	35
Kutai Timur	141	549	479	4	21
Berau	98	617	313	2	21
Penajam Paser Utara	40	252	211	1	11
Mahakam Ulu	19	163	76	2	5
Balikpapan	465	1 529	469	9	27
Samarinda	382	1 945	334	9	26
Bontang	237	474	169	4	6
Kalimantan Timur	1.671	7.538	3.358	38	191

Sumber: BPS & Bappeda Provinsi Kaltim (2020)

**Tabel 34. Jumlah Tenaga Medis, Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Kutim Menurut Kecamatan, 2019**

Kecamatan	Tenaga Medis	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesehatan Lainnya
Muara Ancalong	1	15	18	1	1
Busang	1	11	12	2	-
Long Mesangat	-	16	18	3	1
Muara Wahau	4	30	40	4	2
Telen	4	9	20	1	-
Kongbeng	2	29	23	-	1
Muara Bengkal	1	24	26	3	1
Batu Ampar	1	11	12	2	1
Sangatta Utara	114	514	152	106	8
Bengalon	2	23	32	3	2
Teluk Pandan	2	20	27	3	3
Sangatta Selatan	2	8	16	-	3
Rantau Pulung	2	20	16	2	3
Kaliorang	1	18	23	2	3
Kaubun	2	21	23	-	-
Sangkulirang	12	50	45	5	4
Karangan	1	10	10	1	-
Sandaran	-	7	13	2	-
Total	152	836	526	140	33

Sumber: BPS Kaltim (2020)

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka program aksi yang dapat dilakukan dalam pengembangan pelayanan dan akses kesehatan secara merata adalah: (1) Peningkatan status rumah sakit dari tipe C ke tipe B; (2) peningkatan pelayanan PUSKESMAS menjadi pelayanan rawat inap 24 jam yang dilengkapi dengan sarana rawat inap, tenaga medis, paramedis, dan obat-obatan yang memadai; (3) peningkatan insentif bagi dokter-dokter luar Kutim agar mau bekerja di Kutim dengan perbaikan status kepegawaian, peningkatan gaji, dan pemberian fasilitas kendaraan; (4) peningkatan kualitas SDM dokter dan tenaga kesehatan; (5) menyediakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan prioritas bagi masyarakat tidak mampu; menyebarkan pentingnya pendidikan kesehatan bagi masyarakat Kutim; dan (6) melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan di wilayah-wilayah hulu dan terpencil.

### **6.3.6. Program Reformasi Birokrasi**

Kebijakan penataan kelembagaan pemerintah lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional dan transparan. Dengan upaya tersebut diharapkan organisasi perangkat daerah tidak akan terlalu besar. Dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dalam konteks ini pemerintah daerah diharapkan menciptakan organisasi perangkat daerahnya yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dengan demikian langkah-langkah penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk mewujudkan postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien, dan efektif dengan didukung oleh SDM yang berkualitas serta diterapkannya manajemen yang baik dalam menjalankan roda organisasi perangkat daerah tersebut.

Berdasarkan tujuan penerapan PP No.41 Tahun 2007, prinsip-prinsip penataan organisasi, dan konsekuensi atau permasalahan yang timbul akibat penerapan PP tersebut, maka program aksi yang dapat dilakukan antara lain: (1) menerapkan prinsip pencapaian golongan fungsional tertentu melalui sistem kredit poin yang memandang jabatan struktural terpisah, dalam arti bisa saja diduduki orang yang mempunyai jabatan fungsional rendah; (2) melakukan penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan keahliannya demi mewujudkan *the right man on the right place*; (3) melakukan perubahan terhadap kultur pemerintahan, yakni di samping dengan mengevaluasi pimpinan unit dan personel di bawahnya, juga mendorong level birokrasi terbawah untuk berubah; (4) mengubah struktur organisasi yang

rigid dan kaku yang merupakan ciri khas sistem *management by mandate and rule* atau *command and control* dengan penerapan prinsip *E-Government* dalam sistem layanan satu atap (SIMTAP); (5) pengembangan jabatan fungsional (jafung) sebagai realisasi banyaknya jabatan struktural yang dipangkas; (6) memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D); (7) memberikan tunjangan profesi bagi tenaga fungsional, yaitu dokter, tenaga medis, dosen, guru, dan tenaga penyuluh).

Peran penting Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dapat dilakukan melalui proses penyusunan sistem perencanaan pembangunan secara *online (e-planning)*. Dengan sistem ini maka proses perencanaan dan pembangunan daerah dengan akan dilakukan dengan mudah karena dirancang sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan yang berlandaskan hukum dan aturan yang berlaku. Sistem Informasi ini hadir sebagai jawaban dan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pemda dalam memaksimalkan kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cepat, tepat, akuntabel, dan *up to date*.

Upaya inovatif ini dilakukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi data yang dapat mendukung secara penuh. Selain itu juga sistem perencanaan berbasis *online* ini dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta diharapkan dapat membantu tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya sistem ini, efisiensi bukan hanya akan terwujud dalam hal alokasi anggaran, tapi juga dari sisi waktu dan proses perencanaan pembangunan daerah.

Keseluruhan inovasi sistem informasi, perencanaan pembangunan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, manajemen informasi pemerintahan kabupaten dan SAKIP tersebut di atas, akan menjadi dasar bagi pengembangan manajemen pemerintahan berbasis digital (*Digital Government*). Kerangka strategik ini, mengandung harapan besar bahwa tidak akan ada lagi korupsi, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi yang melibatkan aparatur birokrasi di Kutim. Secara skematis, alur pikir ini dapat digambarkan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan (lihat Gambar 38).

**Gambar 38. Inovasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Sakip**



Untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan yang terdokumentasi dengan baik, maka diusulkan perancangan aplikasi Suara Kutim yang dapat dioperasikan secara *real time* oleh Bappeda Kutim setelah dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Sistem penjaringan aspirasi *online* ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat Kutim untuk menyampaikan informasi secara aktual tentang penjaringan aspirasi publik terhadap berbagai usulan seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan dan lain sebagainya di Kutim.

Aplikasi ini nantinya akan dikelola oleh petugas dan tim ahli yang telah ditunjuk oleh Bappeda Kutim. Seluruh lapisan masyarakat Kutim dapat berperan serta dengan memberikan saran dan keluhan mereka melalui *website*, sms dan aplikasi *smartphone*. Sistem ini juga menyajikan usulan sistem dari pemerintah untuk masyarakat mencari informasi sarana dan prasarana serta memberikan saran dan kritik untuk meningkatkan layanan serta mempercepat informasi kebijakan pembangunan sehingga bisa pemerintah dapat memberikan *respons* secara cepat dan sigap. Milenial Kutim dapat menjadi agen-agen pembangunan karena karakteristiknya yang sangat dekat dengan penggunaan berbagai media digital dan penguasaan teknologi dengan informasi dan komunikasi.



Pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku, khususnya di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur oleh pemerintah pusat, masih memungkinkan bagi panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk melakukan tindakan *fraud* berupa korupsi di setiap tahapannya. Kasus korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih tergolong sebagai salah satu kasus korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia.



Pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintahan telah melewati sejarah panjang dan berbagai bentuk penyimpangan yang telah teridentifikasi, adapun bentuk-bentuk penyimpangan antara lain seperti; adanya *kick-back* selama proses pengadaan, yaitu penggelapan dana, munculnya praktik suap untuk memenangkan pengadaan, proses pengadaan yang tidak transparan, pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan, dan adanya kongkalikong untuk melakukan *mark-up* harga perkiraan sendiri.

*E-procurement* merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Sebelum adanya penerapan *e-procurement* dalam dunia PBJ, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu langsung mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pengadaannya yang dapat memunculkan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, terbentuknya sistem *E-procurement* akan mentransformasi proses pengadaan menjadi lebih baik. Sistem *E-procurement* sendiri tidak hanya sebatas dengan proses pembelian barang/jasa, akan tetapi juga bisa dikembangkan ke dalam proses negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan Penyedia barang/jasa.

Kutim saat ini harus kembali menerapkan teknologi informasi dalam sistem informasi pemerintahan daerahnya. Menerapkan *E-Government* adalah tanggung jawab komite SIMPEKAB (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten). Komite SIMPEKAB mengkoordinasikan sistem informasi dan jasa lisensi. Dengan menggunakan SIMPEKAB, diharapkan kualitas jasa publik meningkat.

Dengan menerapkan *E-Government*, pemerintah kabupaten akan mampu mencapai pemerintahan yang efisien, efektif, dan bertanggungjawab. Komponen yang ada dalam SIMPEKAB antara lain meliputi: (a) Sistem Informasi Keuangan daerah (SIKD); (b) Sistem Informasi Geografis (Simgeo); (c) Sistem Informasi pegawai (Simpeg); (d) Sistem Informasi perlengkapan daerah (Sipda); (e) Sistem Informasi statistik (Sipsta); (f) Sistem Informasi penanaman modal daerah (Sipmd); (g) Sistem Informasi agrobisnis (Siagro); (h) Sistem Informasi pariwisata daerah (Sipar); (i) Sistem Informasi lingkungan daerah (Silda); (j) Sistem Informasi tenaga kerja (Simnaker); (k) Kutim Website.

Sistem informasi yang ada sekarang meliputi: Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMPTAP), statistik perlengkapan kabupaten, pegawai, tujuan pariwisata, keuangan publik daerah, geografis, agribisnis, investasi, tenaga kerja, dan lingkungan. Secara singkat, sistem ini memberikan informasi mengenai persyaratan, prosedur, waktu dan biaya. Dalam hal waktu dan biaya, sistem ini sangat efisien. Fasilitas yang disediakan SIMPTAP antara lain: (a) informasi setiap proses perijinan atau jasa-jasa tersedia (b) Mencetak surat ijin, aplikasi, surat penolakan, formulir pembayaran, dan dokumen-dokumen lain dari jasa yang tersedia. (c) Pembayaran *management pass* melalui bank pembangunan daerah bank (BPD) (d) Memproses penghitungan pendapatan (e) Memonitor setiap prestasi dan status jasa (f) Kemudahan mengakses.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP menjelaskan/melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam masa kepemimpinan ke depan, target SAKIP Kutim harus terjadi peningkatan dengan predikat A. Saat ini predikat SAKIP Kutim masih dalam kategori B.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) telah mencanangkan suatu sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan yang komprehensif meliputi isu-isu tematik, secara holistik secara terintegrasi dan

spasial. Lebih dikenal dengan pendekatan THIS (lihat Gambar 39). Sebagai bentuk implementasi dari pendekatan tersebut di level pemerintah daerah, pendekatan ini juga akan diadaptasi oleh Kutim dalam menyusun agenda-agenda stratejik perencanaan pembangunan ekonomi daerah ke depan.

Paradigma tematik-holistik menitikberatkan pada keseluruhan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan dalam pembangunan. Pendekatan tematik-holistik tersebut, juga didukung paradigma spasial yang menitik beratkan pada pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang. Sedangkan integratif mengaitkan dan menghubungkan program pembangunan secara terpadu.

**Gambar 39. Pendekatan Perencanaan Pembangunan THIS**



Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas RI (2020)

### 6.3.7. Pelayanan Publik Dan Iklim Investasi

Perbaikan pelayanan administrasi dan iklim investasi bagi masyarakat dan investor adalah hal yang mendesak dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengurus perizinan, menarik investor lebih banyak, meningkatkan nilai investasi di Kutim, dan pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kutim.

Program aksi yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan pelayanan publik dan iklim investasi adalah: (1) menyederhanakan prosedur perizinan dan menggunakan platform digital; (2) menyediakan informasi yang lengkap tentang potensi ekonomi daerah (3) melaksanakan sistem pelayanan satu atap; (4) menambah jumlah kewenangan yang dilimpahkan kepada camat guna mempercepat pelayanan; (5) menertibkan pungutan-pungutan liar yang menciptakan *high cost economy*; dan (6) memerikan insentif bagi para investor dan menjamin keamanan dalam berinvestasi.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

# DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews (2020). *Pakar Prediksi Ekonomi Kutim Turun 2-3 Persen*. Diakses dari <https://kaltim.antaranews.com/berita/74752/pakar-prediksiekonomi-kutim-turun-2-3-persen>. Diakses 3 Oktober 2020.
- Alvara Research Center. (2020). *Indonesia Gen Z dan Milenial Report 2020*. Diakses dari <https://alvara-strategic.com/indonesia-gen-z-and-millenialreport-2020>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Andriani, A. L. & Haryanto, R. (2016). "Kajian Harga Sewa Bangunan Komersial di Koridor Jalan Raya Kalimalang, Jakarta". *Jurnal Pengembangan Kota*. Vol 6, No.2.
- Antara Kaltim (2020). *Pakar Prediksi Ekonomi Kutim Turun 2-3 Persen*. Diakses dari <https://kaltim.antaranews.com/berita/74752/pakar-prediksiekonomi-kutim-turun-2-3-persen>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Antara Kaltim (2020). *Pelayanan Air Bersih Kutim Capai 62,58 persen*. Diakses dari <https://kaltim.antaranews.com/berita/63656/pelayanan-air-bersihkutai-timur-sudah-capai-6258-persen>. Diakses 22 Oktober 2020.
- Azis, M. L. (2018). "Studi Eksplorasi Voting Behavior, Political Branding, Political Disaffection Pada Generasi Pemilih Millenial." *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia 2018*. Vol. 3, No. 1.
- Bank Indonesia Kaltim. (2020). *Kajian Ekonomi Regional Kaltim, Agustus 2020*, Samarinda: BI Kaltim.
- Bappeda Kutim (2018). *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021*. Diakses dari <http://bappeda.kutaitimurkab.go.id/bappedakutim/content/media/P-RPJMD%202016-2021.pdf>. Diakses 5 Oktober 2020.
- Bappeda Kutim (2020). *Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021*. Diakses dari <http://bappeda.kutaitimurkab.go.id/bappedakutim/content/media/Ranwal-RKPD%20Kutim-2021.pdf>. Diakses 5 Oktober 2020.

- Bappeda Kutim (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2019*. Diakses dari <http://bappeda.kutaitimurkab.go.id/bappedakutim/content/media/LKJIP-KAB-KUTIM-2019-TA-2020.pdf>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Beritasatu (2019). *Melongok Penambangan Batu Bara KPC di Sangatta*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/heruandriyanto/ekonomi/551824/melongok-penambangan-batu-bara-kpc-disangatta>. Diakses 25 Oktober 2020.
- Bisnis (2018). *Kawasan Industri KIM Siapkan Rencana Perubahan*. Diakses dari <https://papua.bisnis.com/read/20180314/447/749558/kawasanindustri-kim-siapkan-rencana-perubahan>, Dipublikasikan 14 Maret 2018. Diakses 24 Juli 2019.
- BPK (2016). *Perjanjian Bangun, Guna, Serah (Build, Operate, and Transfer) antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan*

### **Infrastruktur.**

- Diakses dari <https://bandung.bpk.go.id/files/2016/05/Perjanjian-BOTantara-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha.pdf>. Diakses 24 Juli 2019.
- BPKP Kota Bontang (2020). *Visi dan Misi Kota Bontang*. Diakses dari <http://bkpp.bontangkota.go.id/statis/index/53/visi.html>. Diakses 6 Oktober 2020.
- BPS (2020). *Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2010-2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/417/1/-metode-baru-harapanlama-sekolah.html>. Diakses 5 Oktober 2020.
- BPS (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>. Diakses 5 Oktober 2020.
- BPS (2020). *Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiaj/Orang/Tahun), 2010-2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/416/1/metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>. Diakses 5 Oktober 2020.
- BPS (2020). *Peringkat Indeks Pembangunan Manusia 2010-2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/418/1/-metode-baru-peringkat-indeks-pembangunan-manusia.html>. Diakses 5 Oktober 2020.
- BPS (2020). *Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2010-2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-ratalama-sekolah.html>. Diakses 5 Oktober 2020.

- BPS (2020). *Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun), 2010-2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baruumur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html>. Diakses 5 Oktober 2020.
- BPS Kaltim (2017). *Koefisien Gini Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota (Termasuk Kalimantan Utara), 1996-2014*. Diakses dari <https://kaltim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/17/96/koefisien-ginikalimantan-timur-menurut-kabupaten-kota-1996-2014.html>. Diakses 5 Oktober 2020.
- BPS Kabupaten Kutim (2019). *Statistik Daerah Kabupaten Kutai Timur 2019*. Sangatta: BPS.
- BPS Kabupaten Kutim (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Timur Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Sangatta: BPS.
- BPS Kabupaten Kutim (2020). *Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2020*. Sangatta: BPS.
- BPS Kaltim (2020). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020*. Samarinda: BPS.
- BPS Kaltim (2020). *Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2017-2018*. Samarinda: BPS.
- BPS Kaltim (2020). *Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kalimantan Timur 2019*. Samarinda: BPS.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Edisi ke-3. California, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Cegah Korupsi FEB UGM (2016). *Mengapa Rakyat (DIPAKSA) Menyubdisi Koruptor?*. Diakses dari <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/publikasi/BloggerYK-Mengapa%20Rakyat%20Subsidi%20Koruptor-30April16.pdf>. Diakses 5 Oktober 2020.
- Collins, J. C. & Porras J. (2000). *Building Your Company's Vision*. Harvard Business Review. September-October Issue. Diakses dari <https://hbr.org/1998/09/building-your-companys-vision>. Diakses 22 Oktober 2020.
- Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI (2018). *Generasi Milenial Memiliki Empat Karakter Ini Terkait Pemilu 2019*. Diakses dari <https://www.ui.ac.id/generasi-milenial-memiliki-empat-karakter-terkaitpemilu-2019/>. Diakses 5 Oktober 2020.
- Dess, G. G., McNamara, G., Eisner, A. B., & Lee, S. H. (2019). *Strategic Management: Text and Cases*. Edisi 9. New York, USA: McGraw-Hill Education.



- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (2017). *Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Timur Gandeng Investor Rusia Bangun KEK MBTK*. Diakses dari <http://kek.go.id/berita/2017/05/Ketua-Dewan-KawasanKEK-Provinsi-Kalimantan-Timur-Gandeng-Investor-Rusia-Bangun-KEKMBTK>.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DNKEK) (2019a). *Kawasan Ekonomi Khusus*. Diakses dari <http://kek.go.id/>. Diakses 7 Maret 2019.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DNKEK) (2019b). *Maloy Batuta Trans Kalimantan*. Diakses dari <http://kek.go.id/kawasan/MaloyBatuta-Trans-Kalimantan>. Diakses 24 Juli 2019.
- Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutim (DPMPTSP) (2020). Diakses dari <https://dpmptsp.kutaitimurkab.go.id/profiledaerah/gambaran-kutai-timur>. Diakses 28 Oktober 2020.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Perstik Kutim (2019). *KEK Maloy Buka Peluang Kerjasama Investasi Kutim-Brunei Darussalam/* Diakses dari <http://www.kliksangatta.com/berita-10297-kek-maloy-buka-peluangkerjasama-investasi-kutimbrunei-darussalam.html>. Tanggal publikasi 14 Maret 2019. Diakses 24 Juli 2019.
- Dinas Perkebunan Kaltim (2020). *Jadikan Kutim Pusat Agroindustri 2020*. Diakses dari <https://www.disbun.kaltimprov.go.id/artikel/jadikan-kutimpusat-agroindustri-2020>. Diakses 22 Oktober 2020.
- Dinas Pertanian Kabupaten Kutim (2018). *Rencana Strategis (RENSTRA)*. Diakses dari [https://www.kutaitimurkab.go.id/files/upload/Rencana%20Strategis%20\(RENSTRA\)%20Dinas%20Pertanian%20Tahun%202016%20%202021-2018.pdf](https://www.kutaitimurkab.go.id/files/upload/Rencana%20Strategis%20(RENSTRA)%20Dinas%20Pertanian%20Tahun%202016%20%202021-2018.pdf). Diakses 7 Oktober 2020.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016). *Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2009-2016*. Kutai Timur: Kemenkeu.
- Exotica Senggigi (2018). *Mandalika Punya Kita*. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/ntb/files/exo2018.pdf>. Diakses 10 Oktober 2020.
- Faruq, K. (2018). *Total Investasi KEK Mandalika RP17 Triliun*. Diakses dari <https://ivoox.id/total-invetasi-kek-mandalika-rp17-triliun/>, dipublikasikan pada 19 November 2018. Diakses 24 Juli 2019.
- IDN Times Kaltim (2019). *Ada 5 Perusahaan Berminat Investasi di KEK MBTK, Apa Aja Ya?*. Diakses dari <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/humas-kutaitimur/perusahaan-berminat-investasi/full>, tanggal publikasi 25 April 2019. Diakses 24 Juli 2019.

- Hartshorn, T. A. (1992). *Interpreting the City: an Urban Geography*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Ishak, A. F. (2013). *Strategi Kebijakan Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Batubara, Visi Kaltim Maju 2030*. Forum Kaltim Summit II, Balikpapan.
- Jannah, K. M. (2018). *131 Ha Lahan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Siap Dibangun*. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2018/08/08/320/1933583/131-halahan-di-kawasan-ekonomi-khusus-mandalika-siap-dibangun>. Dipublikasikan pada 18 Agustus 2018. Diakses 24 Juli 2019.
- Kasali, R. (2007). *Membidik Pasar Indonesia Segmentasi Targeting Positioning*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Kemendes PDTT (2020). *Profiling Eksisting Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan Lokasi Pengentasan 2020-2024*. Diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1ImzKWW1LNwrWen-2A520xUFmH8jowBx2/view>. Diakses 28 Oktober 2020.
- Kompas (2020). *Bupati Kutai Timur, Kepala Daerah Kedua Yang Ditangkap KPK era Firli*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/03/bupati-kutai-timurkepala-daerah-kedua-yang-ditangkap-kpk-era-firli?page=all>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Kuncoro, M. (2006). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M., (ed.) (2008). *Visi, Misi, dan Strategi Kaltim Bangkit*. Kalimantan Timur: Tim Sukses Awang Faroek Ishak.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis: Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Regional*. 3 ed. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2015). "Membangun dari 'Pinggiran". *Kompas*. 9/2/2015.
- Kuncoro, M. (2016). *Kerangka Pembangunan Ekonomi Kabupaten Malinau*. Malinau: Bappeda Kabupaten Malinau.

- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori & Aplikasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, M. & Idris, A.N. (2010). "Mengapa Terjadi Growth Without Development di Kalimantan Timur". *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 11, No. 2. Diakses dari <http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/323/277>. Diakses 10 Oktober 2020.
- Kuncoro, M., Ismaya, A. S. & Rachmawati (2019). *Pengelolaan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK)*. Samarinda, 23 September 2019.
- Kuncoro, M & Pratiwi, M. C. Y. (2018). *Membangun Kalimantan: Potensi Ekonomi Daerah, Pusat Pertumbuhan dan Strategi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kuncoro, M., Roesmara, D., SAS, G. M. I. & Erlangga, A. B. (2013). *Penyusunan dan Pengumpulan Data: Informasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tarakan*. Tarakan: Bappeda Kota Tarakan.
- Kutai Kertanegara.com (2002). *Pembangunan Royal World Plaza Tidak Pakai APBN*. Diakses dari <https://www.kutaitanegara.com/news.php?id=3749>. Diakses 2 Oktober 2020.
- Kutai Timur Tanggap Covid-19 (2020). *Data Harian Kasus Covid-19 Kabupaten Kutai Timur*. Diakses dari <https://corona.kutaitimurkab.go.id/>. Diakses 21 September 2020.
- Kusumastanto, T. (2008). *Perencanaan Pengembangan Hukum Nasional Tentang Kelautan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, RI. Jakarta
- Lahan Industri (2017). *Menghitung Harga Pokok Tanah*. Diakses dari <https://lahanindustri.wordpress.com/2017/01/10/menghitung-hargapokok-tanah-hpt>. Diakses 27 Oktober 2020.
- Lin, J. Y. & Liu, Z. (2000). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change*. Oct 2000; 49, 1; ABI/INFORM Global pg. 1
- Maharani, D. S. & Indryani, R. (2017). "Analisis Nilai Pasar Tanah Perumahan Kawasan Industri Tuban (KIT) dengan Metode Pengembangan Lahan", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 6, No. 1.

- Media Indonesia (2020). *Korupsi Bupati Kutai Timur Lewat Nepotisme*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/325500-korupsi-bupatikutai-timur-lewat-nepotisme>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Nugraha, S. (2012). *Perjanjian BUILD, OPERATE and TRANSFER (BOT)*. Diakses dari <http://sendhynugraha.blogspot.com/2012/11/perjanjian-build-operateand-transfer.html?m=1>. Diakses 14 Maret 2019.
- Oke Finance (2014). *Menentukan Nilai Wajar Sewa atau Jual Properti*. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2014/12/15/470/1079697/menentukan-nilai-wajar-sewa-atau-jual-properti>. Diakses 26 Oktober 2020.
- Pemkot Balikpapan (2020). *Visi dan Misi*. Diakses dari <http://web.balikpapan.go.id/detail/read/48>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Pemkab Berau (2020). *Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau*. Diakses dari [http://beraukab.go.id/v2/?page\\_id=5635](http://beraukab.go.id/v2/?page_id=5635). Diakses 6 Oktober 2020.
- Pemkab Kartanagara (2020). *Visi-Misi Kabupaten 2016-2021*. Diakses dari <https://www.kukarkab.go.id/>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Pemkab Kutai Barat (2020). *Visi dan Misi*. Diakses dari <https://kutaibaratkab.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Pemkab Kutai Timur (2020). *Visi dan Misi*. Diakses dari <https://www.kutaitimurkab.go.id/page/profile/2>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Pemkab Paser (2020). *Visi-Misi Kabupaten Paser*. Diakses dari <https://paserkab.go.id/home/visimisi>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Pemkab Penajam Paser Utara (2020). *Visi dan Misi*. Diakses dari [https://penajamkab.go.id/?page\\_id=704](https://penajamkab.go.id/?page_id=704). Diakses 6 Oktober 2020.
- Pemkot Samarinda (2020). *Visi dan Misi*. Diakses dari <https://www.samarindakota.go.id/website/laman/visi-dan-misi>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Pemprov Kaltim (2020). *Visi dan Misi*. Diakses dari <https://kaltimprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Pemprov Kaltim (2020). *Peta Pantuan Covid-19 Kalimantan Timur*. Diakses dari <https://covid19.kaltimprov.go.id/>. Diakses 23 September 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2012). *Peraturan Pemerintah No 33/Pmk.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2014). *Permenkeu RI No. 54/pmk.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

- Perkins, D. H., Radelet, S., Lindauer, D. L. & Block, S. A. (2006). *Economics of Development* (Edisi ke-7). ISBN-13: 978-0393934359. New York: W. W. Norton & Company.
- Prasetyanti, R. (2017). "Generasi Millennial Dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok". *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*. Vol. 3 No. 1.
- Prokutim (2020). *Pemkab Kutim Sampai Nota Pertanggung Jawaban APBD 2019*. Diakses dari <https://pro.kutaitimurkab.go.id/2020/07/09/pemkab-kutimsampai-nota-pertanggung-jawaban-apbd-2019/>. Diakses 9 Oktober 2020.
- Portal Informasi Indonesia (2019). *Tiga KEK Baru Bakal Serap Investasi 110T*. Diakses dari <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalamangka/ekonomi/tiga-kek-baru-bakal-serap-investasi-110-t>, tanggal publikasi 29 April 2019. Diakses 24 Juli 2019.
- Republik Indonesia (1990). *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan*. Diakses dari [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_40.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_40.pdf). Diakses 5 Oktober 2020.
- Riana, F. (2019). *Menpar: Sirkuit MotoGP akan Dibangun di Mandalika*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1175273/menpar-sirkuit-motogpakan-dibangun-di-kek-mandalika/full&view=ok>. Diakses 12 Oktober 2020.
- Robbins, S. P. & Coulter, M. A. (2018). *Management*. Edisi 14. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Satu Data Indonesia (2020). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur*. Diakses dari <https://data.go.id/dataset/jumlahpenduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kutai-timur>. Diakses 20 Oktober 2020.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2020). *Peta Sebaran*. Diakses dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. Diakses 6 Oktober 2020.
- Sihaloho, T. & Muna, N (2013). *Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan*. Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Jakarta (ID): Kementerian Perdagangan.
- Sinar Harapan (2019). *Bujuk Garuda dan Lion Bersinergi, Pemerintah Siapkan KEK Industri Penerbangan*. Diakses dari [http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10995/bujuk\\_garuda\\_dan\\_lion\\_bersinergi\\_pemerintah\\_siapkan\\_kek\\_industri\\_penerbangan](http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10995/bujuk_garuda_dan_lion_bersinergi_pemerintah_siapkan_kek_industri_penerbangan). Diakses 23 Juli 2019.
- Sudarwan, I. A. (2019). *Investasi KEK Bitung Sudah Capai Rp3,8 triliun*. Diakses dari <https://sulawesi.bisnis.com/read/20190409/540/909733/investasi-kek-bitung-sudah-capai-rp38-triliun>, tanggal publikasi 9 April 2019. Diakses 24 Juli 2019.

- Sukarno, P. A. (2019). *3 KEK di Kawasan Timur Indonesia Diperkirakan Serap Investasi Rp110 Triliun*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190401/45/907000/3-kek-di-kawasan-timur-indonesia-diperkirakanserap-investasi-rp110-triliun>, tanggal publikasi 1 April 2019. Diakses 26 Juli 2019.
- Syani, A. (2010). "Analisis Dampak Penerapan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah". *Journal Of Government*. Diakses 26 Oktober 2020.
- Todaro, M. P. dan Smith, S.C. (2015). *Economic Development*, Edisi ke-12. New Jersey, USA: Pearson Education Inc.
- Tom (2019). *Soal Rekomendasi Kemenpora Terkait GOR, Kabid Aset Bilang Bisa Diurus Setelah Penandatanganan MoU*. Diakses dari <https://www.hetanews.com/article/157596/soal-rekomendasikemenpora-terkait-gor-kabid-aset-bilang-bisa-diurus-setelahpenandatanganan-mou>, dipublikasikan Juni 2019. Diakses 24 Juli 2019.
- Tribun Kaltim (2019) *Entaskan Kemiskinan Dengan Cepat Pemkab Kutim Stakeholder Teken Komitmen Penanggulangan Kemiskinan*. Diakses dari <https://kaltim.tribunnews.com/2019/09/18/entaskan-kemiskinandengan-cepat-pemkab-kutim-stakeholder-teken-komitmenpenanggulangan-kemiskinan>. Diakses 6 Oktober 2020.
- UNDP (1990). *Human Development Report 1990*. New York, USA: UNDP.
- Wahyuni, S. & Wahyuningsih (2018). *Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*. Salemba Empat: Yogyakarta.
- Walters, W. (2002). *Mapping Schengenland: Denaturalizing the Border. Enviroment and Planing D: Society and Space*. Diakses dari <https://doi.org/10.1068%2Fd274t>. Diakses 22 Oktober 2020

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]



**KETUA: Prof. MUDRAJAD KUNCORO, Ph.D**

**MUDRAJAD KUNCORO** adalah guru besar ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang sejak 18 November 2019 mendapat amanah sebagai Rektor Universitas Trilogi, Jakarta. Lahir di Yogyakarta, 4 September 1965. Ia masuk peringkat ke-13 ilmuwan terkemuka di Indonesia versi Webometrics (<http://www.webometrics.info/en/node/96>) dan penulis/peneliti top ke-4

Indonesia berdasarkan *Science & Technology Index* (Kemenristekdikti, Maret 2017). Ia mendapat gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat *cum laude* dari FE UGM (1989), *Graduate Diploma* dengan spesialisasi Keuangan Daerah (1992) dan *Master of Social Science* dari University of Birmingham, Inggris (1993), dan Doktor (PhD) dengan spesialisasi *Business & Regional Development* dari University of Melbourne, Australia (2001), dan meraih guru besar termuda FEB UGM (2006). Ia pernah mengikuti kursus singkat *Fiqh for Economists* di International Islamic University, Selangor, Malaysia (1994), *visiting scholar* di Department of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, Canberra (1998), dosen tamu di University of Melbourne, University of Leiden, dan University of Groningen, serta menjadi delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi International Labour Organization ke-96 di Geneva (2007). Jabatan dan tugas yang pernah diemban: Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM (2016-2017), Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM (2007-2011), Chief Economist Recapital Advisors yang dimiliki Sandiaga Uno (2008-2010), Anggota Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2006-2008), Tim Ahli Bidang Ekonomi Kadin (2007-2009), Tim Penyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (2006-2008), Ketua tim revitalisasi Perusda Kaltim (2012-2018), Komisaris PT AMI (Perusda milik provinsi DIY yang punya 2 mal sejak 2004), staf ahli Gubernur DIY bidang ekonomi (Februari 2011-Agustus 2012), *Editor in*



*Chief Journal of Indonesian Economy & Business* (2004-2014), Manajer Kantor Publikasi FEB UGM (2013), dan *Chief Economist* PT Jaya Samudra Karunia Group (sejak 2016). Artikelnya telah dipresentasikan dalam beberapa konferensi internasional di Sydney, Melbourne, Le Havre, Geneva, Groningen, Amsterdam, Leiden, Tokyo, Guangzhou, Denmark, Perth, Canberra, Singapura, Seoul, Manila, Kuala Lumpur, London, Roma, Paris, Cambridge, Oxford. Penghargaan ilmiah (*award*) yang pernah diperoleh, a.l.: (1) *Best presenter* bersama Dwiana Fiqhi Cahyani di Said Business School, Oxford University, Juli 2018; (2) *Best paper award* di UIN Malang, September 2018; (3) *Best paper award* di Konferensi Internasional di Roma Italia; (4) *Best tract presentation & award of honour* dari Academy of Business & Retail Management di London 4-5 November 2013; (5) Penelitian & Pengabdian Award 2010 dari Rektor UGM untuk Kategori Publikasi Internasional Terbaik ke-3 se-UGM; (6) *Special Dean Award* dari Faculty of Economics and Commerce, University of Melbourne; (7) *Teaching Award dan Lecture Notes Award* dari QUE-Economics yang disponsori World Bank. Buku yang telah diterbitkan "baru" 55, a.l.: (1) *Ekonomika Regional: Teori & Praktik*; (2) *Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri 2030?*; (3) *Otonomi Daerah*; (4) *Masalah, Kebijakan dan Politik: Ekonomika Pembangunan*; (5) *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori & Aplikasi*. E-mail: [profmudrajadk@gmail.com](mailto:profmudrajadk@gmail.com). HP/WA: 0811254255; Telp/fax: ++62274 895734.



**ANGGOTA: Drs. JOKO SANGAJI, M.Si**

**JOKO SANGAJI** adalah dosen dan peneliti di Universitas Trilogi, Jakarta. Jabatan fungsional terakhir adalah Lektor Kepala. Ia menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UGM pada tahun 1989 dan 1997. Pengalaman kerja adalah sebagai dosen di bidang ekonomi. Pada tahun 1990-1997 sebagai dosen di UKRIM, Yogyakarta, dan pada tahun 1997-2020 sebagai dosen di IBII KKG, Jakarta. Kegiatan ilmiah yang pernah dilakukan adalah pembicara atau pun peserta di konferensi nasional dan internasional di China, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hasil-hasil penelitian di bidang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional dan internasional dengan topik moneter, lingkungan, perdagangan dan keuangan internasional, pembangunan manusia, gender, dan keuangan. Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti di dalam dan di luar negeri adalah investasi saham, valuta asing, dan komoditi; metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif,

manajemen mutu pendidikan Perguruan Tinggi, pelatihan ekonometrika *time series*, pelatihan ekonometrika data panel, pelatihan statistik dan ekonometrika dengan R, Pelatihan Lisrel dan Amos, Pelatihan PLS, Pelatihan GTAP, Pelatihan RASCH Model, Pelatihan Nvivo, Pelatihan Penulisan Buku dan Pelatihan Kepemimpinan. E-mail: jokosangaji2015@gmail.com. HP/WA: 081314275137.

**ANGGOTA: LESTARI AGUSALIM, S.E., M.Si**



**LESTARI AGUSALIM** adalah dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Trilogi sejak tahun 2013. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan di IPB (2009) dan Program Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi IPB (2013). Pada tahun 2019, melanjutkan studi S3 Ilmu Ekonomi di IPB University. Selama di Universitas Trilogi, pernah diamanahkan sebagai Sekretaris Pusat Studi Ekonomi Pancasila (2015-2017), Koordinator Kelas Ekstensi dan Karyawan (2017-2019), dan Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan (2018-2019). Sehubungan ini terlibat dalam penulisan buku *Sistem Ekonomi Pancasila* hingga edisi ketiga (2020), Penyusunan Rekomendasi, Data Dan Informasi Bidang Pelayanan Dasar Pada Pengembangan Sarana Prasarana Perdesaan (2018), Hilirisasi Industri Agro: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris di Indonesia (2016), Analisis Kebijakan Energi Nasional (2014), dan Proyeksi Ekonomi Indonesia: Akankah Krisis Terus Berlanjut (2013), serta menulis artikel di beberapa jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, serta media cetak nasional. Jumlah artikel terindeks di *Google scholar* tercatat sebanyak 25 artikel dengan jumlah sitasi 53 kali. Sehubungan ini, ia juga aktif terlibat sebagai ketua tim dan anggota tim ahli dalam penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi (3 PT), pemerintah pusat (5 kementerian) dan daerah (11 pemda), lembaga swadaya masyarakat (4 institusi), serta organisasi internasional (3 institusi). Ia pernah mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi terbaik tingkat universitas pada tahun 2016. Selain itu, ia pernah memenangi *call for paper* dalam Seminar Nasional dan Kongres ISEI ke-XX tahun 2018 dengan judul "*Analisis Perkembangan, Kinerja, dan Daya Saing Koperasi Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi*". Email: lestariagusalim@gmail.com. HP/WA: 081382707876



**ANGGOTA: RUSMAN, S.E., M. Ec. Dev.**

**RUSMAN** adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trilogi, Jakarta. Ia meraih Gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat *cum laude* dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013 dan Master di bidang Economics Development dengan konsentrasi Regional Development and Planning dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2018. Karir profesionalnya dimulai ketika menjadi Fasilitator Desa pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-Mandiri Perdesaan) pada tahun 2014, ia pernah sebagai peneliti muda pada *Research and Empowerment Institute* (Resys) di Kota Kendari selama 2015-2016, asisten peneliti pada Pusat Kajian dan Pengembangan Pangan Universitas Gadjah Mada (PUSKAPENAUGM), menjadi peneliti pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2018 dengan fokus utama, pengelolaan Dana Desa di Provinsi Banten, menjadi Fasilitator Kelembagaan pada Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku (Kelola-Sendang) di Kota Palembang Sumatera Selatan yang bekerjasama dengan *Zoological Society of London (ZSL)* tahun 2019. Ia telah melakukan berbagai kegiatan penelitian seputar Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak pertengahan tahun 2019 hingga awal tahun 2020, ia juga pernah menjadi peneliti pada *World Agroforestry Center (ICRAF)* Indonesia untuk mendukung investasi hijau pada *Tropical Landscape Financial Facility (TLFF)*. Selain itu, ia juga pernah terlibat dalam penelitian dengan topik, "*Securing the Sacres: The Linkages Between Religion, Nationalism and National Security in South East Asia*" bekerja sama dengan Queen Mary University of London (QMUL). Email: mimpi\_rusman@yahoo.com. HP/WA 0852-3106-3836.

**NASKAH AKADEMIK**  
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG JILID II

**Pembangunan Kutai Timur 2021-2026  
akan dibawa ke mana?**

Jawaban pertanyaan tersebut terangkum dalam visi, misi, strategi dan program aksi yang ada dalam buku Naskah Akademik ini. Berdasarkan identifikasi potensi ekonomi dan isu strategik, visi dan misi dirumuskan, kemudian diikuti dengan strategi dan program aksi yang jelas dan terarah untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Inilah yang disebut "*change by design*", perubahan yang didesain sedemikian rupa agar Kutai Timur berubah, mampu bangkit, berdaya saing, serta berbasis agroindustri sebagai pilar ekonomi rakyat.

